

TESIS

PERKAWINAN ADAT BUGIS PARIA

**(Studi Etnografi Tentang Perkawinan Adat Bugis Paria
Di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan)**



Oleh :

ABDUL KHALIK RAUF
NIM. 099712730 M

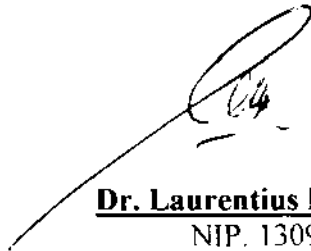
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

TANGGAL, 25 AGUSTUS 1999

Pembimbing,

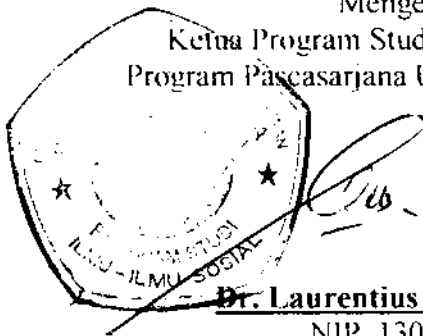


Dr. Laurentius Dyson P., MA

NIP. 130937724

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Laurentius Dyson P., MA

NIP. 130937724

Telah diuji pada

Tanggal, 25 Agustus 1999

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Anggota : 1. Dr. Laurentius Dyson P., MA
2. Dede Oetomo, Ph.D
3. Drs. I Nyoman Naya Sujana, MA

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Karunia-Nya, Tesis ini dapat terwujud sebagai suatu persyaratan akademik Magister Sains pada Program Studi Ilmu-Ilmu sosial, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Proses penulisan ini betapapun terlambat, memakan waktu yang lama, namun dapat diselesaikan berkat perhatian, kerja keras dan ketekunan penulis. Sehubungan dengan proses penyelesaian studi penulis pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, maka selayaknya pada kesempatan ini ijin saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik sebagai individu maupun sebagai lembaga dan pihak-pihak lain yang sangat membantu baik dalam bentuk materiil maupun spiritual sehingga dapat terselesaikan tesis ini dengan baik.

Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan kepada semuanya, secara khusus saya menyebutkan pihak-pihak yang terlibat langsung didalamnya.

Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga, Prof. H. Soedarto, dr. DTM&h., Ph.D, Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. H. Soedijono, dr. dan beserta Asisten Direktur atas diberikannya kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan studi Program Magister.

doa yang senantiasa saya sampaikan kepada H. Andi Abdul Jabbar (mertua) yang sudah tiada.

Kepada istri tercinta Andi Rosdianah H.A. Abdul Jabbar, SE dan kedua anak tersayang, Andi Luthfi Ramadhan Khalik (A. Adeng) dan Andi Bathari Pratiwi Khalik (A. Batari) yang selalu mendampingi baik suka dan duka dan tabah menanti saya dalam menyelesaikan studi, khusus buat istri yang tiada hari tanpa kerja keras, sabar mendidik anak-anak di rumah dan senantiasa mengiringi saya dalam doa, walaupun sering beda pendapat namun mempunyai pengertian yang mendalam, sehingga proses penyelesaian studi saya dapat terselesaikan seperti harapan kita bersama. Sesungguhnya tesis ini kupersembahkan untuk mereka sebagai tanda terima kasihku.

Akhirnya walaupun tesis ini telah selesai, namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tentunya kritik dan saran yang membangun saya sangat harapkan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat dan limpahanNya kepada kita semua. Amin !

Surabaya, Agustus 1999

Penulis

Abdul Khalik Rauf

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI	iii
RINGKASAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
- Tujuan Penelitian	8
- Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
Kebudayaan/Adat	11
Wujud Kebudayaan	13
Sistem Kekerabatan	17
Kerangka Teori	27
- Teori Interaksionisme Simbolik	27
- Teori Strukturalisme	30
- Teori Perubahan Sosial Budaya	33
- Modernisasi	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
Lokasi Penelitian	42
Informan Penelitian	43
Teknik Pengumpulan Data	44
Teknik Olah Data dan Analisi Data	47

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
Selayang Pandang Sejarah Bersatunya Kerajaan Wajo dengan Kerajaan Paria	51
Deskripsi Kelurahan Paria	52
Keadaan Geografis	52
Keadaan Demografis	54
Pendidikan	55
Agama	58
Potensi Wilayah	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Keterkaitan Sistem Perkawinan dengan Sistem Kekerabatan	62
- Lapisan Sosial Masyarakat	62
- Hubungan Kekerabatan dengan Pelapisan Sosial Akibat Perkawinan	73
B. Tahap Prosesi Perkawinan dan Perubahannya	86
- Bentuk-Bentuk Perkawinan	86
- Upacara Sebelum Perkawinan	89
- Upacara Perkawinan	138
- Upacara Setelah Selesai Perkawinan	146
BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK	151
Kesimpulan	151
Implikasi Teoritik	155
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Kepadatan Penduduk di Kelurahan Paria Tahun 1994-1998	54
4.2. Struktur Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Paria	59
4.3. Luas Tanaman Pangan di Kelurahan Paria	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Skematik Permasalahan	10
2.1. Struktur Tukar Menukar Terbatas	19
2.2. Struktur Tukar Menukar dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal	20
2.3. Struktur Meluas Tak Kontinyu dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal	21
3.1. Proses Olah Data dan Analisis Data	48

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini penting dilakukan dan perbedaannya dengan penelitian lainnya yang pernah dilakukan. Dari latar belakang mengenai pentingnya masalah tersebut kemudian dipakai sebagai landasan untuk merumuskan masalah-masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Latar Belakang Masalah

Perkawinan adat merupakan salah satu bentuk budaya lokal yang tumbuh dalam masyarakat. Budaya lokal ini mempunyai perbedaan dan keunikan tersendiri pada komunitas masyarakat tertentu. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat pada penggunaan simbol-simbol atau budaya material maupun aturan-aturan yang berlaku dan sistem kekerabatan yang berlaku. Simbol-simbol dan aturan yang ada mempunyai nilai tersendiri dan merupakan suatu penegasan status bagi individu serta mempunyai makna tersendiri bagi komunitas masyarakat adat tersebut

Berkaitan hal tersebut di atas salah satu perkawinan dengan ciri khas tertentu adalah adat suku Bugis di Paria, masyarakat ini berbagai simbol-simbol atau budaya material yang digunakan dalam prosesi perkawinan adat, aturan-aturan dalam sistem kekerabatannya serta sistem perkawinan yang dianggap ideal. Penggunaan simbol-simbol dan aturan yang berlaku terkadang diluar batas kemampuan individu.

Simbol-simbol atau budaya material yang harus disediakan dalam prosesi perkawinan adatnya antara lain *dui mendre* (uang naik yang diserahkan kepada pihak perempuan) antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- (tiga juta sampai lima belas juta rupiah), kerbau, kebun atau sawah, seperangkat stel mas (cincin, anting-anting, kalung dan gelang), *cerek ulaweng* (cerek dari emas), *lamming* (alat perhiasan tempat bersanding mempelai), *bosara* (tempat kue), *indok botting* dan *anak botting* (orang yang mengapit mempelai pada waktu bersanding) dan berbagai simbol lainnya yang harus dipenuhi.

Aturan-aturan yang berlaku antara lain adalah pihak laki-laki melamar perempuan dengan stratifikasi sosial yang sama, undangan harus diedarkan oleh empat orang (dua laki-laki dan dua perempuan), yang harus melamar adalah pihak laki-laki dan berbagai aturan-aturan lainnya yang harus dipenuhi dalam prosesi perkawinan adatnya.

Mattulada telah mengkaji proses perkawinan secara adat Bugis dan Makassar sebagai berikut : (1) *Mampuce-puce* (akkusising dalam bahasa Makassar), ialah kunjungan dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si gadis untuk memeriksa kemungkinan apakah peminangan dapat dilakukan. Kalau kemudian itu tampak ada, maka diadakan (2) *Massuro* (assuro dalam bahasa Makassar), yang merupakan kunjungan dari utusan pihak keluarga laki-laki pada keluarga si gadis untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis sunreng atau mas kawinnya, belanja atau belanja perkawinan, penyelenggaraan pestanya dan sebagainya. Setelah tercapai kesepakatan maka masing-masing keluarga melakukan (3) *Madduppa*

(ammuntuli dalam bahasa Makassar) ialah pemberian tahu kepada semua kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan datang (Koentjaraningrat, 1997 : 274).

Fenomena di atas bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang dibukukan Hadikusuma di beberapa komunitas masyarakat di Indonesia, mengemukakan perbedaan keunikan terhadap simbol-simbol serta aturan yang berlaku. Pada prosesi pelaksanaan perkawinan adat di berbagai daerah, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. **Perkawinan adat Batak**, di dalam lingkungan masyarakat adat Batak dalam rangka perkawinan berlaku "*adat nasogok*" yaitu tata cara perkawinan antara pria dan wanita tanpa melalui acara peminangan sesudah terjadi "*mangalua*", dimana si wanita sudah berada ditangan kerabat pria, dan "*adat na gok*", yaitu tata cara perkawinan dengan acara peminangan yang dilakukan oleh orang tua-tua dari kerabat pria disertai upacara "*terpasu-pasu*" yang dilakukan di gereja.
2. **Perkawinan adat Minangkabau**, masyarakat adat minang tidak mengenal adat "*belarian*" untuk melakukan perkawinan. Jika bujang gadis sudah berkenalan atau orang tua berkeinginan gadis atau bujang dalam rangka pencarian jodoh bagi anak kemenakannya, maka penjajakan dan peminangan dilakukan oleh orang tua. Peminangan dilakukan oleh mamak dari pihak wanita atau mamak dari pihak pria. dan siapa yang datang akan lebih berperan menanggung biaya perkawinan. Orang minang mengatakan "*sia datang sia kenai*" dan apabila terjadi pertunangan maka diperlukan adanya tanda ikatan sebagaimana dikatakan "*batali bulieh di irik basampuak bulieh dijinjing*".

3. **Perkawinan adat Palembang**, sebagaimana di daerah lain dalam lingkungan masyarakat adat Pasundan (Jawa Barat) acara dan upacara perkawinan dimulai dengan cara "*neundeung omon*", yaitu perundingan antara pihak pria dan pihak wanita berjalan lancar dan saling menyetujui untuk melaksanakan perkawinan anak-anak mereka, maka pihak pria akan menyampaikan selanjutnya "*penyangang*", yaitu tanda pengikat pertunangan pria dan wanita bersangkutan (Hadikusuma, 1994 : 147).

A.B Hudson meneliti perkawinan adat di Padju Empat terletak di propinsi Kalimantan Tengah, bahwa perkawinan bisa terjadi melalui dua cara, yakni diatur oleh orang tua dan kawin lari. Perkawinan yang diatur oleh orang tua adalah cara tradisional, akan tetapi kawin lari sekarang lebih biasa dari 258 perkawinan, baik pada masa sekarang maupun masa lalu, yang pernah dilaksanakan oleh penduduk. Telang dan Muratewe, 55 persen terjadi karena diatur dan 45 persen karena kawin lari (T.O. Ihromi, 1994 : 147).

Azami dkk. telah melakukan penelitian di Sumatra Barat dengan tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat-adat upacara perkawinan akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang berhubungan dengan perkawinan (Azami dkk. 1997 : 1).

Dalam jurnal penelitian Meekers telah menganjurkan suatu pendekatan metodologi yang dikombinasikan, yakni "*Combining Ethnographic and Survey Methods*" dalam mengkaji peradapan kultural dalam perilaku sosial, terutama dalam pernikahan atau keluarga (Meekers, 1994 : 33).

Penelitian lain yang melihat keterkaitan antara sistem kekerabatan yang mempengaruhi norma-norma perkawinan. Levi-Strauss melakukan penelitian etnografi pada enam suku bangsa termasuk suku- bangsa yang telah didiskripsikan Malinowski, yaitu suku bangsa Trobrian. Obyek penelitian lainnya adalah suku bangsa Siuai, Dobu, Kubutu, Cherkess dan Tonga. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa terdapat hubungan positif dan negatif antara sistem matrilineal dengan sistem patrilineal. Mattulada juga telah melihat sistem kekerabatan masyarakat Bugis Makassar menetapkan sebagai perkawinan yang ideal :

1. Perkawinan yang disebut *assilang marola* (atau *passialleang baji'na* dalam bahasa Makassar) ialah antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu.
2. Perkawinan yang disebut *assialanna memeng* (atau *passialanna* dalam bahasa Makassar), ialah perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu.
3. Perkawinan antara *ripaddeppe mabelae* (atau *nipakambani bellaya* dalam bahasa Makassar), ialah perkawinan antara sepupu sederajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun ibu (Koentjaraningrat, 1997 : 274).

Dari penelitian yang telah disebutkan pada dasarnya sudah banyak yang mengalami perubahan baik simbol-simbol maupun aturan-aturan yang berlaku. Perubahan ini disebabkan oleh imbas “modernisasi”. Stepanus Djuweng mengemukakan, bahwa modernisasi disamping telah membawa kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya, juga telah membawa akibat-akibat negatif yang tak terelakkan. Akibat terdesaknya masyarakat asli (indigenous people) kepinggiran termasuk kebudayaan mereka (Djuweng dkk. 1996 : V). Dengan masuknya modernisasi, maka tingkat pendidikan dan pengalaman masyarakat semakin mempengaruhi perubahan budaya lokal.

Beberapa hasil penelitian yang mengemukakan tentang perubahan makna-makna simbol-simbol dan aturan yang berlaku pada prosesi perkawinan adat. Akibat tingkat pendidikan dan pengalaman masyarakat. Dalam tesis Dwiyaniti Hanandini telah melihat perubahan fungsi “**makna mamak**” dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau, bahwa pengalaman pergaulan dari berbagai manusia dengan latar belakang budaya yang bermacam-macam serta latar belakang pendidikan yang diperolehnya menjadikan pandangan seseorang mengalami perubahan (Hanandini, 1996 : 89-90).

M. Mazharus dan Mamun Mahmud melihat fenomena seperti di atas, bahwa perkawinan di Banglades mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, wilayah mereka bermukim dan tempat tinggal (desa/kota) (Mazharus dan Mamun, 1997).

Dari berbagai hasil penelitian diatas penulis berkesimpulan bahwa :

Pertama, penelitian-penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang simbol-simbol atau budaya material dan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku serta perubahannya, aspek lain yang belum dikaji secara spesifik adalah keterkaitan sistem perkawinan dengan sistem kekerabatan, aspek makna dari simbol-simbol atau budaya material dan aturan-aturan yang berlaku, serta perubahannya, maka penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut. **Kedua**, penelitian mendalam yang mengambil tema perkawinan adat Bugis di Paria perlu dilakukan karena belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu penulis menilai penting untuk menganalisis lebih lanjut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil pengamatan lapangan penelitian-penelitian terdahulu di beberapa daerah, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keterkaitan sistem perkawinan adat dengan sistem kekerabatan suku Bugis di Paria ?
2. Apakah makna simbol-simbol budaya yang digunakan dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria ?
3. Aturan-aturan apakah yang ada dalam sistem perkawinan adat suku Bugis di Paria ?
4. Apakah terjadi perubahan dalam sistem perkawinan adat Bugis di Paria ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan tujuannya sebagai berikut :

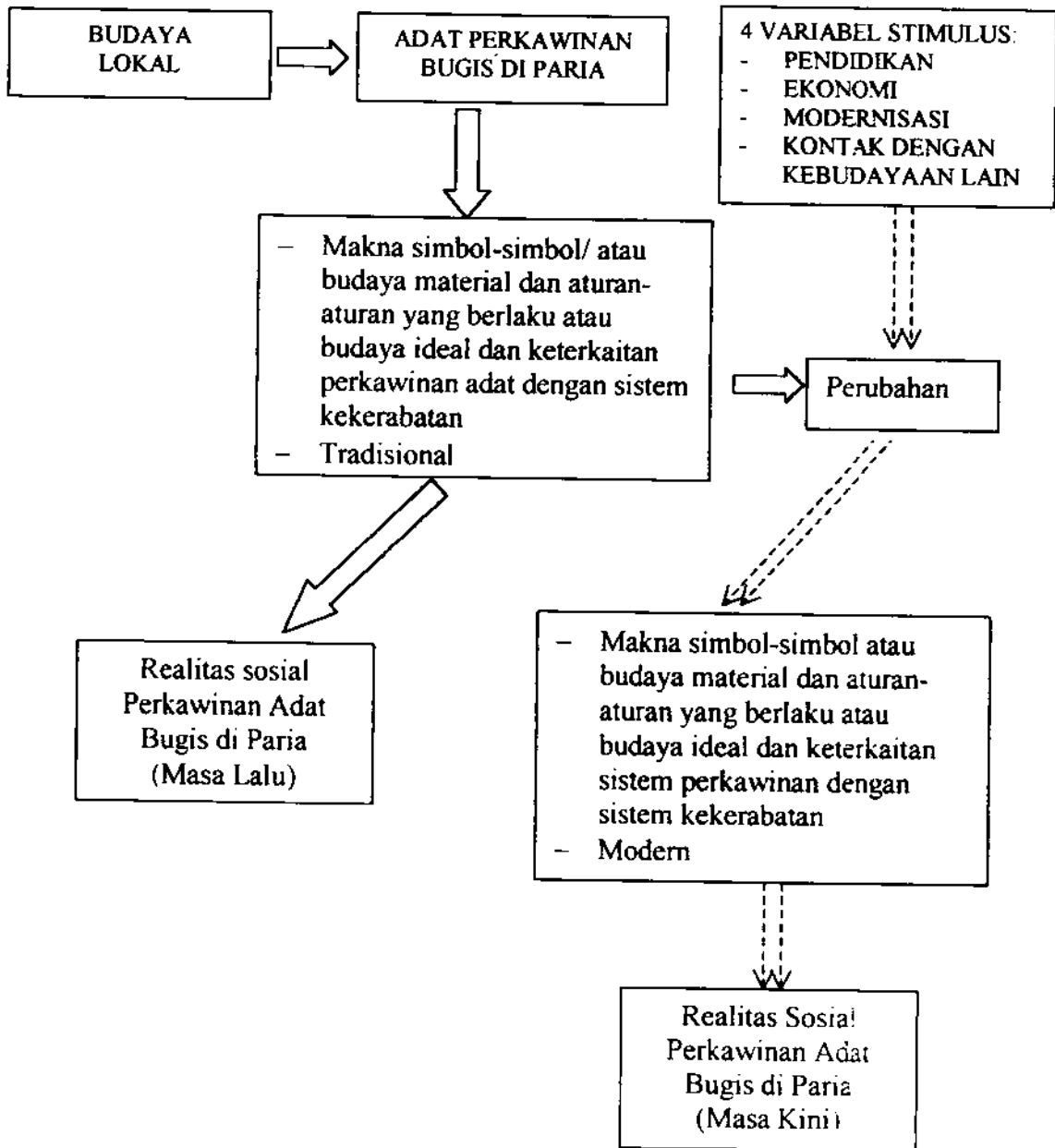
1. Untuk mendeskripsikan dan memahami keterkaitan sistem perkawinan dengan sistem perkawinan dan sistem kekerabatan dan makna simbol-simbol budaya material dan budaya ideal yang dipergunakan dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami penyebab perubahan yang terjadi dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria.

Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi ilmu, yaitu sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang studi ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam bidang kajian sistem kekerabatan, sistem perkawinan, makna dan prosesi perkawinan adat.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang sejenis di masa datang.

3. Bagi peneliti sendiri, dapat digunakan sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut sebagai pengabdian dan pengembang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial di masa-masa yang akan datang.

SKEMATIK PERMASALAHAN**Gambar 1.1 Skematik Permasalahan**

Keterangan :

—————> Sebelum terjadi modernisasi

- - - - -> Terjadi modernisasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk membahas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian serta hasil-hasil penelitian lain. Berdasarkan atas tinjauan pustaka tersebut maka disusun kerangka teori yang digunakan dalam menjelaskan penelitian.

Kebudayaan / Adat

Kebudayaan mempunyai tiga wujud, ialah : (1) **Wujud Ideal**, (2) **Wujud Kelakuan**, (3) **Wujud Fisik**. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan, secara lengkap wujud itu dapat kita disebut **adat tata kelakuan**, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan, suatu contoh dari adat ialah aturan sopan santun untuk memberi uang kepada seseorang yang mengadakan pesta kondangan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat ialah : (1) tingkat nilai budaya (2) tingkat norma-norma (3) tingkat hukum (4) tingkat aturan khusus (Koentjaraningrat, 1985:31).

Menurut Wignjodipoero dalam buku pengantar asas-asas hukum adat disebutkan bahwa adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Wignjodipoero. 1992 : 13).

Adat merupakan bagian dari kebudayaan, untuk lebih jelasnya akan diutarakan beberapa pendapat tentang definisi atau konsep tentang kebudayaan sebagai berikut.

Setelah Koentjaraningrat menganalisis 179 definisi dari kebudayaan yang dirumuskan maka konsep kebudayaan adalah : "Keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan budi dan karyanya itu " (Koentjaraningrat, 1987 : 8).

Ralp Linton menjelaskan bagaimana definisi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari berada dari definisi seseorang ahli antropologi :

"Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dimanapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih ditinggikan. Dalam arti cara hidup masyarakat itu kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan main piano atau membaca karya sastra terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial, kegiatan main piano seperti itu, merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini mencakup kegiatan-kegiatan duniawi seperti mencuci piring atau menyetir mobil dan untuk tujuan untuk mempelajari kebudayaan, hal ini sama derajatnya dengan " hal-hal yang lebih luas dalam kehidupan". Karena itu, bagi seorang ahli ilmu sosial tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan, bagaimana sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah makhluk yang berbudaya dalam arti mengambil bagian dalam suatu kebudayaan" (T.O. Ithomi, 1994 : 18).

Sedangkan Clifford Geertz menegaskan perbedaan antara kultur dan sistem sosial, dimana memperlakukan sistem sosial berarti memperlakukan kultur sebagai sistem makna dan simbol yang terorganisasi yang menjadi dasar interaksi sosial, dan memandang sistem sosial sebagai pola-pola interaksi sosial itu sendiri.

Geertz mengatakan bahwa :

“Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide their action, social structure is the from that action tekkes, the actually axisting network of social relations. Culture and social structure are then but differrent abstractions from the same phenomenom.” (“Kebudayaan adalah susunan makna dimana manusia menginterpretasikan pengalamannya dan mengendalikan tindakannya, struktur sosial adalah bentuk tindakan, jaringan kerja hubungan sosial yang ada secara sosial yang ada secara aktual. Kultur dan struktur sosial adalah abstraksi yang berbeda dari fenomena yang sama.”) (Geertz, 1986 : XIII).

Sebuah definisi yang tipikal, yaitu yang diusulkan oleh Marvin Harris :

“Konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok masyarakat dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti adat (custom) atau cara hidup masyarakat “ (Harris, 1968 :16).

Spradley mengkombinasikan pandangan Malinowski dan Redcliffe-Brown, tentang tujuan dari sebuah etnografi, dari pandangan ini mereka berpendapat pada masa ini budaya didefinisikan *The way of life* suatu masyarakat (Spradley, 1997:5).

Wujud Kebudayaan

J. J. Honigmann yang dalam buku antropologinya yang berjudul *The Word of Man* (1959 : 11 – 12), membedakan adanya tiga gejala kebudayaan yakni (1) *ideas*, (2) *activities*, (3) *artifacts*. Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan itu adalah tiga wujud , yaitu :

1. Wujud kebudayaan adalah sebagai suatu komplek dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud ideal dari kebudayaan sifatnya abstrak tak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada dialam pikiran

warga masyarakat dimana kebudayaan bersangkutan itu hidup. Kalau warga masyarakat menyatakan gagasan dan karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat bersangkutan.

Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberikan jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan-gagasan itu tidak berada lepas dari suatu yang lain, melainkan selalu berkaitan, menjadi suatu sistem. Para ahli antropolog dan sosiolog menyebut sistem ini sistem budaya, atau *Cultural System*. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu “adat”, atau “adat istiadat”, untuk bentuk jamaknya.

2. **Wujud kedua** dari kebudayaan yang disebut sistem sosial atau **social system**, merupakan tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berintegrasi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lain dari waktu ke waktu, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan **adat dan tata kelakuan**. Sebagai rangkaian aktivitas dalam masyarakat sistem sosial ini dapat bersifat kongkrit.
3. **Wujud ketiga** dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, wujud ini merupakan keseluruhan hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat.

Ketiga wujud kebudayaan di atas, dalam kehidupan masyarakat tidak dapat terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide,

maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiah sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga berpikirnya (Koentjaraningrat, 1985 : 187-188).

Pada konteks di atas telah dijelaskan bahwa ideal dari kebudayaan secara lengkap dapat disebut **"adat tata kelakuan"**, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Menurut Koentjaraningrat, adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, ialah :

Tingkat pertama, adalah lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini adalah ide-ide yang menkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kebudayaan masyarakat. Konsep-konsep serupa itu biasanya luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, atau justru karena kabur dan tidak rasional, biasanya berakar dalam bagian emosional diri dalam jiwa manusia. Tingkat ini bisa kita sebut sistem nilai budaya. Jumlah nilai-nilai budaya tingkat pertama dalam suatu kebudayaan biasanya tidak banyak.

Tingkat adat yang kedua, dan lebih kongret adalah sistem norma. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

Tingkat adat yang ketiga, dan yang lebih kongkrit lagi adalah sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis).

Tingkat adat yang keempat. adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1987 : 11-12).

Sistem nilai budaya yang merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari pikiran warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka aggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang member arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat.

Menurut seorang ahli antropologi terkenal, C. Kluckhohn tiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan itu mengenai lima masalah dasar dalam kehidupan manusia yang dapat menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya adalah :

1. Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia (selanjutnya disingkat MH), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakekatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan, dan karena itu harus dihindari.
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia (selanjutnya disingkat MK), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang

bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup.

3. Masalah mengenai hakekat dan kedudukan manusia di ruang waktu (disingkat MW), ada kebudayaan yang memandang penting di kehidupan manusia itu pada masa yang lampau.
4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (disingkat MA), memandang alam sebagai suatu hal begitu dahsyat sehingga manusia pada hakekatnya hanya dapat bersifat menyerah saja tanpa dapat berusaha banyak.
5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (selanjutnya disingkat MM), pada kebudayaan-kebudayaan yang sangat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya manusia (Koentjaraningrat, 1985 : 191).

Sistem Kekerabatan

Terbentuknya sistem kekerabatan diawali dengan timbulnya kesadaran umat manusia untuk hidup dalam suatu keluarga inti. J.J. Bachoffen mengemukakan teori evolusi keluarga dalam bukunya *Das Mutterrecht* (1861), bahwa diseluruh dunia keluarga manusia berkembang melalui empat tingkat evolusi :

1. *Promiskuitas*, dalam zaman yang telah lampau dimana manusia hidup serupa-sekawan binatang berkelompok, dan laki-laki serta wanita berhubungan dengan bebas serta melahirkan keturunannya tanpa ikatan, kelompok keluarga sebagai inti belum ada pada waktu itu. Keadaan ini dianggap merupakan tingkat pertama dalam proses perkembangan masyarakat manusia.
2. *Matriachate*, lambat laun manusia akan sadar akan hubungan antara si ibu dengan anak-anaknya sebagai suatu kelompok keluarga inti dalam masyarakat, karena anak-anak hanya mengenal ibunya, tetapi tidak mengenal ayahnya. Dalam kelompok kelompok keluarga inti serupa itu, ibulah yang menjadi kepala keluarga. Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari, dan dengan

demikian timbul adat *exogami*. Kelompok-kelompok keluarga ibu tadi itu menjadi luas karena garis keturunan untuk selanjutnya diperhitungkan untuk garis ibu.

3. *Patriarchate*, tingkat ini terjadi karena para pria tidak puas dengan keadaan ini, lalu mengambil calon-calon istri mereka dari kelompok-kelompok lain dan membawa gadis-gadis itu ke kelompok mereka sendiri. Kejadian ini menimbulkan timbulnya secara lambat laun kelompok-kelompok keluarga dengan ayah sebagai kepala keluarga.
4. *Parental*, tingkat terakhir terjadi waktu perkawinan diluar kelompok, yaitu eksogami, berubah menjadi endogami karena berbagai sebab. Endogami atau perkawinan didalam batas-batas kelompok menyebabkan bahwa anak-anak sekarang senantiasa berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu (Koentjaraningrat, 1990 : 38-39).

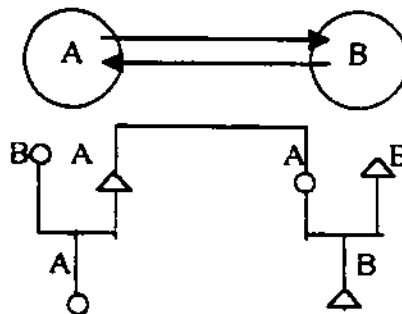
Dengan dasar teori kekeluargaan Bachoffen, maka timbul kesadaran umat manusia membentuk suatu pranata perkawinan yang dapat mengatur tukar menukar kelompok yang dapat dikawini. Dengan dasar ini pula sehingga timbul pelarangan mengawini saudara sekandung. Hal ini dikemukakan Levi-Strauss dalam bukunya *Les Structures Elementaires de la Parante* (1994), dengan konsepsinya bahwa pranata perkawinan pada dasarnya merupakan tukar menukar antara kelompok adalah akibat dari konsepsinya mengenai asal mula pantangan *incest*, yaitu pantangan nikah antara saudara sekandung, yang dalam alam mahluk merupakan gejala yang hanya memang ada pada mahluk manusia, untuk menghindari *incest*, maka pihak

pria tidak mengambil wanita saudaranya sendiri yang dikawini (Octavio Paz, 1997 : XX).

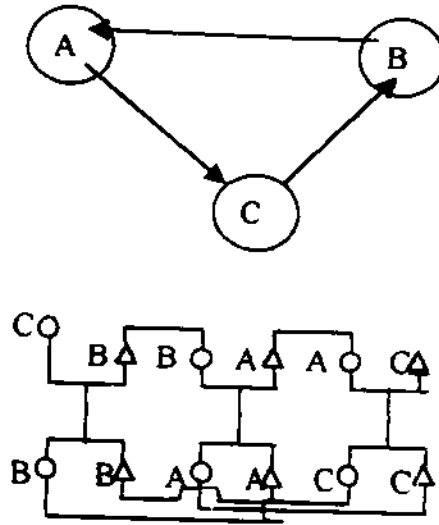
Teori umum yang dikemukakan Levi-Strauss mengenai sistem kekerabatan berdasarkan konsep tukar menukar wanita dimulai dengan membedakan adanya dua golongan sistem kekerabatan dengan dua kategori struktur, yaitu :

1. Struktur *elementaires*, atau struktur-struktur elementer dengan aturan-aturan yang tegas, yang mengakibatkan bahwa para warga kelompok kekerabatan yang bersangkutan mengetahui dengan gadis atau wanita mana, dan dari kelompok mana, mereka dapat menikah.
2. Struktur *complexes*, atau struktur-struktur kompleks, dengan aturan-aturan yang hanya membatasi kelompok kekerabatan sendiri, tetapi tidak mempunyai aturan-aturan yang hanya tegas yang menentukan dengan gadis atau wanita mana diluar kelompok sendiri itu sekarang boleh menikah (Koentjaraningrat, 1990 : XX).

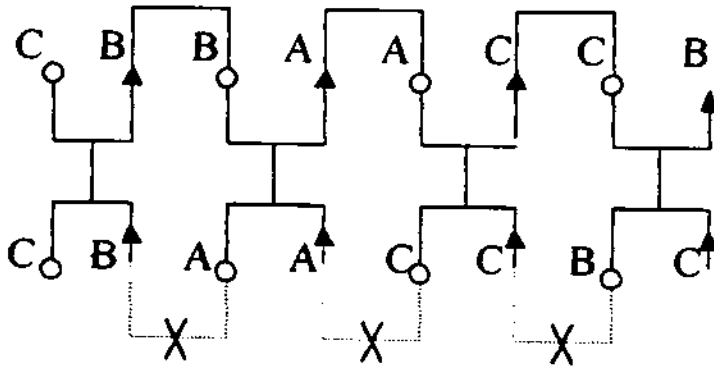
Struktur elementer sebagai akibat dari dua macam cara tukar menukar wanita, yaitu (1) Struktur “tukar menukar terbatas” (*l'échange restraint*) dan (2) Struktur “tukar menukar meluas” (*l'échange generalise*) menurut teori dapat dilihat pada bagan 2 dan 3 dan 4.



Gambar 2.1 Struktur Tukar Menukar Terbatas



Gambar 2.2 Struktur Tukar Menukar Kontinu Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal



Gambar 2.3 Struktur Meluas Tak kontinu Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan lebih banyak ditentukan oleh perkawinan daerah masing-masing, termasuk pengaruh agama. Masyarakat akan menganut sistem matrilineal mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda dengan sistem kekerabatan komunitas masyarakat tertentu. Sehingga berbagai sistem kekerabatan ada pada

suku bangsa yang ada di dunia ini. Morgan mendapatkan suatu cara untuk mengupas semua sistem kekerabatan dari semua suku bangsa di dunia yang jumlahnya beribu-ribu itu yang masing-masing berbeda bentuknya. Cara itu didasarkan pada gejala kesejajaran yang sering kali ada diantara sistem kekerabatan (*system of kinship terminology*) dan sistem kekerabatan (*kinship system*). Morgan menemukan istilah kekerabatan dalam bahasa *Iroquois* yang berbeda dengan istilah kekerabatan dalam bahasa Inggris. Istilah *Hanih* dalam bahasa *Iroquois* lain dengan istilah *Father* dalam bahasa Inggris. *Hanih* menunjukkan bahwa individu, yaitu ayah, semua saudara pria ayah, dan semua saudara pria ibu, sebaliknya *Father* hanya menunjukkan seorang individu saja, yaitu ayah sebagai kesimpulannya, bahwa yang mempengaruhi sistem kekerabatan karena sikap orang, dan mungkin juga hak-hak dan kewajiban orang terhadap ayah dan saudara ayah ibu sama (Koentjaraningrat, 1992 : 139-140). Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4):



Gambar 2.4 Perbedaan Arti Istilah *Hanih* dan *Father*

Terbentuknya suatu sistem kekerabatan dalam suatu suku bangsa banyak yang mempengaruhi, hal ini dijelaskan oleh Ihromi bahwa :

“Walaupun sistem istilah-istilah kekerabatan yang mencerminkan hubungan biologis tidak dapat dielakkan, sebetulnya susah atau malahan mustahil mempergunakannya untuk memperinci semua hal tentang keturunan, ikatan-ikatan perkawinan, generasi, umur, dan sebagainya. Setiap suku bangsa beranggapan bahwa sistemnya sendirilah yang jelas, logis serta sederhana, betapapun sulitnya bagi orang luar untuk mengikutinya” (Ibromi, 1994 : 92).

Sistem kekerabatan masyarakat Bugis dipengaruhi oleh adat dan agama, Mattulada dalam melihat sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Makassar menetapkan sebagai perkawinan yang ideal ;

1. Perkawinan yang disebut *assilang marola* (atau *passialleang baji'na* dalam bahasa Makassar) ialah antara saudara sepupu sederajat kesatu baik dari pihak ayah maupun ibu.
2. Perkawinan yang disebut *assialanna memeng* (atau *passialanna* dalam bahasa makassar), ialah perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun ibu.
3. Perkawinan antara *ripaddeppe mabelae* (atau *nipakambani bellaya* dalam bahasa Makassar) ialah perkawinan antara sepupu sederajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun ibu.

Perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut, walaupun dianggap ideal, bukan suatu hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda dapat saja kawin dengan gadis-gadis yang bukan saudara-saudara sepupunya. Adapun perkawinan-perkawinan yang dilarang karena dianggap sumbang (*salimara*) adalah :

1. Perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah
2. Antara saudara-saudara sekandung
3. Antara menantu dengan mertua

4. Antara paman dengan bibi
5. Antara kakek dan nenek dengan cucu (Koentjaraningrat, 1997 : 274).

Secara khusus sistem kekerabatan pada suku bangsa Bugis disebut *Asseajingeng*. Penghubung antara seorang anak terdapat sanak kandung dari bapak adalah sama dengan perhubungan terhadap ibunya, garis keturunan berdasarkan kedua orang tua (bilateral). Semua orang yang diawali oleh istilah-istilah kekerabatan disebut *Seajing*, petali temalian antara satu dengan lainnya disebut *asseanjingang* terdiri dari :

a. *Reppek Mareppek* ialah :

1. *Lakkei*(suami)
2. *Inang – Riale*(Ibu kandung Ego)
3. *Amang – Riale*(Ayah Kandung Ego)
4. *Kajau – Riale*(Ibu kandung ayah/ibu Ego)
5. *Took – Riale*(Ayah kandung dari ayah/ibu Ego)
6. *Anak dara – Riale*(Saudara-saudara perempuan sekandung Ego)
7. *Padaoerane – Riale*(Saudara-saudara laki-laki sekandung Ego)
8. *Ana – Riale*(Anak kandung dari Ego)
9. *Amure – Riale*(Anak-anak kandung dari saudara-saudara laki-laki/perempuan Ego)
10. *Eppo ~ Riale*(Anak-anak kandung dari anak Ego)
11. *Amaure – Riale*(Saudara-saudara kandung laki-laki ayah/ ibu Ego)

12. *Inaure – Riale* (Saudara-saudara kandung perempuan/ ayah Ego)

b. *Siteppang mareppe* ialah :

1. *Baine atau indo'na*.....(Istri Ego)
2. *Matua – Riale*.....(Saudara kandung laki-laki istriEgo)
3. *Ipak anak urane*.....(Saudara perempuan kandung istri Ego)
4. *Ipak padakkunrai*.....(Saudara kandung perempuan istri Ego)
5. *Baiseng*.....(Ibu/ Ayah kandung dari istri/ suami anak-anak kandung Ego)
6. *Manettu – Riale*.....(Istri/ suami anak-anak kandung Ego)

Mereka inilah keluarga (*Affinity*) yang dianggap *siteppang* atau *Sumpung Lolo Mareppek* (Keluarga Inti) dari *Ego Reppe Mareppek* bersama-sama dengan *Siteppang Sompung Lolo* disebut *Sianjingriale* (Kerabat Inti). Mereka inilah yang menjadi *Tumasirik* apabila terjadi seorang keluarga perempuan *liraliang* (dibawa kawin lari) oleh orang. dalam musyawarah keluarga untuk urusan perkawinan, pusaka-memusakai, solidaritas keluarga yang disebut *siasikki-siappessei*, *siajing mareppek* ialah yang paling tersangkut (Pabittei, 1995 : 56-57).

Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita, sebagai upaya melangsungkan keturunan (regenerasi). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebut bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses perkawinan dilakukan berdasarkan aturan-aturan atau kepercayaan yang berlaku pada daerah tertentu baru dianggap sah bila dilakukan aturan tersebut, secara tegas dicantumkan pada pasal 2 Undang-undang RI Nomor I Tahun 1974. "Perkawinan adalah sah, apabila bila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu" (Undang-Undang Perkawinan, 1997 : 7).

Perkawinan adat antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Budha, dan lain-lain, begitu pula antara masyarakat desa dengan kota.

Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda antara lain :

1. **Bergerlijk Wetboek, Stuatsbland 1847 Nomor 23.**
2. **Regeling of De Gemengde Huwelijken, Stuatsblad 1998 Nomor 158.**
3. **Huwelijks Ordonnantie Cristen Inlanders, Stuatsbland 1933 Nomor 74.**
4. **Huwelijksordonnantie, Statsbland 1929 Nomor 348 (Peraturan Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi orang-orang Islam di Jawa dan Madura).**
5. **Vorstenlandse Huwelijksordonnantie Stuatsbland 1941 Nomor 320 (Peraturan Tentang Perkawinan dan Talak/Perceraian bagi orang-orang Islam di Gubernemen Surakarta Yogyakarta).**
6. **Huwelijksordonnantie Builengewesten, Stoatsbland 1932 Nomor 482 (Prawirohamidjojo, 1994 : 1).**

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karena tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum adat perkawinannya. Menurut teori telah diketahui ada susunan masyarakat adat yang *geneologis patrilineal*, *geneologis matrilineal*, *geneologis parental*, dan *geneologis teritorial*. Namun demikian tidak berarti bahwa pada setiap masyarakat adat yang menganut garis keturunan kebapakan akan berlaku hukum adat yang sama, ada kemungkinan bersamaan.

Dalam penelitian akan melihat tentang perkawinan adat. Azami dkk. mendefinisikan tentang perkawinan adat adalah :

“Dimaksudkan dengan perkawinan adat ialah segala adat kebiasaan dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah yang timbul sebelum perkawinan kita sebut adat sebelum perkawinan, sedangkan sesudah perkawinan disebut adat sesudah perkawinan. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin dan cara memilih jodoh. Sedangkan adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dan keluarga istri atau suami (Azami, dkk, 1994 : 1).

Perkawinan adat akan dilaksanakan upacara atau prosesi perkawinan.

Upacara atau prosesi perkawinan dimaksudkan adalah :

Kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut upacara atau prosesi sebelum perkawinan dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut upacara/prosesi pelaksanaan perkawinan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut upacara atau prosesi sesudah perkawinan. Setiap

prosesi atau upacara baik sebelum maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur, tujuan, waktu, alat-alat pelaksanaan dan jalannya upacara (Pabittei, 1995 : 4).

Kerangka Teori

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai kerangka teori yang dipilih dan digunakan sebagai dasar teoritis untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

Kerangka teori yang dipilih adalah :

Teori Interaksionisme Simbolik

Pengetahuan kebudayaan lebih dari suatu kumpulan simbol, baik istilah-istilah rakyat maupun jenis-jenis simbol yang lain. Semua simbol baik kata-kata yang terucap seperti flop, sebuah objek seperti sebuah bendera, suatu gerak tubuh seperti melambaikan tangan, merupakan bagian-bagian suatu sistem simbol (Spradley, 1997 : 123).

Konsep kebudayaan suatu sistem simbol yang mempunyai makna banyak mempunyai persamaan dengan interaksionisme simbolik, sebuah teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dan kaitannya dengan makna interaksionisme simbolik berakar dari karya para ahli sosiologi seperti Cooley, Mead dan Thomas. Blumer mengidentifikasikan tiga premis sebagai landasan teori ini :

1. **Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna-makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka.**
2. **Makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia.**

3. Makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya (Ian Craib, 1992 : 112).

Premis yang dikemukakan oleh Blumer mengandung sejumlah *“root image”*

atau ide-ide dasar, yang dapat diringkas sebagai berikut :

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi non simbolis mencakup “penafsiran tindakan”.
3. Objek-objek yang mempunyai makna intriksik, maka lebih merupakan produk interaksi-simbolis. Objek-objek diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang luas : (a) objek fisik, (b) objek sosial, dan (c) objek abstrak.
4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai objek, lahir disaat proses interaksi simbolis.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Menurut Blumer, pada dasarnya, tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas beberapa hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut.
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai, “Organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia”, menurut Blumer, sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai “kebudayaan” dan “aturan sosial” (Margaret M. Poloma, 1994 : 267-269).

Tindakan-tindakan bersama yang mampu membentuk struktur atau lembaga itu hanya mungkin disebabkan oleh interaksi simbolis, yang dalam menyampaikan makna menggunakan isyarat dan bahasa. Melalui simbol-simbol yang berarti, simbol-simbol yang telah memiliki makna, obyek-obyek yang dibatasi dan

ditafsirkan. Melalui interaksi makna-makna tersebut disampaikan pada pihak lain (Margaret M. Poloma, 1994 : 277).

Menurut Spradley bahwa untuk tujuan penelitian etnografis, akan lebih bermanfaat untuk melihat sistem makna budaya dari perspektif teori relasional tentang makna. Cara pandang seperti ini akan mengubah perhatian kita dari sesuatu yang ditunjukkan dan dikonotasikan oleh simbol menjadi perhatian ke arah simbol yang merupakan suatu kebudayaan. Teori relasional tentang makna didasarkan pada premis berikut, “Makna simbol apapun merupakan hubungan simbol itu dengan simbol lain” (Spradley, 1997 : 123).

Spradley meringkas beberapa penegasan teori relasional tentang makna :

1. **Sistem makna budaya disandikan dalam simbol-simbol.**
2. **Bahasa merupakan sistem simbol utama yang menyandikan makna budaya dalam setiap masyarakat. Bahasa dapat digunakan untuk membicarakan semua simbol lain yang diandalkan.**
3. **Makna simbol apapun merupakan hubungan dari simbol itu dengan simbol lain dalam suatu budaya tertentu (Spradley, 1997 : 125-126).**

Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol itu sendiri meliputi apapun yang kita rasakan atau kita alami. Semua rujukan adalah benda yang menjadi rujukan simbol. Rujukan dapat berupa apapun yang dapat dipikirkan dalam pengalaman manusia. Kita dapat menunjuk pohon atau barang sebagai simbol, tetapi kita juga dapat menunjuk mahluk-mahluk mistis yang belum pernah dialami sebelumnya, tempat-tempat yang tidak ada, orang-orang yang hidup masa yang akan datang, dan selalu merujuk pada hal-hal biasa yang ada

disekitar kita. Kita bahkan dapat merujuk pada simbol-simbol lain, dan menjadikan rujukan dalam rantai makna yang tidak ada hentinya.

Simbol yang kita bahas dalam penelitian ini adalah “istilah-istilah penduduk asli (lokal) baik budaya material maupun budaya ideal untuk mendeskripsikan makna perkawinan adatnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Spradley mengutip pendapat Radcliffe-Brown dan Malinowski bahwa :

“Dalam etnografis modern, bentuk sosial dan budaya masyarakat dibangun dan dideskripsikan melalui analisis dan nalar sang peneliti. Struktur sosial dan budaya yang dideskripsikan adalah struktur sosial dan budaya masyarakat tersebut menurut interpretasi sang peneliti. Sedangkan dalam etnografi baru, bentuk tersebut dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran (mind anggota masyarakat tersebut, dan tugas sang peneliti mengoreknya keluar dari dalam pikiran mereka) (Spradley, 1997 : XIX).

Teori Strukturalisme

Radcliffe-Brown mengemukakan bahwa struktur adalah tatanan fakta : suatu yang diletakkan orang-orang ketika mengamati masyarakat tertentu, sedangkan Levi-Strauss memandang struktur bukan semata-mata fenomena yang bersumber pada asosiasi manusia melainkan “suatu sistem yang tunduk dan ditentukan oleh kohesi internal”. Brown menambahkan bahwa struktur adalah “cara yang sering digunakan individu untuk menyosok dan mengorganisasikan dirinya sendiri dalam suatu masyarakat”. Oleh karenanya setiap struktur bersifat khas dan tidak dapat diterjemahkan kedalam struktur lain-lain (Octavio Paz, 1997 : 189).

Struktur yang dimaksud Brown adalah "*Social Structure*" dengan pandangan bahwa :

1. Suatu masyarakat yang hidup merupakan suatu sistem sosial yang mempunyai struktur.
2. Suatu struktur sosial merupakan total dari jaringan hubungan antara individu-individu, antara person-person dan kelompok-kelompok person, antara person atau kelompok atau beberapa pihak yang berbeda-beda. Dimaksud sebagai individu adalah manusia sebagai organisme dan person adalah orang yang mempunyai kedudukan dalam struktur sosial.
3. Bentuk dari struktur sosial adalah tetap dan kalau berubah, proses itu biasanya berjalan lambat, sedangkan realitas struktur sosial atau wujud dari struktur sosial yaitu person-person atau kelompok-kelompok yang ada di dalamnya selalu berubah dan berganti. Tentu saja ada beberapa peristiwa yang dapat juga membuat bentuk dari struktur sosial itu mendadak berubah, yaitu misalnya peristiwa perang atau revolusi (Koentjaraningrat, 1990 : 180-181).

Koentjaraningrat melihat bahwa struktur sosial pada dasarnya bergerak, struktur sosial selalu hidup, namun gerakanya ada tiga macam, yaitu :

1. Bergerak, karena suatu hubungan itu merupakan suatu aktivitas yang berlangsung dalam ruang waktu, dan ada *duration time*-nya.
2. Bergerak, dalam arti kontinuitas dari struktur sosial dalam ruang waktu. Suatu struktur sosial mempunyai kontinuitas, tetapi kontinuitas itu selalu berubah walaupun kadang-kadang hanya sedikit, sehingga dari luar mungkin tampak

seperti diam, tetap mantap, sebaliknya kontinuitas struktur sosial dapat juga berubah cepat sehingga dari luar tampak dinamis dan progresif.

3. Bergerak, dalam arti proses pertumbuhan dari struktur sosial misalnya, suatu rumah tangga terdiri dari dua angkatan, yakni orang tua dan anak-anaknya. Dalam keadaan itu rumah tangga tersebut mempunyai suatu struktur sosial tertentu. Apabila kemudian anak-anak itu kawin dan membawa suami atau istri masing-masing ke dalam rumah tangga itu juga, dan sudah beberapa waktu lahir anak-anak mereka, maka dalam keadaan yang baru itu struktur sosial berubah menjadi lain (Koentjaraningrat, 1990 : 193-194).

Dengan kerangka teori di atas Brown dan Levi-Strauss menganalisis struktur sistem kekerabatan yang berpangkal kepada keluarga inti, bahwa terdapat tiga macam hubungan dalam rangka keluarga inti adalah : (1) Hubungan antara seorang individu E dengan saudara-saudara sekandungnya yang berupa hubungan darah, (2) Hubungan antara E dengan istrinya yang berupa hubungan karena kawin, menghubungkan kelompok saudara sekandungnya sendiri dengan saudara sekandung istrinya, dan (3) Hubungan yang lain adalah hubungan antara E dan istrinya dengan anak-anak mereka yang berupa hubungan keturunan. Levi-Strauss melihat sistem kekerabatan berdasarkan dua hubungan (1) Hubungan positif adalah hubungan berdasarkan sikap bersahabat, mesra dan cinta mencintai dan (2) Hubungan negatif adalah hubungan berdasarkan sikap sungkan, resmi dan hormat (Koentjaraningrat, 1987 : 214-215).

Teori Perubahan Sosial Budaya

Dalam era globalisasi ini yang menandai perkembangan, perubahan dan gejolak interaksi sosial dewasa ini arus informasi dengan segala dampaknya, baik positif maupun negatif yang berlangsung sangat deras. Makin derasnya arus informasi antara suku-suku bangsa maupun bangsa-bangsa adalah terutama didorong oleh kemajuan dan penerapan sistem teknologi telekomunikasi yang semakin canggih dan berbagai stimulus-stimulus yang mengakibatkan terjadinya sosial budaya dalam masyarakat.

Beberapa definisi tentang perubahan sosial budaya, Lauer mengutip pendapat Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai berikut :

“Perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial sebagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Ditambahkan Lauer definisi lain adalah si perubah sosial sebagai variasi dalam modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku” (Lauer, 1993 : 4).

Sedangkan menurut Judistira K. Garna mengungkapkan bahwa :

“Perubahan dapat menyangkut tentang berbagai hal, perubahan fisik oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan itu sendiri. Perubahan yang menyangkut kehidupan manusia, atau terkait dengan lingkungan kehidupan yang secara fisik alam dan sosial disebut perubahan sosial” (Garna, 1992 : 1).

Dari beberapa konsep atau definisi di atas dapat dikemukakan beberapa teori terjadinya perubahan budaya. Koentjaraningrat menyimpulkan pendapat Adolf Bastian, F. Ratzel dan L. Frobenius tentang teori difusi, bahwa :

“Kebudayaan manusia itu pangkalnya satu, dan di satu tempat yang tertentu, yaitu waktu mahluk manusia baru saja muncul di dunia ini. Kemudian kebudayaan induk itu berkembang, menyebar dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru, karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu. Dalam proses memecah itu bangsa-bangsa pemangku kebudayaan-kebudayaan baru tadi tidak tetap terpisah. Sepanjang masa di muka bumi ini senantiasa terjadi gerak perpindahan bangsa-bangsa yang saling berhubungan serta pengaruh-mempengaruhi (Koentjaraningrat, 1987 : 111).

A.C. Haddon, G. Elliot Smith (1871-1937) dan W.J.Perry (1887-1949)

sebagai ahli antropologi mengajukan teori difusi sebagai berikut:

“Dalam sejarah kebudayaan dunia pada zaman purbakala pernah terjadi suatu peristiwa difusi, yang besar yang terpangkal di Mesir, yang bergerak ke arah Timur dan meliputi jarak yang sangat jauh, ke India, Indonesia, ke Polonesia, dan ke Amerika. Teori ini kemudian di sebut Heliothie Theory, karena menurut Elliot Smith dan Perry unsur-unsur pengting dari kebudayaan Mesir Kuno yang tersebar ke daerah luas tersebut di atas itu tampak pada bangunan-bangunan besar, atau Megalith, dan juga pada suatu kompleks unsur-unsur keagamaan yang berpusat pada pebnyembahan matahari, ataU hellios” (Koentjaraningrat, 1987 : 119-120).

Dari proses gerak kebudayaan yang lain adalah *“akulturasi”*, tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika gerak. Gerak kebudayaan adalah sebenarnya gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat. Gerak manusia terjadi oleh sebab itu mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia didalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan susunan kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing itu

lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Soekanto, 1990 : 210).

Proses akulturasi disebabkan berbagai hal, seperti yang dikemukakan oleh Soekanto, bahwa proses akulturasi didalam sejarah kebudayaan manusia telah terjadi dalam masa-masa yang silam. Biasanya suatu masyarakat lainnya dan antara mereka terjadi hubungan-hubungan mengikat, dalam lapangan perdagangan, pemerintahan dan sebagainya. Pada saat itulah unsur masing-masing kebudayaan saling menyusup.

Konsepsi pergeseran budaya sebagai proses sosial disebut sebagai "*asimilasi*" proses sosial ini timbul bila ada : (1) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (2) saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga (3) kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal itu golongan-golongan minoritas itulah yang mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan dari golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya, dan masuk kedalam kebudayaan mayoritas (Koentjaraningrat, 1985 : 255).

Seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup

dalam kebudayaannya disebut "*enkulturisasi*". Sejak kecil proses enkulturisasi itu sudah dimulai dalam pikiran warga suatu masyarakat, mula-mula dari orang-orang di dalam lingkungan keluarganya, kemudian dari teman-temannya bermain. Sering kali dia belajar dengan meniru saja berbagai macam tindakan. Setelah perasaan dan nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasi dalam kepribadiannya. Dan berkali-kali meniru maka tindakannya menjadi suatu pola yang menetap dan norma yang mengatur tindakannya "*dibudayakan*" (Koentjaraningrat, 1985 : 233).

Proses "*internalisasi*" dimaksud sebagai proses panjang sejak orang individu dilahirkan, sampai ia hampir meninggal, dimana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlakukannya sepanjang hidupnya.

Proses "*sosialisasi*" seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat, 1985 : 228-229).

"*Inovasi*" adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk yang baru, suatu *discovery* adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru baik berupa suatu alat baru, suatu ide baru, yang

diciptakan oleh seorang individu, atau suatu rangkaian dari beberapa individu dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1985 : 257).

Dari berbagai bentuk pergeseran sosial kebudayaan di atas kita akan melihat kecepatan dari pergeseran sosial budaya itu. Perubahan yang memerlukan waktu yang lama, dan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan "*evolusi*", sedangkan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang berlangsung dengan cepat disebut "*revolusi*". Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ada yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*).

Beberapa teori evolusi tentang perubahan sosial budaya :

1. *Unilinier Theories of Evolution*. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap sempurna. Pelopor teori tersebut antara lain August Comte, Herbert Spancer, dan lain-lain.
2. *Universal Theory of Evolution*. Menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tepat. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.
3. *Multilinier Theories of Evolution*. Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat (Soekanto, 1990 : 345-346).

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat proses sosial budaya :

1. Faktor yang mendorong jalannya proses perubahan sosial budaya :
 - a. Kontak dengan kebudayaan lain.
 - b. Sistem pendidikan formal yang maju.
 - c. Sikap menghargai karya seseorang dan keinginan untuk maju.
 - d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation), yang bukan merupakan delik.
 - e. Sistem terbuka lapisan masyarakat (open stratification).
 - f. Penduduk yang heterogen.
 - g. Ketidak-puasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu.
 - h. Orientasi ke masa depan.
 - i. Nilai budaya manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.
2. Faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial budaya :
 - a. Kurangnya hubungan dengan manusia lain.
 - b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
 - c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional.
 - d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interests.
 - e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
 - f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup.
 - g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
 - h. Adat atau kebiasaan.

- i. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki (Soekanto, 1980 : 361-366).

Salah satu perspektif teori yang perlu dikemukakan untuk menjawab permasalahan adalah perspektif teori Marx yang dikutip oleh Lauer tentang bagaimana kekuatan ekonomi dan ide dapat merubah sistem sosial budaya masyarakat. Marx mengemukakan bahwa :

“Ide muncul dari proses sosial budaya dan kemudian menjadi penting dalam perkembangan sosial budaya selanjutnya. Ide menjadi kuat bila ia mencerminkan kebutuhan dan kepentingan nyata manusia. Kebutuhan nyata manusia itu berakar di dalam kondisi sosial ekonomi dimana manusia bisa hidup. Jadi ide muncul dari kondisi sosial ekonomi yang ada (Lauer, 1993 : 248).

Berbagai teori dan konsep yang telah dikemukakan di atas, maka Olaf Larson dan Everest Rogers mengemukakan bahwa teori yang mengenai perubahan itu harus merangkup pertanyaan-pertanyaan pokok ini :

(1) Faktor apakah yang mengalami perubahan itu ? (2) Sejauh manakah perubahan itu terjadi ? (3) Bagaimanakah kecepatan tadi berlangsung ? (4) Kondisi-kondisi apakah yang terdapat sebelum perubahan itu terjadi ? (5) Apakah yang terjadi selama transisi itu ? (6) Stimulus-stimulus apa yang mendorong terjadinya perubahan itu ? (7) Melalui mekanisme-mekanisme apakah perubahan itu terjadi ? (8) Unsur apakah yang menimbulkan kestabilan pada suatu titik tertentu di dalam perubahan itu ? (9) Dapatkah manusia menentukan arah dari perubahan itu ? (Bertrand, 1980 : 162).

Modernisasi

Modernisasi merupakan suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dari berbagai aspek. Menurut Pool, modernisasi sangat luas artinya :

“Modernisasi mencakup proses memperoleh citra (*image*) baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan perkembangan. Proses mendapatkan citra baru ini dimungkinkan oleh “Media massa”, karena itu rakyat dihadapkan pada alternatif baru dan pada keharusan untuk memilih” (Lauer, 1993 : 414).

Aspek yang paling spektakuler dalam modernisasi suatu masyarakat adalah pengertian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang tertampang dalam revolusi industri (Schoorl, 1984 : 1).

Dengan pandangan di atas Weiner merumuskan arti modernisasi ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan pada unsur-unsur yang berbeda dari proses modernisasi sebagai berikut :

- a. Para ahli ekonomi memandang modernisasi terutama dalam pengertian “penerapan teknologi” oleh manusia untuk menguasai sumber-sumber alam demi menciptakan peningkatan nyata dalam pertumbuhan hasil penduduk per capita.
- b. Para ahli sosiologi dan antropologi terutama berurusan dengan “proses differensiasi” yang menandai semua masyarakat modern. Dalam hal ini mereka mengamati bermacam-macam differensiasi yang terjadi ditengah-tengah pelbagai tatanan/struktur masyarakat, begitu pekerjaan baru muncul, begitu lembaga pendidikan yang rumit dan baru berkembang serta berbagai jenis komunitas baru tampil
- c. Kalangan sarjana politik membahas serangkaian hal-hal yang menghambat dalam modernisasi tetapi memusatkan perhatian utama pada masalah “pembinaan negara dan pemerintah” begitu modernisasi berlangsung. Mereka

mempertimbangkan cara-cara kalangan "elite" pemerintahan menanggapi usaha-usaha yang baru terjun ke dalam dunia politik untuk memperoleh kekuasaan dan untuk melakukan tuntutan-tuntutan kepada mereka yang memegang kekuasaan (Weiner, 1981 : X – XI).

Cyrik Black melihat masyarakat modern ditandai oleh pertumbuhannya ilmu pengetahuan baru dengan ini menganggap adanya manusia yang memiliki kemampuan yang semakin meningkat buat memahami rahasia-rahasia alam dan buat menerapkan pengetahuan itu dalam kegiatan manusia (Pudjiwati Sajogyo, 1985: 16).

Dengan berbagai pandangan tentang modernisasi, Tipps mengajukan teori modernisasi ke dalam dua tipe yakni :

"Teori variabel kritis" dan "Teori dikotomi". Tipe teori variabel kritis mencakup sejenis perubahan tunggal seperti rasionalisasi atau industrialisasi, dan istilah modernisasi benar-benar menjadi sama artinya dengan variabel kritis. Tipe teori dikotomi lebih umum dan mencakup proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern (Lauer, 1993 : 17).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, yakni, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

Fenomena yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah perkawinan dan adat, yakni makna simbol-simbol, dan aturan-aturan yang dipergunakan serta perubahan yang terjadi dan keterkaitan sistem perkawinan adat dengan sistem kekerabatan pada masyarakat Bugis di Paria.

Pendekatan dilakukan dengan metode etnografi sebagai pertimbangan agar dapat mendeskripsikan budaya penduduk asli. Untuk lebih lengkapnya metode penelitian ini akan diuraikan secara rinci.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Paria, Daerah Tk. II Wajo, Prop. Sulawesi Selatan. Penempatan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan bekas wilayah kerajaan yang mempunyai karakteristik atau keunikan tersendiri dengan daerah Bugis lainnya, dengan demikian akan dapat membuka realitas sosial yang tentang perkawinan adat pada daerah ini.

Dalam prosesi perkawinan adatnya dipergunakan sebagai simbol-simbol dan aturan-aturan yang berbeda dengan daerah lainnya dan mempunyai pemahaman

yang berbeda dan tingkat perubahan yang terjadi dalam prosesi perkawinannya baik dalam penggunaan simbol-simbol atau budaya material maupun budaya ideal serta keterkaitan sistem perkawinan adat dengan sistem kekerabatannya.

Indikator-indikator tersebut dapat dipandang sebagai pertanda adanya ciri khas tertentu dalam prosesi perkawinan adat yang terjadi di daerah Bugis Paria.

Untuk memudahkan dalam analisis ini, maka lokasi penelitian ini akan dipilih Kelurahan Paria begitupun informannya dengan pertimbangan agar dapat mendapatkan informan yang memenuhi syarat untuk memberikan data/informasi yang baik dalam penelitian ini.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah keluarga masyarakat yang tinggal atau pernah tinggal di Kelurahan Paria yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Unit analisisnya adalah individu (berstatus kawin). Sebagai warga masyarakat dalam lokasi tersebut. Individu-individu tersebut diwakili oleh tiga lapisan status sosial masyarakat, yaitu : (1)_kelas bangsawan (keturunan raja-raja dan kerabatnya), (2) kelas orang biasa (orang yang tidak pernah bekerja pada raja-raja dan kerabatnya) dan (3) kelas hamba (orang yang pernah bekerja pada raja-raja dan kerabatnya) ditambah dengan (4) “key informan”, yaitu pemangku adat atau tokoh masyarakat. Alasan yang mendasari hal ini adalah : pertama, dengan terwakilinya dari ketiga kelas sosial ditambah dengan informan kunci, maka fenomena perkawinan adat ini dapat terungkap dengan jelas maka simbol-simbol dan aturan-

aturan yang dipergunakan dan berbagai tingkat perubahan yang terjadi dari setiap status sosial masyarakat serta keterkaitan sistem perkawinan adat dengan sistem kekerabatannya. Kedua, tidak menggunakan istilah subyek karena subyek tidak mendefinisikan hal-hal penting yang harus ditemukan oleh para peneliti, pendekatan dengan penelitian metode etnografi informan dengan mendefinisikannya (Spradley, 1997 : 89).

Untuk menentukan dan menjamin kualitas sumber data/informasi, maka informan yang dipilih memenuhi syarat sebagai informan dengan kriteria, yakni orang yang mengenal baik dan terlibat langsung dengan adat perkawinan Bugis di Paria dan mempunyai waktu luang untuk memberikan data (Spradley, 1997 : 61).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan memakai pedoman wawancara yang bersifat terbuka, fleksibel dan tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan di lokasi penelitian, mengingat adanya kemungkinan bahasa asli informan yang kurang dimengerti peneliti selain menggunakan pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan tape recorder. Wawancara ini dilakukan lebih awal pada tokoh-tokoh masyarakat atau pemangku adat (informan kunci) kemudian dilanjutkan pada tiga golongan strata sosial, pertimbangan ini dilakukan agar informasi yang diterima dari informan kunci dapat lebih diperjelas oleh ketiga golongan status sosial.

Selain wawancara dilakukan dalam pengumpulan data juga akan digunakan observasi, partisipasi untuk melihat dengan jelas berbagai simbol-simbol dan aturan-aturan yang dipergunakan serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam prosesi perkawinan adatnya. Menurut L. Dyson dan Dede Oetomo, bahwa teknik pengumpulan data pada studi etnografi akan dipergunakan tehnik observasi partisipatif dan wawancara (Bagong dkk, 1995 : 144 dan 192). Data pendukung lainnya dalam penelitian ini adalah dokumen serta foto-foto.

Data/informasi yang direncanakan akan ditentukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat ?
2. Sistem perkawinan yang manakah yang dianggap ideal dalam masyarakat ?
3. Bagaimanakah keterkaitan sistem perkawinan dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat ?
4. Bagaimanakah stratifikasi sosial yang berlaku dalam masyarakat dan perubahannya ?
5. Budaya material dan budaya ideal apakah yang dipergunakan dalam prosesi perkawinan adatnya ?
6. Apakah ada sanksi bila tidak menggunakan simbol-simbol budaya material, dan aturan atau norma yang berlaku dalam prosesi perkawinan adatnya ?
7. Simbol-simbol material apa saja yang dipakai oleh ketiga status sosial masyarakat ?

- a. Kelas bangsawan
 - b. Kelas orang biasa
 - c. Kelas hamba
8. Apakah budaya ideal aturan-aturan atau norma-norma (budaya ideal) diikuti oleh ketiga golongan status sosial masyarakat.
- a. Kelas bangsawan
 - b. Kelas orang biasa
 - c. Kelas hamba
9. Apakah simbol-simbol budaya material masih tetap berlaku pada setiap status sosial masyarakat :
- a. Kelas bangsawan
 - b. Kelas orang biasa
 - c. Kelas hamba
10. Apakah aturan-aturan atau norma-norma (budaya ideal) masih dilaksanakan oleh setiap golongan status sosial masyarakat :
- a. Kelas bangsawan
 - b. Kelas orang biasa
 - c. Kelas hamba
11. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi perubahan simbol-simbol budaya material yang dipergunakannya?

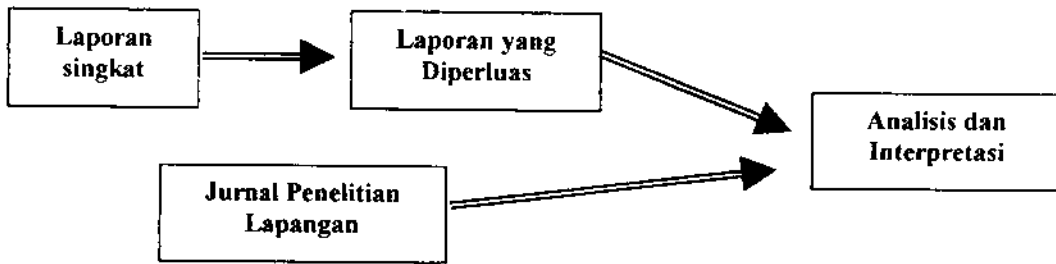
12. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan-aturan atau norma yang berlaku dalam prosesi perkawinan adatnya?

Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam akan diajukan pada saat penelitian di lapangan.

Teknik Olah Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan cara kualitatif. Untuk pengolahan data sampai pada tingkat analisis akan dipergunakan jenis-jenis catatan lapangan yang dikemukakan Spradley sebagai berikut :

1. Laporan ringkas, untuk efektivitasnya pelaksanaan wawancara atau observasi lapangan, maka dilakukan catatan ringkas.
2. Laporan yang diperluas, catatan yang diringkas tadi akan diperluas sehingga lebih jelas data informasi yang diterima pada tahap pertama (laporan ringkas).
3. Jurnal penelitian lapangan, buku harian jurnal ini berisi catatan mengenai pengalaman, ide, kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, pertimbangan dan teobosan dan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.
4. Analisis dan interpretasi, akan mengumpulkan semua data dan informasi pada tahap (1), (2) dan (3), dalam rangka untuk menganalisis data/informasi yang sudah terkumpul, disinilah akan dianalisis makna budaya dan perubahan yang terjadi pada prosesi perkawinan adatnya dan keterkaitan perkawinan adat dengan sistem kekerabatannya (Spradley, 1997 : 497). Untuk jelasnya proses ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 3.1 Proses Olah Data dan Analisis Data

Proses analisis data di atas akan dipergunakan juga pandangan Lexy Moleong, yakni :

1. Menelaah data, yakni menelaah seluruh data yang bersumber dari wawancara, observasi partisipasi dan data dokumen.
2. Mereduksi data, dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Mengorganisasikan data, yakni menyusun data dalam satuan-satuan.
4. Melakukan penafsiran data, yakni melakukan interpretasi data (Moleong, 1998: 190).

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan digambarkan secara umum lokasi penelitian, yakni selayang pandang sejarah bersatunya kerajaan Paria dengan kerajaan Wajo, dan deskripsi Kelurahan Paria yang meliputi keadaan geografis, keadaan demografi, pendidikan, agama dan potensi wilayah.

Selayang Pandang Bersatunya Kerajaan Wajo dengan Kerajaan Paria

Masa pemerintahan “Batara Wajo”

Pada masa pemerintahan Batara Wajo, lembaga atau jabatan Raja dikenal dengan Batara (langit) tempat yang tertinggi dan tempat bernaung. Pemerintahan ini kira-kira dimulai pada awal abad XIV. Pada masa awal munculnya sistem pemerintahan ke Bataraan ini berjalan sampai pada masa Batara Wajo La Pateddungi Tomasallangi (1466-1469) berbuat sewenang-wenang sehingga keadaan yang sangat terpaksa untuk keselamatan rakyat banyak. Arung Saotanre Totaba dibantu oleh La Tadampare atas nama rakyat menjatuhkan putusan pemecatan atau pengusiran La Patedunggi.

Setelah itu terjadilah kekosongan dalam pengisian pimpinan kerajaan. Setelah memulai musyawarah gelar Batara ini diganti menjadi “*Arung Matowa Wajo*”. *Arung Matowa I* adalah La Palewe-Topalippu (1474-1482).

Masa Arung Matowa

Menurut *Lontara* (sejarah yang memuat tentang nilai-nilai budaya dan orang-orang yang pernah berkuasa pada masa lalu) digambarkan susunan Arung Matowa sebanyak 45 orang. Masa sebelum Islam masuk di Wajo (1610) sampai masuknya Belanda (1905) sejumlah 30 orang dan masa penjajahan sejumlah 3 orang sampai tahun 1949.

Arung Matowa yang terkenal adalah :

1. La Taddampare Puang ri Maggalatung (1491-1521) terkenal sebagai negawaran dan ahli hukum yang sangat pintar serta panglima yang ahli.
2. La Mungkace Toudamang (1567-1602) negarawan dan panglima yang berani.
3. La Singkerupatona Sultan Abdul Rachman (1607-1610) berjasa dalam penerimaan agama Islam di Wajo tahun 1610.
4. La Tenrilai Tosengeng (1658-1670) ikut dalam perang Goa bersama Sultan Hasanuddin. Beliau gugur dalam perang melawan Belanda di Tosora.
5. La Maddukelleng (1736-1756) seorang pelaut yang berani, pejuang yang menentang Belanda (Pabittei, 1995 : 54-55).

Bersatunya Wajo dengan Paria

Puncak kejayaan kerajaan Wajo pada masa pemerintahan La Taddampare Puang ri Maggalatung. Beliau orang yang cerdas pandai seperti yang dikemukakan di atas, bahwa beliau sebagai negarawan dan ahli hukum yang sangat pintar serta panglima yang ahli. Seperti salah satu buku yang masih tetap menjadi acuan dalam

hukum pelayaran dan perdagangan dengan judul “Hukum Pelayaran dan Perdagangan Ammanah Gappa yang ditulis kembali oleh O. L. Tobing.

Dalam rangka memperkuat kerajaan Wajo, maka Puang ri Maggalatung mengadakan ekspansi ke berbagai wilayah yang berdekatan dengan kerajaan Wajo, termasuk kerajaan Paria. Untuk mengadakan ekspansi pada wilayah kerajaan Paria, maka Puang ri Manggalatung mengadakan perang dengan kerajaan Paria. Raja Paria yang bernama La Tenrijarangi mengadakan perlawanan yang sangat sengit. Peristiwa ini telah dimuat dalam Lontara, bahwa :

Niya rumpak e'Pariya. Duwattaunggi rumpakna Pariya nuttama ri Wajo. Nakkeda arung pariya, Amase'anggak Wajo muassuro tuttunggi atammu to Rumpiyae', to Pariaye. Muassuro malai monro ri Sakkoli, Gilireng.

Terjemahan :

Paria telah ditundukkan. Setelah dua tahun ditundukkan Paria barulah dimasukkan diWajo.

Berkata arung Paria.”Kasihaniilah aku Wajo engkau perintahkan menjemput yang tinggal di Sakkoli dan Gilireng (Salim dkk.,1996 : 2).

Pada saat kerajaan Paria dikalahkan oleh kerajaan Wajo, terjadi suatu perjanjian yang isinya : *“Naiya to Pariayae to maradeka, napusoe-soena, naikinya issenggi alemu to Pariya”*. (Orang Paria adalah orang merdeka, dapat melakukan adatnya sendiri, tetapi harus tahu diri). Artinya orang Paria diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Wajo, tetapi tetap masih merupakan bagian dari kerajaan Wajo. Dari isi perjanjian ini, menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat yang berlaku sampai pada saat ini.

Dekripsi Kelurahan Paria

Kelurahan Paria merupakan salah satu Kelurahan diantara 18 desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Paria sudah terjadi pemekaran, antara lain Desa Lairung, Kelurahan Macanang, Kelurahan Limpomajang, Desa Liu, Desa Benteng, Desa Botto Benteng, Desa Botto Tanre, Desa Lamuku Kelurahan Uraiang, Desa Tua dan Desa Tellulimpoe. Wilayah Kecamatan Majauleng pada dasarnya hampir meliputi semua wilayah bekas Kerajaan Paria.

Keadaan Geografis

Kota Paria merupakan ibu kota Kecamatan Majauleng dari ibu kota kabupaten (Sengkang) berjarak kurang lebih 24 km ke arah Utara. Sedangkan jarak dari ibu kota Propinsi (Kotamadya Ujung Pandang) adalah kurang lebih 250 km ke arah Selatan.

Secara geografis Kelurahan Paria berbatasan dengan Kelurahan Macanang di sebelah Utara, dengan Kelurahan Limpomajang di sebelah Selatan, dengan Desa Lairung, di sebelah Barat, dan Kelurahan Uraiang di sebelah Timur.

Untuk mencapai Kelurahan Paria tidaklah begitu sulit karena prasarana penghubung dan sarana transportasi yang tersedia cukup memadai. Jalan yang menghubungkan ke desa-desa ke ibu kota Kabupaten dan ibu kota Propinsi sudah beraspal dengan baik. Sarana transportasi (*pete-pete* = mobil angkutan) menuju ibu kota kabupaten relatif cukup tersedia, begitu pula untuk mencapai kota propinsi

relatif cukup tersedia. Perjalanan menuju ibu kota kabupaten kurang lebih 30 menit, sedangkan perjalanan menuju ibu kota propinsi kurang lebih 5 jam.

Dengan prasarana jalan yang cukup baik dan tersedianya sarana transportasi yang memadai, tentunya warga desa tidak mengalami hambatan menuju ibu kota kecamatan, begitu pula untuk menuju ibu kota kabupaten dan propinsi. Hal ini sangat memberikan kontribusi kepada petani untuk memasarkan hasil produksi pertanian mereka, baik di desa-desa, kota kecamatan, kabupaten dan di tingkat propinsi.

Para pedagang beras dan pedagang sapi tidak mengalami hambatan untuk memasarkan dagangan mereka di kota propinsi. Pedagang pemenuhan kebutuhan pokok, biasanya mereka langsung membeli barang-barang di Ujung Pandang, begitu pula bengkel-bengkel, mereka langsung membeli barang-barang di Ujung Pandang. Dengan membaiknya prasarana jalan dan transportasi angkutan, maka tempat domisili seorang pegawai tidak mengalami kesulitan. Pegawai yang berdomisili di Paria tidak mengalami kesulitan bertugas di desa-desa lain bahkan ada pegawai yang berdomisili di Kelurahan Paria, tapi bertugas di ibu kota kabupaten, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana halnya Sulawesi Selatan pada umumnya, Kelurahan Paria juga mengenal dua musim, yaitu penghujan dan musim kemarau. Untuk Kelurahan Paria, musim penghujan terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Juli dan musim kemarau pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Sedangkan bulan Januari sampai dengan bulan Maret adalah musim pancaroba. Tipologi tanah

kelurahan ini adalah dataran rendah sehingga potensial untuk pengembangan sektor pertanian padi sawah, namun sampai saat ini belum dikembangkan prasarana irigasi.

Keadaan Demografis

Kepadatan penduduk di Kelurahan Paria mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, tetapi kenaikan ini relatif normal. Salah satu faktor yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk adalah keberhasilan petugas lini lapangan Gerakan Keluarga Berencana dalam mengelola Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Paria. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Kepadatan Penduduk
Di Kelurahan Paria Tahun 1994-1998

No.	Tahun	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1.	1994	5.440	8.615	1,58
2.	1995	5.440	8.641	1,58
3.	1996	5.440	9.121	1,67
4.	1997	5.440	9.158	1,68
5.	1998	5.440	9.356	1,71

Sumber : Buku Kompilasi Data Kabupaten Wajo

Pada tahun 1995 laju pertumbuhan penduduk dari 8.615 jiwa menjadi 8.641 jiwa atau naik 26 jiwa (0,3%). Tahun 1996 dari 8.641 jiwa menjadi 9.121 jiwa atau

naik 480 jiwa (5,5%). Tahun 1997 dari 9.121 jiwa menjadi 9.158 jiwa atau naik 37 jiwa (0,4%). Tahun 1998 dari 9.158 jiwa menjadi 9.356 jiwa atau naik 198 jiwa (2,2%).

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data di atas menunjukkan angka yang normal. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan sektor pembangunan lainnya.

Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kelurahan Paria mengalami kemajuan, indikasi ini terlihat pada banyaknya warga masyarakat yang sudah menyalang gelar sarjana. Salah satu penyebab berkembangnya tingkat pendidikan adalah sarana pendidikan, sekolah dasar yang pertama berdiri di Kabupaten Wajo adalah Sekolah Dasar Negeri Paria.

Sekolah Dasar Negeri Nomor 158 Paria berdiri pada tahun 1909 dengan status Lanshap empat tahun. Satu tahun kemudian barulah dibangun gedungnya (1910). Kemudian pada tahun 1957 berubah menjadi Sekolah Rakyat enam tahun. Sekolah inilah yang banyak alumninya berhasil menjadi sarjana dan telah bekerja di berbagai level birokrasi. Berdasarkan laporan sejarah singkat Sekolah Dasar Negeri Nomor 158 Paria dicantumkan nama-nama tersebut sebagai berikut :

- Prof. Dr. H. Ahmad Amiruddin, mantan Gubernur Sulawesi Selatan.
- Prof. Dr. H. Syamsu Mappa, mantan Pembantu Rektor I IKIP Ujung Pandang.
- Dr. Ir. Ambo Aco Ismail, di Jerman Barat.

- Drh. H. Muh. Rafid, Mantan Kanwil Kehewanan Sulawesi Selatan.
- Dra. Indo Wettoeng, Dosen IKIP Ujung Pandang.
- Drs. Sappaile, Dosen IKIP Ujung Pandang.
- Drs. Amirrudin Malinta, Staf Dirjen Dikmas.
- Drs. Sumange Alam Caru, Kandep Dikbud Kabupaten Wajo.
- Drs. Dahlan Maulana, mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo.
- Drs. Andi Patotori.
- Drs. Andi Panguriseng, mantan Kepala SMA Paria.
- Drs. Andi Sumange Alam Aco. mantan Kepala SPG I Ujung Pandang.
- Drs. Pallawa Naga, Staf Depnaker Ujung Pandang.
- dr. H. M. Badwi, Kepala Bagian Medis Rumah Sakit Islam Paisal Ujung Pandang.
- Drs. Nasrum Mappa, MA, Dosen Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
- Drs. Andi Abdul Kadir, mantan Wakil Ketua BP 7 Kabupaten Wajo.
- Dra. Besse Dinar, Dosen IKIP Ujung Pandang.
- Drs. H. Andi Maulana Nyompa (Almarhum).
- Drs. Baso Iskandar, Msi., Walikota Madya Ujung Pandang.
- Drs. Rustam Efendi, Dosen IKIP Ujung Pandang.
- Drs. H. Sitti Haswiah Mappa, Ka Kandep Dikbud Kecamatan Majauleng.
- Drs. Paluppi, mantan Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Sidrap.
- Drs. Nuralam Massaile (Almarhum).
- Andi Sultan, SH.

- Drs. Syamsuddin P.
- Andi Alimuddin, SH., Kejari Jakarta Raya.
- Drs. Sirajuddin, Wakil Ketua DPR Kabupaten Wajo.
- Drs. Abd. Latif Mappe, Anggota DPR Tingkat II Wajo.
- Ir. Nurdin Billa, Dosen Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
- Nindong Bill, SH., Dosen Universitas Hasanuddin Ujung Pandang
- Ir. Muhammad Wakif Rauf, Staf BAPEDA Kabupaten Sinjai.
- Dra. Indo Ampa Umar, Guru SMP di Kabupaten Luwu.
- Drs. Faisal, Guru SMA Negeri Paria.
- Dra. Nuralam Abdullah.
- Mude, BA., Kepala SMP Negeri Atapangge.
- Tenri Sessu, BA., Kepala SMP Negeri II Tempe.
- Hamade, BA., Kepala SMP Negeri Tosora.
- Dra. Besse Toja, Kepala SD No. 225 Laerung.
- Drs. Imran Hameru, Anggota DPR Tingkat II Wajo.
- Drs. Suriadi Mansur.
- Drs. Muliadi Mansur (Hajeri, 1990 : 1-2).

Salah satu motivasi berkembangnya tingkat pendidikan dalam masyarakat karena adanya pandangan bahwa dengan pendidikan yang tinggi akan terangkat stratifikasi sosial mereka. Motivasi ini telah terungkap dalam pesan-pesan *attoriolong* (pesan-pesan orang dahulu) yakni "*matanrei bungae na ade'e*" (lebih tinggi jabatan daripada keturunan). Jabatan pada masa sekarang diidentikkan dengan

tingkat pendidikan. Masyarakat menempatkan keturunan bangsawan pada stratifikasi sosial yang tinggi, tetapi tetap menempatkan tingkat pendidikan dalam stratifikasi sosial yang lebih tinggi.

Dengan tingkat pendidikan yang relatif berkembang, akan memberikan kontribusi pada berbagai sektor pembangunan, dan telah menimbulkan implikasi dalam perkembangan budaya dalam masyarakat.

A g a m a

Masyarakat Kelurahan Paria menganut dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Islam merupakan penganut agama yang lebih besar dibanding dengan Kristen. Meskipun demikian, belum pernah terjadi konflik secara terbuka yang didasarkan atas agama. Mereka hidup saling berdampingan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya sarana ibadah oleh masing-masing agama, seperti masjid 2 buah, dan gereja satu buah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Struktur Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Paria
Tahun 1994-1998

No.	Tahun	Islam	Kristen	Hindu	Budha
1.	1994	8.598	17	-	-
2.	1995	8.624	17	-	-
3.	1996	9.104	17	-	-
4.	1997	9.141	17	-	-
5.	1998	9.339	17	-	-

Sumber : Buku Kompilasi Data Kabupaten Wajo

Data di atas menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penganut Islam hanya berdasarkan kelahiran. Dan penduduk asli Bugis Paria secara keseluruhan menganut agama Islam, sedangkan warga masyarakat yang beragama Kristen merupakan penduduk pendatang yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja.

Potensi Wilayah

Wilayah Kelurahan Paria merupakan wilayah agraris yang relatif potensial. Sektor agraris yang paling menonjol adalah pertanian padi sawah. Pada tahun 1998 luas areal persawahan 1.945 hektar, dengan produksi 483.100 ton, jagung 80 hektar dengan produksi 47 ton, ketela pohon 5 hektar dengan produksi 4 ton, kacang tanah 100 hektar dengan produksi 192,5 ton, kedelai 100 hektar dengan produksi 40 ton,

ubi kayu 11 hektar dengan 44 ton, dan ubi jalar 2 hektar dengan produksi 4,2 ton.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Luas Tanaman Pangan Di Kelurahan Paria
Tahun 1998

No.	Jenis	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi	1.945	483.100
2.	Jagung	80	47
3.	Ketela Pohon	5	4
4.	Kacang Tanah	100	92
5.	Kedelai	100	40
6.	Ubi Kayu	11	44
7.	Ubi Jalar	2	4,2

Sumber : Buku Kompilasi Data Kabupaten Wajo

Melihat potensi wilayah di atas, bahwa sektor agraris yang paling mendukung adalah pertanian padi sawah, dibanding dengan sektor tanaman pangan lainnya. Namun sampai saat ini belum tersentuh teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produksi secara maksimal. Prasarana irigasi belum diterapkan, jadi hanya mempergunakan sistem tadah hujan yang dapat berproduksi satu kali satu tahun. Teknologi traktor sebagai pengganti tenaga hewan sudah diterapkan, sehingga dapat menguntungkan para petani. Penerapan teknologi ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap distribusi penggunaan tenaga kerja, karena luas pertanian

tetap berimbang dengan tenaga kerja yang ada. Jadi salah satu kelemahan sektor pertanian padi sawah karena belum tersentuhnya teknologi irigasi yang memungkinkan dapat mengoptimalkan produktivitas pada sektor pertanian padi sawah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Sistem Perkawinan dengan Sistem Kekerabatan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan hubungan sistem kekerabatan dengan sistem perkawinan. Penjelasan tersebut diawali dengan memberikan deskripsi tentang pelapisan sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem perkawinan. Dalam sub bab ini dijelaskan pula hubungan kekerabatan dengan pelapisan sosial akibat perkawinan. Kemudian dideskripsikan hubungan sistem perkawinan dengan sistem kekerabatan dan perubahannya. Untuk jelasnya akan diuraikan secara rinci sebagai berikut :

Lapisan Sosial Masyarakat

Gilbert Hamonic (1983 : 13) yang dikutip oleh Mattulada mengemukakan bahwa stratifikasi sosial orang Bugis-Makassar pada masa lalu ada tiga pelapisan pokok yaitu :

1. *Anak Arung (anak karaeng)*
2. *Tomaredeka (tumaradeka)*
3. *A t a*

Lapisan pertama anak Arung/anak karaeng adalah lapisan masyarakat bangsawan atau kerabat raja, lapisan tomaradeka/tumaradeka adalah lapisan masyarakat kebanyakan atau orang-orang yang merdeka (bebas) tapi bukan

bangsawan dan lapisan yang ketiga adalah ata atau hamba sahaya yang dikuasai oleh para bangsawan, karena mereka ini (ata) orang-orang yang ditangkap dalam perang, orang-orang yang tidak dapat membayar utangnya dan orang yang melanggar pantangan adat (Yamin dkk, 1989 : 32).

Hasil penelitian Friedericy yang dikutip oleh Mattulada juga telah diperjelas penelitian Wiwiek P. Yoesoef dkk. Bahwa :

Masyarakat suku bangsa Bugis terbagi dalam tiga lapisan utama, yaitu lapisan kaum bangsawan yang disebut Arung/anakArung, lapisan orang biasa yang disebut tosama, dan lapisan hamba sahaya yang disebut ata. Pada masa sekarang masing mengenal gelar-gelar kebangsawanan (Arung, bau, andi, dan sebagainya (Yoesoef dkk. 1990 : 10).

Ketiga pelapisan sosial secara umum di atas, nampak ada persamaan pada suku Bugis di Sulawesi Selatan. Tetapi beberapa daerah bekas kerajaan lokal di Sulawesi Selatan, pelapisan sosial tersebut mempunyai variasi tertentu pada masing-masing strata, antara satu daerah dengan daerah lainnya ada perbedaan tetapi esensinya hampir sama .

Didaerah suku bangsa Bugis Bone pelapisan sosial masyarakat sebagai berikut :

1. **AnakArung** (bangsawan)

1.1. **Anak Arung matowa** (anak bangsawan penuh)

1.1.1. **Anak Arung massala** (putra/putri mahkota)

1.1.2. **Anak Arung matase** (putra/putri raja)

1.2. **Anak Arung**

1.2.1. **Anak Arung ribolo** (bangsawan istana)

1.2.2. *Anak Arung sipue* (bangsawan istana)

1.2.3. *Anak cerek* (bangsawan berdarah campuran)

2. *To Maradeka* (orang merdeka)

2.1. *To deceng* (keluarga orang baik-baik)

2.2. *To sama* (orang kebanyakan)

3. *Ata*

3.1. *Ata mana* (sahaya warisan)

3.2. *Ata mabuang* (sahaya baru)

Pelapisan sosial di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki dari lapisan sosial tertentu, boleh mengawini seorang wanita dari lapisan yang sama atau lampisan yang rendah, tetapi dilarang kawin dengan seorang wanita dari lapisan sosial yang lebih tinggi.
2. Hanya anggota lapisan *Anak Arung Matowa* baik laki-laki maupun wanita yang boleh dicalonkan menjadi raja (*Mangkau*). Keluarga Mangkau masih dianggap sebagai turunan *Tomanurung* dan karenanya masih merupakan *tau maddara takku*.
3. Putra putri yang berasal dari luar Bone dan yang berhak dijadikan permaisuri adalah orang-orang sederajat "*anak arung matase*" yakni putri mahkota di Luwu, Goa, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
4. Anak Arung matase lainnya, dipersiapkan menjadi raja-raja bawahan yang merangkap "*ade pitu*" yakni dewan kerajaan yang terdiri atas raja-raja bawahan yang menjadi inti kerajaan Bone. Dari lapisan inilah yang dipersiapkan untuk

menduduki jabatan-jabatan dalam birokrasi kerajaan, seperti *To Marilaleng*, *Poggawa* dan *Arung Palili* pada daerah di luar daerah inti tetapi berhak memperoleh perlindungan dari Kerajaan Bone.

Sedangkan pelapisan sosial yang terdapat di tanah Wajo dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Anak Mattola* (anak pewaris yang dipersiapkan untuk mewariskan tahta kerajaan suatu negeri dalam kekuasaan Wajo), atau calong *Arung matase*.
 - 1.1. *Anak Mattola* (anak pewaris)
 - 1.2. *Anak Sangaji* (anak terbilang mulia)
 - 1.3. *Anak Rajeng* (anak dihargai)
 - 1.3.1. *Anak Rajeng Lebbi* (anak yang sangat dihargai)
 - 1.3.2. *Anak Rajeng Biasa* (anak dihargai biasa)
 - 1.4. *Anak Cerak* (anak berdarah campuran)
 - 1.4.1. *Anak Cerak Sawi* (anak berdarah campuran warga)
 - 1.4.2. *Anak Cerak Pua* (anak berdarah campuran hamba sahaya)
 - 1.4.3. *Anak Cerak Ampulajeng* (anak berdarah campuran hamba sahaya)
 - 1.4.4. *Anak Cerak Latang Dapureng* (anak berdarah campuran hamba sahaya)
2. *Anak Arung* (anak bangsawan/raja)
3. *Tau Deceng* (orang baik)
 - 3.1. *Taudeceng* (orang baik)
 - 3.2. *Taudeceng Karaja* (orang baik sekali)

4. ***Tau Maradeka*** (warga merdeka)
 - 4.1. ***Tau Maradeka Mennennungeng*** (warga merdeka abadi)
 - 4.2. ***Tau Maradeka Sampegi*** (warga merdeka yang berasal dari sahaya yang dibebaskan)
5. ***Ata*** (sahaya)
 - 5.1. ***Ata mana*** (sahaya warisan)
 - 5.2. ***Ata mabuang*** (sahaya baru)

Ada beberapa keterangan yang berkaitan dengan pelapisan sosial ***Ri Tana Wajo*** (di Tanah Wajo) :

1. Orang Wajo tidak mengenal ***Tomanurung*** (orang yang turun dari langit), maka pelapisan sosial masyarakatnya tersusun menurut keadaan tiga buah negeri yang bergabung membentuk satu kesatuan bersama, disebut Wajo.
2. Pada tiap-tiap negeri mengandung kesatuan Tana Toraja di daerahnya, terdapat lapisan-lapisan masyarakat seperti anak mattola yang digambar seperti lapisan (1) seperti peranannya dalam kekuasaan negeri. Mereka adalah pimpinan-pimpinan kaum di komunitas mereka.
3. Untuk jabatan ***Arung Matoa*** sendiri, tidak tergantung pada putra mahkota tertentu yang akan mengisi jabatan tersebut, yang secara langsung atau dengan sendirinya diambil dari keturunan Arung Matoa.
4. Posisi puncak kekuasaan kerajaan, amat ditentukan dari penguasa-penguasa yang menempati posisi bawah. Dengan demikian peluang timbulnya persaingan untuk menduduki posisi puncak tersebut diantara lapisan menengah-atas secara

positif dan normatif, seperti lapisan menengah yang telah mengalami mobilitas vertikal dengan jasa perkawinan. Walaupun secara umum diketahui, bahwa keluarga lapisan atas itu yang selalu dipersiapkan untuk menempati posisi puncak tersebut.

Pada pelapisan sosial di atas terdapat pula pada bekas kerajaan suku Bugis di Paria. Namun Kerajaan Paria pada masa lalu pelapisan sosialnya lebih sederhana, yaitu :

- Arung (bangsawan dan kerabatnya/raja)
- Tau Deceng (orang yang masih ada pertalian darahnya dengan Arung)
- Tau biasa bisa juga disebut tau sama (orang kebanyakan)
- Tau maradeka (orang merdeka)
- Ata (hamba)

Ada beberapa penjelasan dalam pelapisan sosial dalam masyarakat kerajaan Paria sebelum bersatu dengan Wajo.

1. Arung, adalah orang yang memangku Raja di Paria (Arung Paria). Disamping Arung Paria terdapat tujuh Arung yang menguasai daerah dalam wilayah kerajaan Paria. Arung yang ketujuh tersebut masih keturunan Arung Paria, mereka bertindak sebagai Kepala Kampung (*Kapala Kampong*).
2. Tau deceng adalah orang-orang yang masih ada pertalian darah dengan Arung, namun Tau deceng ini tidak pernah lagi keturunannya berkuasa (menjadi Arung). Karena di daerah Bugis Paria stratifikasi sosial ada korelasi positif dengan jawaban. Informan penelitian mengemukakan bahwa, walaupun dalam

satu keturunan, atau kekerabatan, tetapi tidak sama kekuatan stratifikasi yang dimiliki anak-anaknya. Bagi mereka yang punya jabatan (Arung dalam suatu wilayah), stratifikasi sosial mereka lebih tinggi dibanding dengan mereka yang tidak punya jabatan. Anak-anak yang tidak punya jabatan inilah kekuatan stratifikasi sosialnya memudar, sehingga menjadi Tau deceng. Masyarakat Bugis Paria mengenal dan menjadi suatu dogma, bahwa **“matanrei bungaie na ade’e** artinya pangkat lebih tinggi daripada keturunan. Dari kata kiasan bunga menunjukkan kemampuan seseorang, kalau sekarang mengandung arti tingkat pendidikan seseorang. Dari kata kiasan bunga sampai pada saat ini masih dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat Bugis di Paria, sehingga tingkat pendidikan masyarakat semakin berkembang. Dan tidak mengherankan bila di berbagai level birokrasi, baik di Tingkat II, Tingkat I bahkan di tingkat nasional maupun internasional mereka menduduki jabatan. Seperti yang dikemukakan informan penelitian :

“Informan penelitian bernama Hajjah Siti Fatima berumur 58 tahun berpendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) bekerja sebagai guru SD (Sekolah Dasar Negeri No. 158 Paria) yang merupakan SD tertua di Kabupaten Wajo. Beliau mengemukakan bahwa orang Paria pada saat ini sudah banyak yang menjadi pejabat di berbagai daerah, baik di tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional bahkan ada yang sekarang tinggal di Jerman Barat, beliau itu sudah Doktor dan banyak orang Paria menimba ilmu di Pulau Jawa, bahkan ada yang di luar negeri. Akhirnya beliau menyodorkan nama-nama orang yang punya kedudukan di berbagai tingkat birokrasi, sebagai alumni SD 158 Paria, nama-nama tersebut terlampir dalam tesis ini.

3. Tau biasa atau lebih sering disebut Tau Sama, adalah orang-orang kebanyakan yang tidak mempunyai pertalian darah dengan Arung. Lapisan ini mempunyai kebebasan gerak dalam melakukan berbagai kegiatan di setiap lini, namun masih tetap ada norma yang mengatur tentang perbedaan antara Arung bersama kerabatnya dengan tau sama ini, misalnya saja perlakuan dalam perkawinan. Orang biasa sangat sulit mengawini bangsawan, sebaliknya laki-laki bangsawan sangat mudah untuk mengawini orang biasa, begitu pula keterbatasan penggunaan simbol-simbol pada upacara perkawinan.
4. Tau Maradeka, adalah orang-orang merdeka, yang tidak terikat oleh Arung atau kerabatnya. Tau maradeka ini biasanya berasal dari ata, tetapi sudah dimerdekakan oleh Arung yang pernah mempekerjakan dalam lingkungan keluarganya. Secara adat golongan Tau Maradeka ini tidak dapat mengawini lapisan Arung, hanya dapat terjadi bila laki-laki Arung menjadikan istri selir. Perlakuan-perlakuan dalam adat mempunyai keterbatasan-keterbatasan, misalnya dalam perkawinan banyak simbol yang tidak diperbolehkan menggunakannya.
5. Ata, adalah hamba sahaya yang berbakti kepada raja-raja atau kerabatnya untuk mengurus lingkungan keluarga Arung. Ata yang ada di Paria kebanyakan hanya merupakan ata mana (sahaya warisan). Golongan ini sangat lemah kedudukannya dalam adat. Kebebasan mereka sangat terbatas, bahkan dapat dikatakan kegiatan setiap lini tidak dapat dilakukan. Kehidupan mereka diatur oleh Arung yang menguasainya. Keterbatasan perlakuan secara adat terlihat dalam sistem

perjodohan, dimana golongan ini hanya dapat mengawini golongannya sendiri, bahkan jodoh mereka diatur Arung yang menguasainya.

Dalam masyarakat Paria masih ada pelapisan yang berpengaruh dalam mengatur tentang kebijakan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu pemangku agama yang disebut “sara” atau pemangku sara’, terdiri dari :

1. **Imang (kali)**, adalah imam desa dan imam kampung, lapisan ini sederajat dengan arung, karena masih berasal dari kerabat mereka.
2. **Katte (hatib)**, ada hatib di tingkat desa dan di tingkat kampung.
3. **Bilala (bilal)**, kedudukan mereka ada yang di tingkat desa dan ada yang di tingkat kampung.
4. **Doja**, adalah orang yang mengurus masjid dan jadwal masuknya sholat.

Pemangku sara’ berada pada posisi pelapisan sederajat dengan bangsawan, karena masih ada pertalian darah. Pemangku adat dan pemangku sara’ mempunyai posisi penting dalam mengurus birokrat pemerintahan di Paria, kecuali doja, karena garis keturunan mereka berasal dari orang biasa atau Tau Maradeka.

Posisi ini dapat terlihat pada upacara perkawinan dimana kedua tokoh ini ditempatkan pada baris terdepan. Dan inilah yang menjalankan roda pemerintahan. Suatu keputusan adat akan selalu dilibatkan pemangku sara’ karena mereka sebagai penasehat pemerintahan.

Penghormatan atau gelaran dalam masyarakat Paria, tidak sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di Wajo, gelaran

yang ada pada masa lalu sebetulnya tidak ada, misalnya Arung Paria yang pernah berkuasa yang bernama "**Latenri Jarangi**". Menjelang peralihan istilah kecamatan gelarang belum ada, yang menjadi arung pada saat itu adalah **Arung Paria Lakone**. Dengan masuknya pengaruh dari Wajo, dan daerah Bugis lainnya, maka diperkenalkan gelaran antara lain :

- **Baso**, pemangku adat dan kerabatnya.
- **Daeng**, yang masih ada hubungan darah dengan Arung.

Kemudian gelaran ini berkembang, dimana sudah ada yang menggunakan :

- **Andi**, pemangku adat dan kerabatnya dan mereka yang kawin dengan orang dari luar yang bergelar Andi.

Gelar-gelaran di atas masih tetap berlaku sampai sekarang.

Pelapisan sosial di atas telah mengalami perubahan, pelapisan yang ada sekarang hanya terbagi tiga, yakni :

1. Bangsawan
2. Tau deceng dan
3. Tau sama

Ketiga pelapisan sosial di atas ada gejala akan lebih sempit lagi, dimana pelapisan itu akan menjadi dua golongan, yakni :

1. Golongan bangsawan dengan kerabatnya
2. Tau sama

Golongan tau deceng pada saat ini akan melebur kedalam golongan bangsawan, karena golongan ini bila kemampuan ekonomi mereka sudah mapan, mereka dapat

mempergunakan setiap simbol-simbol yang dipergunakan oleh kalangan lapisan arung. Seperti yang dikemukakan informan penelitian :

Informan penelitian bernama Haji Tappa Daeng Matajang berumur 70 tahun, berpendidikan Sekolah Rakyat (SR), pekerjaan sebagai petani. Beliau mengemukakan bahwa pada saat ini tidak ada lagi *ata*, karena golongan ini sudah banyak yang mapan kehidupan ekonominya, mereka tidak ada lagi yang mengabdikan pada keluarga kaum bangsawan. Jadi saat ini *duamani onrona taue* (tinggal dua strata yang ada dalam masyarakat), yaitu bangsawan dengan orang biasa.

Informan penelitian Drs. Andi Arifai membenarkan pendapat H. Tappa, bahwa pada saat ini tidak ada lagi golongan *ata*, dan tidak ada lagi yang mau dianggap *ata*, bahkan pada saat ini kita hanya mengaku keluarga mereka, maksud beliau bahwa orang-orang yang pernah bekerja dalam lingkungan keluarga orang tuanya atau neneknya, mereka tidak menganggap lagi hamba warisan mereka. Bahkan dia mengemukakan bahwa bila saya mengaku sebagai Tuannya, pasti mereka akan marah, walaupun saya tahu bahwa mereka warisan *ata* dari nenek saya.

Pawelliri juga mengemukakan bahwa tidak ada lagi orang Paria yang mau disebut *ata*, contohnya saja pada saat bangsawan akan melaksanakan *tudang botting*, keturunan *ata* itu tidak mau lagi mendampingi pengantin.

Perubahan-perubahan tersebut masih ada faktor lain yang mempengaruhi, sehingga pelapisan sosial, khususnya untuk *ata* mengalami kepunahan. Faktor lain ini adalah desakan agama yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hal ini telah dikemukakan oleh Mattulada, bahwa :

Lapisan sosial yang disebut *ata* mulai hilang sejak awal abad ke-20. Ini disebabkan karena adanya larangan dari pemerintah kolonial Belanda serta adanya pengaruh dari agama yang melihat manusia itu sebagai hamba Tuhan yang sederajat, bahwa sesudah terjadinya Perang Dunia ke-II, arti dari perbedaan antara lapisan anakarung/anakaraeng dan tomaradeka/tumaradeka dalam kehidupan masyarakat telah berkurang. Kalaupun masih terdapat gelar kebangsawanan, maka gelar tersebut tidak mempunyai arti lagi sebagai mana arti yang terkandung dalam makna kata gelar seperti zaman dahulu. Bahkan sekarang arti tersebut dengan sengaja diperkecil dalam rangka perkembangan

sosialisasi dan demokrasi masyarakat Indonesia (Yamin Sani dkk. 1989 : 32).

Hubungan Kekerabatan dengan Pelapisan Sosial

Akibat Perkawinan

Sebelum dideskripsikan hubungan di atas terlebih dahulu akan dikemukakan tentang hubungan perkawinan yang dianggap tidak wajar, oleh Levi-Strauss disebut incest atau perkawinan yang dianggap sumbang, antara lain adalah :

- Ibu kandung
- Bapak kandung
- Ibu dari ibu kandung (nenek)
- Bapak dari bapak kandung (kakek)
- Anak-anak laki-laki atau perempuan
- Saudara-saudara baik lelaki atau perempuan
- Saudara dari ibu
- Anak saudara
- Cucu saudara
- Ibu tiri
- Bapak tiri
- Mertua (dari istri dari saudara)
- Menantu (suami atau istri dari anak)

Yang dimaksud *incest* dalam masyarakat adalah yang masih sedarah dan kerabat keluarga akibat perkawinan, seperti yang tersebut di atas

Bila terjadi perkawinan dalam hubungan ini pada zaman dahulu pelakunya akan dihukum, keduanya ditenggelamkan dalam air dengan menggantungi batu agar tenggelam sampai mati.

Incest bagi masyarakat Bugis di Paria merupakan suatu norma yang sangat dipatuhi oleh masyarakat, sampai saat ini *incest* masih tetap berlaku dan tidak pernah terjadi dalam masyarakat. Selain pelaranga di atas, masih terdapat pembatasan jodoh yang berhubungan dengan pelapisan sosial dalam masyarakat.

Masyarakat Bugis di Paria dalam hubungan perkawinan yang terlarang dalam kerabat genologis atau garis keturunan atas dasar pertalian darah. Pembatasan jodoh dalam hubungan perkawinan karena batas kedudukan (stratifikasi) yang tidak sejajar, misalnya antara gadis bangsawan dengan laki-laki orang biasa (tau biasa = tau sama) pada masa lalu tidak diperbolehkan atau tertutup. Tetapi masih ada peluang atau kemungkinan apabila laki-laki tersebut mempunyai keistimewaan tertentu misalnya karena keberanian dan ketangkasannya. Mereka ini disebut *Tobarani* dihargai dan dipandang sebagai orang-orang terhormat. Demikian juga cendekiawan, yakni orang-orang berilmu yang merupakan pemimpin-pemimpin agama, walaupun ada pembatasan jodoh atas dasar stratifikasi sosial tetapi masih ada kemungkinan terjadinya perkawinan antara golongan bangsawan dengan orang biasa. Pada masa lalu orang tua memilihkan jodoh kepada anaknya dengan indikator utama adalah yang sejajar dengan stratifikasi sosial mereka. Sehingga dalam menentukan jodoh, orang tua selalu memilih keluarga atau kerabat terdekatnya, agar stratifikasi mereka tidak turun, atau agar mereka tidak ditolak karena alasan

stratifikasi. Namun dewasa ini sudah dapat terjadi perkawinan antara gadis-gadis keturunan bangsawan dengan laki-laki keturunan orang biasa, ini disebabkan karena kriteria tentang pemilihan jodoh sudah berubah, informan penelitian mengutarakan hal ini :

Informan penelitian bernama Prof. DR. Abu Hamid, berumur 64 tahun, sebagai Guru Besar Universitas Hasanuddin, juga banyak meneliti tentang budaya Sulawesi Selatan. Beliau mengemukakan bahwa citra orang tua terhadap pemilihan jodoh terhadap anaknya dalam masyarakat Bugis ada tiga, yakni :

- 1. *Abbatiring* biasa juga disebut *ampijangeng*, yaitu strata sosial dalam masyarakat, yang berkaitan dengan garis keturunan (warisan darah dari keturunannya).**
- 2. Jabatan, yang biasa disebut "*pangka'na*", maksudnya pekerjaan laki-laki.**
- 3. Gelar, apa gelar laki-laki tersebut, yaitu tingkat pendidikan mereka, kalau dahulu orang cerdas.**

Menurut Abu Hamid, ketiga citra inilah yang berpengaruh dalam pemilihan jodoh dalam masyarakat Bugis. Ketiga citra ini berbeda-beda penilaiannya bagi setiap komunitas masyarakat Bugis, Abu Hamid mencontohkan pada masyarakat Bugis Bone, citra ini diurut sebagai berikut :

1. Abbatireng atau *ampijangeng* (stratifikasi sosial berdasarkan pewarisan darah)
2. Gelar, tingkat pendidikan mereka
3. Pekerjaan (=jamajamanna)

Beliau juga menambahkan bahwa citra itu berbeda pada masa lalu dengan sekarang.

Berdasarkan ketiga citra ini, sangat berpengaruh dalam masyarakat Bugis di Paria. Pada zaman dahulu citra itu didasarkan atas hirarki sebagai berikut :

1. **Onrona** (*abbitireng=ampijangjeng*), hal ini merupakan kriteria yang sangat asasi dalam memilih jodoh. Citra yang utama ini sangat dipatuhi oleh kerabat keluarga bangsawan, agar darah mereka tidak turun. Ini merupakan salah satu faktor adanya kecenderungan orang tua mengawinkan anaknya dengan kerabat mereka sendiri.
2. **Paddissengenna**, apakah mereka berasal dari orang cerdas pandai, pada masa lalu kebanyakan dilihat pengetahuan agamanya.
3. **Pekerjaan**, ini hanya merupakan pelengkap dari kedua citra diatas, karena pada masa lalu pekerjaan itu tidak bervariasi.

Hiraki citra tersebut di atas telah mengalami perubahan. yakni :

1. **Pangkat**, yang menjadi faktor utama dalam pemilihan jodoh pada saat ini adalah melihat dari pangkat seseorang, yang berkaitan dengan pangkat ini adalah tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar kesempatan dan peluang untuk diterima dari berbagai stratifikasi sosial, sehingga pada saat ini telah banyak yang terjadi perkawinan antara orang biasa yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dengan kalangan keluarga bangsawan. Kasus seperti ini disebut "*melli dara*" (membeli darah). Gejala seperti ini semakin meningkat dan keturunan mereka nantinya berhak menggunakan gelar kebangsawanan, misalnya *Andi* atau *Baso*. Indikasi seperti ini akan semakin mempersempit stratifikasi sosial masyarakat. Karena sudah banyak orang-orang biasa masuk dalam lingkungan kerabat arung (bangsawan), yang pada masa lalu dianggap tertutup bahkan dianggap penghinaan bagi kaum

bangsawan bila dilamar oleh orang-orang biasa yang biasa disebut "*dee nasitongko bakue*".

2. **Pekerjaan**, hal ini juga berpengaruh dalam pemilihan jodoh, tentunya berkaitan juga dengan pangkat, tetapi walaupun tingkat pendidikan mereka tidak terlalu tinggi tetapi mereka mempunyai pekerjaan yang layak, dalam hal ini sangat berpengaruh dalam pemilihan jodoh. Pekerjaan ini sangat terkait dengan kemampuan ekonomi seseorang. Bagi mereka yang punya kemampuan ekonomi yang tinggi akan dapat membeli darah. Peluang bagi seorang laki-laki dari keturunan orang biasa untuk mengawini kerabat bangsawan. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan uang belanja semakin tinggi, karena biasa kerabat keluarga orang biasa yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat ada kecenderungan untuk menikah dengan kerabat keluarga orang-orang bangsawan. Dan biasa bangsawan ini akan menjual darahnya (*mabalu darah*) melalui uang belanja, dan berbagai material lainnya yang harus dipenuhi agar mereka dapat diterima oleh kerabat bangsawan. Gejala ini semakin meningkat pula dalam masyarakat, orang-orang biasa berkeinginan untuk membeli darah. Garis keturunan mereka nantinya akan berhak menggunakan gelar Andi atau Baso. Jual beli darah ini akan mempengaruhi juga stratifikasi sosial dalam masyarakat yang dapat semakin mempersempit variasi stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat, karena orang-orang biasa sudah banyak yang masuk dalam kerabat orang-orang bangsawan.

Dengan munculnya gejala ini, maka kharisma kaum kerabat bangsawan semakin memudar, namun masih ada kerabat bangsawan yang ingin mempertahankan status quo mereka, tetapi semakin sulit dipertahankan akibat pengaruh “pendidikan” dan “dorongan ekonomi yang kuat yang dimiliki oleh orang-orang biasa”.

3. *Onrona*, pada saat ini bukan suatu kriteria utama untuk diterimanya seorang laki-laki, namun masih tetap menjadi kriteria dalam citra pemilihan jodoh.

Hubungan Sistem Perkawinan dengan Sistem Kekerabatan

Dan Perubahannya

Sistem perkawinan masyarakat Bugis bangsa Paria di masa lalu bersifat “endogami” dan dianggap perkawinan ideal karena ada beberapa pertimbangan, yakni :

1. Ada keinginan untuk mempertahankan stratifikasi sosial mereka, penganut ini berasal dari lapisan sosial yang tinggi atau kalangan arung, terutama bagi mereka yang memiliki jabatan dalam pemerintahan. Tindakan seperti ini merupakan suatu momen untuk mempertahankan status quo mereka. Karena pada masa lalu keturunan atau warisan darah merupakan suatu syarat untuk memerintah “*ri tana Paria* (di tanah Paria), apakah mereka sebagai kepala Kampong atau sebagai Arung Paria. Dan hal ini merupakan syarat utama sebagai suatu upaya untuk melanggengkan kekuasaan mereka.

2. Adanya keinginan orang tua agar harta mereka tetap berada dalam kerabat mereka sendiri, agar tidak jatuh dalam kerabat lain. Hal ini merupakan suatu indikasi yang dapat melanggengkan kekayaan para bangsawan karena dari kedua belah pihak membawa harga warisan orang tuanya.

Dalam sistem perkawinan masyarakat Bugis di Paria selalu berakitan dengan harta warisan, karena garis keturunan mereka akan mempunyai hak waris, baik laki-laki maupun perempuan, dalam masyarakat biasa disebut "*mana*". Ini merupakan suatu indikasi adanya kecenderungan masyarakat menganut sistem perkawinan yang bersifat endogami.

3. Menghindari terjadinya penolakan, karena penolakan dalam pelamaran merupakan suatu hal yang sangat memalukan yang dianggap sebagai "*siri*" (sangat memalukan) sebagai pandangan hidup (Abidin, 1983 : 46). Bila terjadi siri maka penyelesaiannya adalah "*cappa kawali*" (=ujung badik).

Ketiga faktor di atas maka yang dianggap perkawinan yang ideal adalah :

1. *Siala massapposiseng*, ialah kawin antara sepupu sekali. Hubungan seperti ini merupakan perkawinan yang dianggap paling ideal dahulu dikalangan bangsawan tinggi (Raja-Raja) untuk menjaga derajat kermurnian darah. Perkawinan seperti ini disebut *Assilang Marola* (perkawinan yang sesuai).
2. *Siala massappokadua*, ialah perkawinan antara sepupu dua kali, bisa pula disebut *assialanna memeng* yang merupakan bentuk perkawinan yang dianggap baik dan serasi.

3. *Siala massappo ketellu*, adalah perkawinan antara sepupu tiga kali, yang bisa disebut *ipasilorongengi* maksudnya mendekatkan kembali kekerabatan yang agak jauh, bisa pula disebut dalam bahasa Bugis "*ripadeppe-mabelae*".

Perkawinan yang ideal dengan lingkungan kerabat didasarkan karena kedudukan "*sikapukeng*" maksudnya mempunyai hubungan sejajar (horizontal) karena kedudukan sosial yang setaraf yang bisa disebut "*si tongko bakue*" dengan tujuan untuk memperkokoh kedudukan dengan memperkuat hubungan kekerabatan.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis di Paria adalah bersifat "bilateral", yaitu garis keturunan setiap individu diperhitungkan dari kedua orang tuanya baik dari bapak maupun dari ibu. Dalam konteks sosial masyarakat Bugis Paria mengenal anggota kerabat masing-masing dengan istilah "*seajing*".

Satuan kekerabatan yang disebut *seajing* terbagai dalam dua kelompok menurut jauh dekatnya pertalian darah antara sesama kerabat. Pertama, kelompok keluarga dekat yang disebut "*siajing macawe*". Kedua, kelompok keluarga jauh yang disebut "*seajing mabela*". Satuan kekerabatan yang terbentuk melalui ikatan darah atau kelahiran disebut "*sajing sampunglolo*", sedangkan kekerabatan yang terbentuk melalui hubungan perkawinan "*seajing siteppateppang*" atau "*seajing siteppateppangengeng*".

Sistem kekerabatan yang didasarkan atas asas prinsip "bilateral" dalam masyarakat Bugis di Paria mendorong terbentuknya kelompok kekerabatan yang disebut "*seajing sampunglolo pole riinndo*" (kerabat dari pihak ibu didasarkan atas pertalian darah atau kelahiran), dan kelompok kekerabatan yang disebut "*seajing*

samunglolo pole ri ambo" (kerabat dari pihak bapak didasarkan atas pertalian darah atau kelahiran). Berkaitan dengan hal ini, maka secara otomatis anak-anak akan menjadi pewaris atas harta peninggalan bapak maupun pihak ibu. Dan begitu pula kaitannya dengan sistem stratifikasi sosial, masyarakat Bugis Paria mempertahankan prinsip dasar, bahwa status sosial seorang anak adalah diwarisi dari pihak bapak dan ibu, namun pada masa lalu pewarisan status sosial terhadap anak lebih dipengaruhi oleh orang tua laki-laki dibandingkan dengan ibu. Misalnya seorang anak laki-laki bangsawan yang berstatus Andi kawin dengan perempuan dari golongan orang biasa, maka keturunan mereka tetap berhak menggunakan gelar andi, tetapi bila ibunya strata orang biasa, sedangkan bapaknya bergelar Andi, maka anaknya hanya berhak menggunakan gelar "Baso" bila anaknya laki-laki, bila perempuan hanya menggunakan gelar "Besse". Tapi pada saat ini pewarisan status sosial dari orang tua sudah sama baik dari bapak maupun dari ibu. Jika bapak berstatus Andi anaknya berhak menggunakan gelar Andi, walaupun ibunya orang biasa, begitu pula sebaliknya, jika ibunya berstatus Andi, maka anaknya berhak menggunakan gelar Andi walaupun orang tua laki-lakinya orang biasa.

Untuk lebih jelasnya uraian di atas, akan diuraikan secara rinci sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis di Paria atas dasar "*siajing sampunglolo*" atau didasarkan atas pertalian darah dan "*seijing sitemppangeng*" atau karena perkawinan, sebagai berikut :

a. Seijing sampunglolo adalah :

- *Indo-riale* (Ibu kandung Ego)
- *Ambbo-riale* (Bapak kandung Ego)
- *Kajao-riale* (Ibu kandung bapak/ibu Ego)
- *Toak-riale* (Bapak kandung dari bapak/ibu Ego)
- *Anak darah* (Saudara-saudara perempuan sekandung Ego)
- *Padaoran* (Saudara-saudara laki-laki sekandung Ego)
- *Anak-riale* (Anak kandung dari Ego)
- *Anaure-riale* (Anak kandung dari saudara-saudara laki-laki/perempuan Ego)
- *Eppo-riale* (Anak-anak kandung dari anak Ego)
- *Amaure-riale* (Saudara-saudara kandung laki-laki dari Bapak/Ibu Ego)
- *Inaure-riale* (Saudara-saudara kandung perempuan/bapak Ego)

Seajing sampunglolo merupakan suatu dogma dalam masyarakat, bahwa kerabat ini merupakan incest yang biasa disebut "*temmakkulle-sipaile*"

b. Seajing siteppang adalah :

- *Baine* (Istri Ego)
- *Lakkai* (Suami Ego)
- *Matoa-riale* (Ibu/bapak kandung dari Ego)

- *Ipak anak burane* (Saudara kandung laki-laki istri Ego)
- *Ipak padamakkunrai* (Saudara kandung perempuan istri Ego)
- *Baiseng* (Ibu/bapak kandung perempuan istri Ego)
- *Manettu-riale* (Istri/suami anak-anak kandung Ego)

Seajing sitempang terjadi karena akibat perkawinan, baik keluarga istri maupun suami telah masuk dalam rumpun kekerabatan. Seajing sitempang tidak secara keseluruhan merupakan incest. Misalnya ipak padamakkunrai dan ipak padaburane, bisa saja terjadi perkawinan. Bila seorang laki-laki yang meninggal istrinya, mereka boleh saja mengawini ipak makkunrainna, begitu pula sebaliknya, bila seorang perempuan meninggal suaminya, maka boleh saja kawin dengan ipak burenena, ini disebut "*matola angkangulung*".

Hubungan sistem kekerabatan dengan sistem perkawinan sudah jelas dalam uraian di atas, bahwa dengan terjadinya perkawinan antara satu individu dengan individu lainnya akan berpengaruh dalam kelompok kerabat. Hal ini terlihat pada terbentuknya kekerabatan (sejing) baru.

Kekerabatan yang terbentuk atas dasar perkawinan (seijing siteppeng) dan terbentuknya kekerabatan atas dasar pertalian darah (seajing sampunglolo) akan berpengaruh kedalam kedua kelompok kerabat, baik dari kelompok kerabat laki-laki maupun kelompok kerabat perempuan, karena masyarakat menganut sistem bilateral.

Dengan sistem kekerabatan yang bersifat sistem bilateral, maka masyarakat cenderung menganut "sistem endogami", karena akan mempengaruhi kekuatan

sosial dari kedua belah pihak, baik kerabat dari laki-laki maupun dari perempuan. Akibatnya ada kecenderungan untuk kawin dengan kelompok kerabat sendiri yang dianggapnya sebagai perkawinan yang ideal, semakin dekat dengan kekerabatannya semakin dianggap perkawinan ideal. Yang dimaksud endogami dalam masyarakat adalah perkawinan antara keluarga dekat, yakni sepupu sederajat satu keluarga, sepupu sederajat kedua dan sepupu sederajat ketiga.

Asas tersebut di atas akan dapat melanggengkan kekuatan sosial pada kelompok kerabat para bangsawan dengan perkawinan sistem bilateral, akan berpengaruh terhadap pewarisan, baik pewarisan atas harga pusaka (*mana warang-parang*), maupun warisan stratifikasi sosial (*mana abbijang*) dari kedua belah pihak. Selanjutnya hubungan harta warisan atas dasar perkawinan, akan berpengaruh pada kedua kelompok kerabat yang bersatu, maupun terhadap anak-anak mereka. Pewarisan strata sosial terhadap anak-anaknya, bila seorang ayah berstatus Andi, sedangkan ibunya berstatus orang biasa, maka berubah kelas sosial yang diwarisi anak-anaknya, hanya dapat mempergunakan gelar "Baso" atau "Besse". Namun pada saat ini kekuatan pewarisan strata sosial sudah dianggap sama. Bila seorang ayah berstatus Andi sedangkan ibunya dari kelas orang biasa (Tau sama), pewarisan itu tetap bergelar Andi, sebaliknya bila ibunya berstatus Andi sedangkan Bapaknya berstatus orang biasa, maka pewarisan darah terhadap anaknya tetap berhak menggunakan gelar Andi, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan, baik informan dari strata orang biasa maupun stratifikasi kerabat bangsawan. Namun salah satu informan menganggapnya baru merupakan suatu

gejala. Drs. Pananrangi Hamid, sebagai Kepala Balai Penelitian Kajian Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa apakah dalam masyarakat kita sudah dapat menerima kekuatan sosial itu pada porsi yang sama bila kedua orang tuanya berstatus bangsawan, dibanding jika hanya salah satunya, begitu pula bila ibu yang berstatus Andi. Apa yang dikemukakan Pananrangi Hamid, dalam kalangan masyarakat Bugis Paria sudah merupakan suatu hal yang empiris, bahwa setiap masyarakat yang kawin dengan seorang bangsawan, status kebangsawanan itu akan ikut diwariskan pada garis keturunannya. Indikasi ini semakin mempersempit gap stratifikasi pada masyarakat Bugis Paria, karena semakin melebarnya peluang memasuki kekerabatan para bangsawan (eksogami). Diskriminasi tentang pewarisan strata sosial dan kekuatan ekonomi tidak dikuasai lagi oleh para bangsawan. Demikian pula distribusi kekuasaan sudah terbuka, kerabat orang biasapun sudah berpeluang untuk sebagai elit lokal dalam masyarakat. Ini disebabkan karena para bangsawan tidak mampu lagi mempertahankan status quo mereka, akibat adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan dan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh kerabat orang biasa. Yang dimaksud eksogami adalah perkawinan yang bukan lagi kerabat keluarga dekat, tetapi memasuki kerabat keluarga lain.

Berkaitan dengan fenomena di atas, adanya suatu gejala yang muncul dalam masyarakat dengan terjadinya perkawinan antara kerabat orang biasa dengan kerabat kaum bangsawan akan terjadi pergeseran status terhadap orang biasa. Misalnya saja, bila seorang laki-laki yang berstatus orang biasa kawin dengan berstatus Andi, maka

suami tersebut akan diangkat stratifikasinya dengan bergelar “Baso”, indikasi ini semakin memperkuat terjadinya perubahan kekuatan sosial dalam masyarakat Bugis Paria, atau semakin mempersempitnya gap sosial yang ada baik stratifikasi sosial atas dasar keturunan maupun kekuatan ekonomi yang didalamnya dikuasai oleh para kerabat bangsawan.

B. Tahap Prosesi Perkawinan dan Perubahannya

Dalam sub bab ini akan dibahas serta dianalisis tentang makna simbol-simbol dan aturan yang berlaku dalam prosesi perkawinan pada masa lalu dan perubahannya. Tahap prosesi perkawinan melalui tiga tahap, yakni (1) Tahap prosesi sebelum perkawinan, (2) Tahap prosesi dalam perkawinan dan (3) Tahap prosesi sesudah perkawinan. Sebelum membahas tiga tahap prosesi tersebut terlebih awal akan dibahas bentuk-bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat.

Bentuk-Bentuk Perkawinan

Dalam suatu komunitas masyarakat lokal terdapat berbagai bentuk-bentuk perkawinan, seperti halnya yang telah dikemukakan pada hasil penelitian yang dikemukakan pada latar belakang.

Adapun bentuk perkawinan yang terjadi di daerah Bugis termasuk Bugis Paria adalah :

1. Perkawinan melalui peminangan.
2. Perkawinan yang tidak melalui prosedur yang umum.

Perkawinan melalui peminangan inilah yang termasuk urusan keluarga, sedangkan yang tidak melalui peminangan hanya merupakan kesepakatan antara sang laki-laki dengan si gadis yang saling mencintai.

Perkawinan yang tidak melalui dengan prosedur yang umum bisa disebut **silariang** atau kawin lari, hal ini selalu menimbulkan kegoncangan antara keluarga si gadis dan keluarga pemuda yang melarikan gadis itu, sehingga sering menimbulkan apa yang disebut "**siri**" (=malu). Biasanya bagi orang Bugis yang terkena siri penyelesaiannya "**di ujung badik**" atau hanya dengan nyawa, kecuali bila laki-laki yang membawa lari gadis tersebut telah berada dalam rumah atau pekarangan anggota adat (pemuka masyarakat). Dengan demikian berarti mereka sudah ada dalam perlindungan, maka mereka tidak diganggu lagi. Dalam hal ini Imam atau Kandhi berkewajiban segera menikahkan kedua insan yang silariang tadi.

Sebab-sebab terjadinya silariang adalah :

1. Karena si gadis sudah mempunyai dambaan hati dengan seorang lelaki, lalu ia akan dikawinkan dengan seseorang yang tidak dicintainya dan merupakan suatu paksaan baginya.
2. Keduanya telah saling mencintai akan tetapi si lelaki tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan pihak keluarga perempuan.
3. Karena perbedaan stratifikasi sosial (derajat) antara gadis dan pemuda, sedang keduanya telah saling mencintai. Mereka sadari walaupun sang pemuda akan melamar, tetapi lamarannya pasti tidak akan diterima.

Selain silariang, ada pula yang disebut “*nilariang*”. Nilariang berarti “dilarikan”, si laki-laki secara paksa membawa si gadis ke rumah penghulu adat (Imam atau Kandhi) meminta perlindungan untuk dinikahkan.

Sebab-sebab terjadinya nilariang adalah :

1. Pinangan ditolak oleh pihak keluarga perempuan, sedangkan mereka dalam hubungan “sama derajat” (*siratang*). Penolakan pinangan dianggap sebagai suatu penghinaan besar bagi yang meminang, sehingga si lelaki nekad dan memperlihatkan kekuatannya dengan maksud menutupi aib yang terjadi pada keluarganya.
2. Penghinaan langsung dari gadis yang bersangkutan, misalnya si gadis meludah tanda benci sewaktu dipandang oleh si lelaki.

Selain silariang dan nilariang dikenal pula “*erangkale*”, artinya membawa diri. Perkawinan ini terjadi karena perempuan itu sendiri datang pada pihak lelaki untuk meminta dikawini atau kerumah penghulu adat untuk minta dikawini dengan lelaki yang tertentu yang dipilihnya.

Sebab-sebab terjadinya “*erangkale*” adalah :

1. Karena si gadis telah mengadakan hubungan rahasia, sehingga ia hamil atau dituduh mengadakan hubungan gelap dengan seorang lelaki. Sehingga tidak ada jalan lain baginya kecuali mendatangi si lelaki tadi untuk dikawini.
2. Menghindari kawin paksa, sehingga si gadis mendatangi pemuda idamannya untuk minta dikawini.

Untuk memperbaiki semua macam perkawinan di atas, maka masih ada kesempatan bagi kedua insan yang bersangkutan melalui acara minta damai. Mereka dapat minta bantuan kepada penghulu adat tempat meminta perlindungan dulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan kembali untuk berdamai, maka dapat dirayakan kembali perkawinannya, dan semua kembali jadi baik lagi. Namun bagi orang Bugis Paria perlakuan tersebut dianggap aib sampai kepada keturunannya akan menjadi beban bagi mereka, sehingga hal tersebut sangat jarang terjadi (Nurhani Sapada, 1985 : 12-13).

Dari dua macam bentuk perkawinan di atas yang melalui tahapan secara normatif adalah perkawinan yang dilakukan melalui peminangan, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

Upacara Sebelum Perkawinan

Sebelum dilaksanakan prosesi perkawinan atau pernikahan akan dilakukan berbagai kegiatan atau prosesi yang mengandung berbagai makna, yakni :

1. Pemberian tahu orang tua kepada anak laki-lakinya yang sudah dewasa.

Menanyakan kepada anak laki-lakinya yang sudah dewasa tentang maksud orang tua mengawinkan anaknya (*pabbainei ana'na*), karena secara adat yang melamar adalah pihak keluarga laki-laki. Dalam hal mengungkapkan keinginan orang tua untuk mengawinkan anaknya dipergunakan bahasa sindiran, misalnya dengan kata-kata "*maloppono baco*" arti ungkapan ini adalah nanda sudah dewasa. nanda sudah dapat mengatur rumah tangga sendiri. Jawaban sindiran ini

bila sang anak bersedia untuk kawin maka mereka menjawabnya dengan kata-kata "*idimuaha*" artinya mereka menerima tawaran tersebut. Dengan demikian mereka menentukan perempuan mana yang akan dipinang melalui perundingan kedua orang tua.

Pada masa lalu yang menentukan jodoh adalah orang tua, jadi pemuda tidak mengetahui perempuan yang akan dikawininya, dan masyarakat Bugis termasuk Bugis Paria yang dianggap perkawinan ideal adalah perkawinan dengan kerabat dekat (*seajing macawe*). Seperti apa yang dikemukakan oleh seorang informan penelitian bahwa :

Informan penelitian bernama Andi Bugda berumur 55 tahun, berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) bekerja sebagai Lurah Limpomajang. Beliau mengemukakan bahwa pada masa lalu yang menentukan jodoh adalah orang tua, jadi kita hanya menurut perempuan mana yang dipilihkan oleh orang tua kita. Ditambahkan bahwa orang tua biasanya lebih senang memilih rumpun keluarga sendiri, seperti dengan orang tua saya, termasuk saya sendiri.

Alasan biasanya memilih dengan rumpun keluarga, karena : (1) Sudah dapat mengenal dengan baik stratifikasi sosial yang akan dijadikan sebagai istri anaknya. Pada masyarakat ini cenderung kawin dengan stratifikasi sosial yang sama. bila mereka melamar stratifikasi sosial yang tinggi biasanya mereka akan ditolak. Untuk menghindari penolakan, maka mereka lebih cenderung memilih lingkungan kerabat. Penolakan dianggap aib yang sangat besar, bahkan penolakan dapat mengorbankan nyawa kedua belah pihak dan penyelesaiannya biasanya di "ujung badik". (2) Masyarakat berpandangan secara material bahwa bila mengawinkan anaknya dengan lingkungan kerabat, maka harta mereka tidak

keluar dalam rumpun keluarga orang lain. Perkawinan terkait dengan pewarisan, sehingga masyarakat Bugis Paria pada masa lalu sepertinya hanya satu rumpun keluarga, hal ini terlihat pada soal pewarisan. Seperti apa yang dikemukakan oleh seorang informan penelitian :

Informan penelitian Pawelleri Daeng Manrafi berumur 57 tahun, berpendidikan Sekolah Rakyat (SR), bekerja sebagai syara' (Iman). Kalau ada yang mengaku dirinya sebagai orang Paria asli, maka pasti ada hubungan tali temali (rumpun keluarga) dengan masyarakat Paria, dan dapat dipastikan orang tersebut mempunyai warisan sawah di Paria ini.

Agar status quo dapat bertahan, utamanya kerabat bangsawan pada tahap pertama ini telah mengalami perubahan, yang lebih banyak menentukan perjodohan adalah pemuda yang sudah menganggap dirinya sudah mampu untuk berumah tangga. Dan mereka lebih banyak saling mengenal baru mereka melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dianggap ideal pada masa lalu sudah dianggap tidak ideal lagi, bahkan sudah banyak menganggapnya suatu hal yang kurang menguntungkan bila mengawini rumpun keluarganya sendiri, dan dianggapnya suatu hal yang ketinggalan zaman. Seperti penuturan seorang informan penelitian :

Informan penelitian bernama Drs. Haji Mansur berumur 64 tahun, berpendidikan sarjana bekerja sebagai Pensiunan Penilik Olahraga Dikbud Kecamatan Majauleng Paria. Beliau mengatakan bahwa anak saya tidak ada lagi yang kawin dengan keluarganya (seajinna), mereka memilih sendiri perempuan yang dikawininya. Jadi bukan saya yang memilihkan perempuan yang akan dikawininya, dan bahkan ada yang kawin dengan orang dari luar Kabupaten Wajo. Anak-anak sekarang sudah bebas memilih jodoh, tidak sama dengan zaman dulu seperti saya. Saya ditentukan oleh orang tua saya dan tidak mengenal perempuan yang akan saya kawini. Jadi istri saya ini masih keluarga saya sendiri.

Pada masa lalu perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan dengan kerabat keluarga (seajing). Hal ini sudah diuraikan pada bab terdahulu, yang dikemukakan oleh Mattulada. Hal ini juga telah dijelaskan oleh **Pabittei**, bahwa :

Sebagaimana orang Makasar dalam pemilihan jodoh lebih diutamakan lingkungan kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu demikian pula halnya pada orang Bugis. Akan tetapi kalau tidak dapat pasangan yang lebih cocok, maka dipilih dari lingkungan luar yang bukan kerabat, bahkan keluar kampung atau daerah. Kalau orang Makasar *Kasiratangan* (sederajat) merupakan pertimbangan yang harus menjadi perhatian atau pertimbangan yang penting dalam pemilihan pasangan bahkan merupakan prinsip, maka orang Bugis ialah sekapuk (sepadan) dan wajar dalam hukum perkawinan. Hubungan yang dianggap tidak wajar ialah yang disebut “tessikapu” atau dianggap “de nasitongko bakue” artinya mereka tidak sederajat.

Pandangan di atas sangat dipegang oleh masyarakat Bugis Paria pada masa lalu, namun pada masa kini pandangan ini sangat berubah sudah banyak yang kawin dengan rumpun keluarga dari luar dan kawin dengan strata yang berbeda, terpenting pihak laki-laki mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi. Pihak laki-laki sekarang sudah tidak ragu lagi untuk meminang perempuan yang mempunyai strata yang lebih tinggi dari stratifikasi mereka, dan bukan lagi merupakan aib yang luar biasa bila mereka ditolak.

Sebagai kesimpulan, bahwa pemberitahuan kepada anak laki-lakinya yang sudah dewasa dengan menggunakan kata-kata sindiran seperti yang disebutkan di atas sudah ditinggalkan. Bila seorang anak laki-laki sudah dewasa yang merasa berkeinginan menjalankan bahtera rumah tangga, maka mereka langsung mengutarakan maksudnya pada orang tuanya, atau orang tuanya secara langsung menyampaikannya tanpa kata-kata sindiran lagi. Dan jodoh lebih banyak ditentukan oleh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, orang tua tinggal menyetujui, atau orang tua mengadakan rembuk dengan anak.

2. Mappesek-pesek

Mappesek-pesek atau bisa disebut "*mabbalawo calle*", artinya tahap penyelidikan terhadap perempuan yang akan dipinang, tahap ini bisa juga disebut "*mattiro*". Yang perlu diselidiki asal usul keturunan si gadis, bagaimana sifat, watak, dan rupanya, apakah si gadis itu bertunangan atau belum dan apakah terdapat kemungkinan lamaran dapat diterima oleh pihak orang tua si gadis atau tidak.

Cara yang dilakukan pada tahap mappesek-pesek adalah dengan mengirim perempuan kepercayaan yang pandai bersikap pura-pura bertandang dan kalau perlu bermalam di rumah gadis itu. Pada kesempatan inilah perempuan kepercayaan itu mulai melakukan perannya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan si gadis yang ingin dipinang.

Untuk mengetahui apakah perempuan yang akan dipinang sudah bertunangan atau belum, maka duta tadi harus lihai dapat mengeluarkan kata-

kata sindiran agar orang tua perempuan tidak mengetahui atau menyinggung perasaan, sehingga orang yang diutus melakukan mabbalawo ceile adalah orang yang biasa melakukan pekerjaan ini. Kata-kata yang biasa diutarakan untuk mengetahui perempuan yang akan dipinang adalah mengajukan pertanyaan dengan bahasa sindiran kepada pihak orang tua perempuan. Biasanya disampaikan kepada ibu dari yang akan dipinang, hal ini dipandang lebih etis. Kata-kata yang biasa digunakan adalah "*malopponiro anakku*" (=anak saya sudah dewasa), "*wedditoniro mabbatang tau*" (=sudah dapat berdiri sendiri=berumah tangga), tapi "*naulle engkano taroi anakku?*" (=tapi kemungkinan sudah bertunangan anak saya ?). Bila sudah bertunangan maka dijawab dengan kata-kata "*anak taro engkano taroi*" (anak kita sudah bertunangan), dan bila belum maka mereka menjawabnya "*niga taro tau maelo ko tau kasi asie namadongo*" (=siapa jua yang mau pada orang miskin lagi sangat bodoh).

Utusan tersebut tidak mutlak keluarga dari pihak laki-laki yang mengutusnya, tetapi orang yang banyak tahu tentang pihak atau keluarga perempuan tersebut dan biasa melakukan kegiatan mappesek-pesek. Dan tidak mutlak pula mencari informasi kepada orang tua si gadis, tetapi ada kalanya hanya pada kerabat perempuan, tetapi yang dianggap lebih ideal adalah mencari informasi tentang keberadaan si gadis itu pada neneknya.

Bila utusan atau duta tersebut mendapatkan informasi tentang status atau keberadaan si gadis yang akan dipinang, maka utusan tersebut kembali menyampaikan kepada orang tua laki-laki yang mengutus mereka.

Pada tahap mappesek-pesek (=mammanuk-manuk) sudah ditinggalkan pada masa kini, karena muda mudi sudah saling mengenal baru mereka melangsungkan perkawinan, walaupun tidak saling kenal akan dilakukan perundingan secara terbuka. Informan penelitian mengemukakan bahwa :

Informan penelitian Drs. H. Palippui berumur 72 tahun, berpendidikan Sarjana lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bekerja sebagai Dosen Puang Rimanggalatung Senggkang Kabupaten Wajo, juga sebagai Ketua Kebudayaan Kabupaten Wajo, dan juga sebagai Pensiunan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan. Beliau berpendapat bahwa pada saat ini, mammanuk-manuk=mabalawo celek=mappesek-pesek sudah ditinggalkan masyarakat Paria, ini disebabkan karena anak-anak sekarang sudah saling mengenali baru mereka sepakat untuk menikah, dan peminangan sekarang sudah terbuka. Orang yang dilamar tidak merasa tersinggung bila langsung memberitahukan keinginannya untuk meminang anaknya. *Naiya makukue nak ade ade riloe maegana taroba, nasabarie nabaroba afa modereni makukue, naiya anak-anake naikuti saman moderenge, inappa ta anaknek'e maegana matanre sikolana* (Jaman sekarang ini nak, adat-adat pada masa lalu sudah banyak yang mengalami perubahan, yang menyebabkan perubahan adalah terjadinya modernisasi, anak-anak sekarang mengikuti era modernisasi, lalu anak-anak sekarang sudah semakin tinggi tingkat pendidikannya).

3. Madduta

Maduta artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran kepada pihak yang akan dipinang. Utusan ini mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam melakukan lamaran orang harus berhati-hati dan bijaksana, harus pandai membawa diri agar orang tua si gadis itu tidak merasa tersinggung. Kedatangan **To-Madduta** (orang yang dikirim melakukan peminangan) ini ke rumah orang tua si gadis setelah terlebih dahulu memberikan kabar agar orang tua si gadis

bersedia menerimanya. Pada dasarnya madduta meliputi dua tahap, yaitu (1) mengutus orang kepada pihak orang tua perempuan untuk bersedia menerima lamaran secara resmi, jadi pada tahap pertama ini belum melakukan lamaran secara resmi, hanya menyampaikan maksud orang yang mengutus bahwa pihak laki-laki yang mengutusnya akan datang melamar. Bila pihak perempuan memberikan jalan, maka mereka meminta waktu kapan bersedia menerima duta resmi (=duta *mallino*) setelah diberikan waktu, maka duta tersebut kembali menyampaikan kesediaan pihak perempuan untuk menerima duta ini, dan (2) duta *mallino* (=duta resmi), yakni orang yang diutus secara resmi melakukan lamaran kepada pihak perempuan yang akan dipinang. Orang yang biasa diutus melakukan duta *mallino* adalah orang yang biasa melakukan kegiatan ini. Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam melakukan lamaran secara resmi (=duta *mallino*) harus berhati-hati agar tidak tersinggung orang tua si gadis.

Duta ini disebut *mallino* atau utusan resmi karena mereka langsung berhadapan dengan orang tua atau wakil dari orang tua si gadis yang akan dilamar.

Bahasa yang dipergunakan *To-madduta*, lebih banyak dipergunakan bahasa kiasan atau berupa pantun. Beberapa dialog antara *To-madduta* (utusan) dan *To-riaddutai* (pihak yang dilamar) yang biasa diungkapkan pada pertemuan utusan atau wakil dari kedua keluarga, yaitu :

To-madduta : *Duami kuala sappo*
Unggana Panasae
Belo-beloan kanukue

- To-madduta* : *Iaro bunga rositta*
Tepu tabbaka toni
Engkaga sappona
- To-riaddutai* : *Degga pasak riliputta*
Balanca rikamponta
Mulanca mabela
- To-madduta* : *Engka pasa riliputta*
Balanca rikampotta
Naekai nyawami kusappa
- To-riaddutai* : *Iganaro elo ribungatta*
Bunga tammadaunge
Bunga temmattakkewe
- To-madduta* : *Taroni tammaddaung*
Tarotoni temmattakkek
Belo-beloan temmalatek

Secara bebas diterjemahkan maksudnya sebagai berikut :

- To-madduta* : Dengan hati yang jujur dan suci, murni datang dari kami membawa berita bahagia menyampaikan niat suci kami.
- To-madduta* : Kembang ros ini cukup mekar sudah, apakah belum ada yang menyimpannya ?
- To-riaddutai* : Apakah tak ada gadis di negeri Tuan, sehingga jauh tuan mencarinya ?
- To-madduta* : Ada juga gadis cantik di negeri kami, tetapi bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi pekerti yang baik.
- To-riaddutai* : Siapa yang ingin memetik anak kami, anak yang belum tahu apa-apa.
- To-madduta* : Biarlah tak tahu apa-apa, karena perhiasan yang tak kunjung laju, akan kujadikan pelita hidupku.

Setelah pihak wanita mendengarkan niat suci dari to-madduta maka dengan segala kerendahan hatinya berkata : *“Ko makkoitu adatta, sorokni tanggakka, nakutangnga tokki”*. Artinya bila demikian tekad tuan kembalilah tuan, pelajjarilah saya dan saya mempelajari tuang (Pabettei, 1995 : 63-64).

Dengan kalimat-kalimat to-riaddutai seperti di atas, maka pihak to-maddutai merasa dibukakan jalan untuk diterima, maka mereka meminta jawaban kapan mereka kembali untuk mengetahui kepastiannya. Setelah mereka diberikan waktu untuk kembali mengetahui kepastiannya, maka pihak to-madduta kembali menyampaikan kepada pihak yang mengutus.

Acara madduta sampai pada saat ini masih dilakukan masyarakat Paria. Namun prosedur dan teknik pelaksanaannya sudah berubah. Pelaksanaan madduta dilakukan secara terbuka, tanpa bahasa kiasan lagi dan pada tahap pertama madduta sudah ditinggalkan, langsung diadakan madduta mallino. Orang yang diutus madduta bukan lagi orang-orang yang mengerti tentang pantun-pantung yang dipergunakan dalam madduta.

Perubahan lain yang terjadi dalam proses madduta, dimana proses penyampaian maksud kedatangan madduta pihak laki-laki disampaikan lebih awal oleh perempuan yang akan dipinang karena biasanya mereka saling mengenal, barulah pihak laki-laki menyampaikan kedatangannya untuk madduta kepada orang tua perempuan. Dan pada saat ini mereka langsung mengadakan duta mallino. Bila tidak saling mengenal lebih awal, maka proses madduta masih melalui proses awal dalam madduta, karena biasanya orang tua

perempuan atau wakil orang tua perempuan meminta waktu untuk menanyakan kepada anak perempuannya yang dipinang. Apakah mereka bersedia menerima pinangan To-madduta tadi. Bila pinangan tersebut diterima baru disampaikan pada acara madduta mallino, begitupun bila mereka menolaknya. Jadi perempuan pada masa kini sudah dapat menentukan pilihan jodohnya, tidak lagi seperti pada masa lalu. Seperti yang dikutip dari pendapat seorang informan :

Informan penelitian bernama Indo Esse, tidak tamat Sekolah Rakyat (SR). Beliau mengatakan anak-anak sekarang sudah bebas menentukan pilihannya. Namo makkuraie (termasuk perempuan) bebas menentukan pilihannya. Tidak sama seperti orang-orang dulu yang ditentukan oleh orang tuanya. Jadi sekarang bila anak perempuan kita dipinang tanpa melalui perkenalan lebih awal, tanpa kita harus menanyakan apakah mereka siap menerimanya atau tidak. Karena bisa terjadi bila pinangan diterima tanpa sepengetahuan perempuan yang dipinang akan terjadi perceraian.

Acara madduta di Paria tetap dilaksanakan, walupun teknik dan prosedurnya sudah banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya adanya peminangan dengan sistem keterbukaan dan tidak lagi terjadi pembatasan jodoh seperti masa lalu.

4. *Mappasiarekeng* (=pemutus kata)

Mappasiarekeng yang biasa juga disebut "*mappettu ada*", merupakan utusan pihak laki-laki yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pakaian adat yang dipimpin oleh orang yang dianggap berpengaruh dari pihak kerabat laki-laki. Laki-laki menggunakan jas tertutup sedangkan perempuan menggunakan waju bolong (baju hitam).

Hal-hal yang perlu diputuskan dalam acara mappasiarekeng adalah sebagai berikut :

- a. **Tanra esso** (penentuan hari)
- b. **Balanca** (belanja)
- c. **Somapa** (mask kawin)
- d. **Jumlah bosara** (banyaknya bosara)
- e. **Alukalu** (pemberian khusus dari pihak laki-laki)
- f. Penggunaan alat-alat dan orang dalam acara pelaksanaan perkawinan yang antara lain :
 - f.1. **Passeppi** (orang yang mengapit pengantin)
 - f.2. **Pattapong-tapong**
 - f.3. dan lain-lain yang menyangkut masalah ritual dan penggunaan simbol yang melambangkan terjadinya perbedaan dalam pelapisan masyarakat Paria.

Untuk mengenal dengan baik tentang perkawinan adat Paria, akan diuraikan lebih rinci.

Tanra Esso

Kedua belah pihak menentukan hari yang dianggap baik (*esso makanja'e*) dalam pelaksanaan perkawinan (pernikahan). Masyarakat Bugis Paria mempunyai suatu kepercayaan bahwa ada hari-hari yang baik atau bulan-bulan yang dianggap baik untuk melangsungkan acara pernikahan. Bila kedua belah pihak sulit mendapatkan atau menetapkan hari yang dianggap baik, maka cara yang terbaik

menurut mereka adalah meminta petunjuk kepada pemangku adat (=petta *kampong*=kepala kampung). Karena semua persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan lewat pemangku adat maka pemangku adat dalam memimpin masyarakat pada masa lalu sangat kharismatik. Orang-orang yang diangkat sebagai pemangku adat adalah keturunan bangsawan (arung) yang bergelar "*puang*".

Namun ada saat ini istilah tanra esso atau bulan-bulan yang baik sudah tidak diperhatikan lagi, namun sebagian masyarakat masih sering mencari bulan-bulan yang dianggap baik. Tetapi mencari hari-hari yang dianggap baik sudah ditinggalkan masyarakat. Ada beberapa penyebab sehingga tanra esso sudah ditinggalkan masyarakat, yakni antara lain :

1. Dengan masuknya Agama Islam, maka mitos tentang tanra esso lambat laun masyarakat tidak meyakinkannya lagi.
2. Masyarakat telah disibukkan dengan berbagai jenis pekerjaan sehingga pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu. Masyarakat telah banyak menghargai waktu.

Seperti penuturan seorang informan:

Informan penelitian bernama Baso Rustam berumur 59 tahun berpendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), bekerja sebagai pegawai Dikbud Kecamatan Masauleng di Paria, beliau juga sebagai tokoh masyarakat yang banyak terlibat dalam prosesi perkawinan. Beliau mengatakan bahwa sekarang masyarakat semakin menghargai waktu, karena berbagai kesibukan mereka. Tidak sama dengan masyarakat kita pada masa lalu yang tidak terlalu sibuk.

Pekerjaan masyarakat pada masa lalu hanya sebagai petani padi sawah yang tidak disibukkan dengan pekerjaan lain. Dan waktu pesta perkawinan pada masa lalu memakan waktu yang cukup lama, biasanya dua bulan atau tiga bulan, ini karena kurangnya kesibukan mereka.

3. Masyarakat sudah lebih banyak bertindak ekonomis. Bila menentukan waktu yang terlalu lama, maka berbagai kesibukan mereka ditinggalkan, dan dapat memakan biaya yang terlalu besar, karena tamu-tamu dan kerabat keluarga berdatangan.

Kembali dijelaskan bahwa, latar belakang masyarakat pada masa lalu meyakini mitos tentang hari yang dianggap baik (tanra esso) bermakna agar orang yang akan memasuki bahtera rumah tangga dapat selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dan dapat mempunyai rejeki yang baik. Termasuk pula keselamatan calon pengantin dan keluarga pengantin.

Dengan perubahan di atas maka fungsi pemangku adat atau sekarang disebut kepala kampung, tidak difungsikan lagi dalam meramal mitos tentang hari-hari yang dianggap baik dalam menentukan waktu yang dianggap baik dalam melaksanakan pernikahan (perkawinan).

Tidak disangkal lagi bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang menentukan bulan-bulan yang baik menurut mereka. Namun masyarakat yang masih meyakini hal tersebut adalah mereka yang kurang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan.

Yang masih tetap menjadi kepercayaan masyarakat Bugis di Paria, yakni kesepakatan tentang pelaksanaan akad nikah. Pada umumnya mereka secepat pada

pukul 11.00 sampai pukul 12.00 waktu setempat. Saat tersebut bertepatan dengan mulainya matahari bergerak mencapai puncak. Makna waktu akad nikah yang dihubungkan dengan bergeraknya matahari ke puncak adalah adanya harapan kiranya kedua mempelai senantiasa mendapatkan Rahmat dari Yang Maha Kuasa dan Rezkinya semakin hari semakin baik. Dalam bahasa Bugis waktu tersebut, disebut "*ri wettu enrek-enrekenna essoe*" (=waktu naik matahari ke puncak).

Balanca (Belanja)

Uang belanja yang merupakan biaya dalam pesta perkawinan yang harus diserahkan kepada pihak perempuan. Uang belanja termasuk salah satu faktor diterima tidaknya suatu lamaran. Namun pada masa lalu uang belanja ini bukan merupakan suatu hal yang dapat menjadi kendala diterimnya seorang laki-laki, karena uang naik pada masa lalu tidak terlalu besar. Pada prinsipnya uang naik bukanlah merupakan kebanggaan terhadap perempuan yang dipinang. Tapi pada masa kini uang naik sudah sangat tinggi seperti penutupan seorang informan bernama Haji Muhamad Said Daeng Parenring. Beliau mengatakan bahwa uang naik sekarang sudah mahal. Jumlah uang naik sekarang sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Uang belanja pada saat ini dapat pula dijadikan sebagai suatu cara untuk menolak secara halus pinangan seseorang dengan permintaan pihak perempuan yang diperkirakan si pelamar tidak mampu untuk menyanggupinya. Atau bisa terjadi uang belanja tersebut dapat disanggupi oleh pihak laki-laki, namun karena dirinya terlalu dipandang rendah, maka mereka mundur. Terkadang pula uang naik

dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui kesungguhan pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota kerabat keluarga. Sehingga pihak perempuan meminta uang belanja yang agak tinggi. Bila hal tersebut mereka penuhi, berarti suatu indikasi kepada pihak perempuan bahwa pihak laki-laki bersungguh-sungguh untuk menjadi anggota keluarga mereka.

Balanca (belanja) dapat berupa uang tunai secara keseluruhan, tetapi dapat pula sebagian berupa harta benda misalnya berupa sawah, kebun dan sebagainya yang dapat dinilai sejumlah uang belanja yang diminta oleh pihak perempuan. Belanja yang bukan merupakan uang tunai disebut *monro rigalunggi sipolo* (artinya tinggal di sawah sebagian), sedangkan uang tunai yang diserahkan langsung pihak laki-laki disebut *monro rijalik i sipolo*, artinya tinggal di tikar sebagian. Yang dimaksud di tikar berupa uang tunai diserahkan pihak laki-laki di atas tikar. *Jalik* = tikar yang dibuat dari rotan.

Balanca yang berupa sawah merupakan hak mutlak perempuan yang dinikahnya, tidak dapat diminta kembali sang suami, terkecuali istrinya meninggalkannya atau berbuat serong. Atau dapat pula terjadi istrinya sendiri yang mengembalikannya sebagai alat untuk minta diceraikan.

Namun belanja pada saat ini yang berupa sawah atau kebun sudah jarang terjadi karena sawah yang dimiliki warga masyarakat semakin sempit akibat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan banyak elit ekonomi dari kota yang menguasai tanah di Paria. Uang belanja lebih banyak berupa uang tunai yang diserahkan, namun istilah *majjali* masih tetap dipergunakan. Uang yang diserahkan

tentunya bukan lagi di atas tikar seperti pada masa lalu. Masyarakat tidak ada lagi yang mempergunakan tikar dari rotan, sekarang telah diganti dengan ambal. Namun sampai pada saat ini penyerahan uang belanja tetap dalam keadaan melantai. Uang belanja merupakan suatu simbol tentang kebangsawanan seseorang. Semakin tinggi stratifikasi seseorang, semakin besar jumlah uang belanja yang mereka inginkan, agar kebangsawanan mereka lebih nampak.

Pada masa lalu jarang sekali terjadi perkawinan antara stratifikasi sosial kelas bangsawan dengan kelas orang biasa. Namun pada masa kini perkawinan tersebut sudah banyak terjadi. Yang menjadi ukuran biasanya kemampuan laki-laki secara ekonomi, disinilah peran simbol uang belanja mengalami perubahan. Semakin tinggi tingkat kemampuan ekonomi seorang laki-laki, semakin ada kecenderungan untuk kawin dengan stratifikasi sosial yang tinggi dan kecenderungan untuk diterima oleh pihak perempuan yang mempunyai kelas sosial yang lebih tinggi. Pada masa lalu yang menjadi ukuran pertama diterimanya seorang laki-laki adalah tingkat stratifikasi sosial mereka, terkadang tingkat ekonomi seorang laki-laki tinggi tetapi stratifikasi sosial mereka lebih rendah daripada pihak perempuan yang dipinangnya, maka kemungkinan besar akan terjadi penolakan. Bahkan pada masa kini sudah banyak keturunan kelas orang biasa yang ingin kawin dengan kelas “puang”, ini karena kemampuan ekonomi mereka sudah tinggi. Dan pada saat ini sudah banyak kelas bangsawan mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah. Prinsipnya pada masa sekarang ini sudah banyak warga masyarakat yang

mengawini kelas sosial yang lebih tinggi (*melli dara*). Ini karena kekuatan ekonomi sudah sangat berpengaruh pada masyarakat Bugis Paria.

Belanja (*doi menrek*), sudah mempunyai pergeseran nilai, yang merupakan suatu kekuatan bertindak dalam masyarakat dan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, karena tindakan masyarakat sudah lebih banyak yang bersifat ekonomi. Individu atau masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi akan mempunyai penghargaan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Posisi kelas bangsawan yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi sudah cenderung menerima kelas orang biasa yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. gejala ini sudah banyak yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan :

Informan penelitian bernama Abdul Syukur Daeng Makkatu 71 tahun berpendidikan tidak tamat Sekolah Rakyat (SR). Beliau mengutarakan bahwa pada saat ini kekuatan ekonomi sudah sangat berpengaruh dalam kaitannya dengan diterimanya seorang laki-laki terhadap perempuan yang dipinang. Sudah banyak yang terjadi, orang yang mempunyai kekuatan ekonomi kawin dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Dan ada kecenderungan kelas bangsawan menerima laki-laki yang mempunyai kekuatan ekonomi yang tinggi. Hal ini sudah banyak terjadi dalam masyarakat Paria.

Kekuatan ekonomi pada masyarakat ini, dapat merubah kekuatan-kekuatan lainnya terkhusus pula pengaruhnya terhadap stratifikasi sosial seseorang. Berkaitan dengan hal ini Marx berkesimpulan, bahwa bila Jerman ingin lebih maju, kritik-kritik filsafat harus disempurnakan oleh pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan materi yang senantiasa berubah dan perubahan ini tidak semata-mata berlangsung pada tingkat gagasan-gagasan (Marx dan Giddens, 1986 : XVI).

Bosara (Tempat Kue)

Bosara merupakan suatu budaya material yang dipergunakan dalam adat perkawinan Bugis. Bosara mempunyai makna dalam pelapisan sosial masyarakat. Masyarakat dengan stratifikasi sosial yang lebih tinggi akan mempergunakan jumlah bosara lebih banyak dibanding dengan stratifikasi sosial yang rendah.

Jumlah bosara bagi masyarakat Bugis menunjukkan suatu simbol makna strata sosial seseorang. Khusus untuk Bugis Paria mempunyai perbedaan tentang jumlah bosara yang dipergunakan dalam adat perkawinannya. Untuk pelapisan sosial yang tertinggi (arung dan anak karung) jumlah bosara yang dipergunakan sebanyak 24 buah, sedangkan untuk kelas orang merdeka dan orang biasa menggunakan 12 buah, dan bagi golongan ata tidak mempergunakan bosara.

Namun simbol bosara ini telah mengalami pergeseran nilai pada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi biasanya telah mempergunakan jumlah bosara 24 buah, walaupun strata sosialnya golongan orang biasa atau merdeka.

Seperti dikemukakan oleh seorang informan bahwa :

Informan penelitian bernama H. Muhammad Amin, berumur 50 tahun berpendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), bekerja sebagai perias pengantin (*Indok Bonting=Pajjaka Botting*). Beliau mengutarakan bahwa penetapan jumlah bosara pada saat ini sudah mengalami perubahan. *Tau biasae yaregatau maradeka* (=orang biasa atau orang merdeka) sudah sering mempergunakan 24 bosara yang biasa disebut dalam bahasa Bugis *duang akkareng* (=dua lusin). Orang biasa atau orang merdeka yang biasa melakukan atau mempergunakan jumlah bosara 24 buah adalah orang-orang yang mampu. Tapi pada masa lalu hal ini tidak pernah terjadi dalam masyarakat Bugis Paria.

Bila stratifikasi sosial *To-madeceng yarega To-Maredeka* (orang biasa atau orang merdeka) menggunakan bosara lebih dari 12 buah maka penghulu adat (*Pattae Kampong* = Kepala Kampung) langsung menegur mereka. Jadi masyarakat tidak ada yang melanggar terhadap peraturan penggunaan jumlah bosara.

Pada prinsipnya bosara pada masa lalu merupakan simbol status sosial seseorang, sehingga pada waktu maduta malinino hal ini harus disepakati, karena hal ini dapat menjadi pertengkaran dalam acara perkawinan nantinya.

Sompa

Sompa atau mahar berbeda-beda bagi setiap masyarakat Bugis. Dan menurut adat besarnya sompa ditentukan oleh tingkatan stratifikasi (pelapisan) dalam masyarakat. Khusus untuk masyarakat Bugis Bone, Wajo, Soppeng diatur oleh adat sebagai berikut :

1. *Sompa BoccoE* diberikan kepada raja-raja perempuan (Bone, Wajo, Soppeng) yang memegang kekuasaan sejumlah 14 kali *doi riolo* (uang lama). Nilai satu kati sama dengan 88 real + 8 orang + 8 doi diserahkan bersama seorang ata dan seekor kerbau.
2. *Sompa anak boccoE* diberikan kepada putri-putri darah penuh dari ketiga *Raja TellupoccoE* atau bangsawan tinggi lainnya sejumlah 7 kati doi riolo.
3. *Sompa kati* diberikan kepada putri-putri anak mattola. Jumlah satu kati dai lama atau 88 real + 8 orang + doi. Bersama ini seorang ata kecuali di Wajo ata ditiadakan.

4. *Sompa anak rajeng*, untuk anak-anak Rajeng hanya berlaku di Wajo jumlah maharnya 2 kati doi lama.
5. *Sompa cerek sawi*, untuk putri-putri cerek sawi kira-kira sama dengan putri-putri anak arung sipue (Bone) jumlah maharnya 1 kati doi lama.
6. *Sompa tau deceng*, untuk putri-putri tau maradeka golongan tau deceng jumlah maharnya ½ doi lama.
7. *Sompa tau samak*, untuk putri-putri tau maradeka atau golongan tau samak jumlah maharnya 1/4 kati doi lama (Pabettei, 1995 : 65-66).

Khusus masyarakat Bugis di Paria mempunyai ciri khas dengan daerah Bugis lainnya tentang besarnya sompa yang dipergunakan pada setiap stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Bahkan Kabupaten Wajo sendiri yang sudah bersatu dengan Kelurahan Paria pada tahun 1905 berbeda penggunaan jumlah sompa. Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang informan tentang penggunaan jumlah sompa pelapisan masyarakat Bugis Paria sebagai berikut :

Informan penelitian bernama Syamsuddin berumur 62 tahun berpendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 162 Paria dan juga sering dijadikan informan tentang stratifikasi (pelapisan) sosial pada masyarakat Bugis di Paria. Beliau mengutarakan bahwa penggunaan jumlah sompa pada masyarakat Bugis di Paria berbeda dengan daerah-daerah lainnya karena Paria merupakan bekas wilayah kerajaan walaupun pada saat ini sudah bersatu dengan Kabupaten Wajo akibat kalah perang dengan kerajaan Wajo pada masa lalu. Penggunaan *sompa* berbeda pada setiap *onrona taue* (=strata seseorang), yakni :

1. *Arung Paria* (=Raja Paria) sampai pada keturunannya yang ada sekarang, besar *sompa* atau *tadangeng sompa* (=dihitung dengan luas sawah) sebesar 44 real (biasanya dinilai dengan sawah 1 (satu) hektar). Jadi paria bangsawannya tidak mempergunakan *sompa kati* (88 real) seperti pada desa-desa lainnya di Kabupaten Wajo.

2. Biasanya dibawah *To-Maradeka* (=orang biasa atau orang merdeka), besar sompanya 24 real (biasanya sekitar ½ hektar sawah).
3. *To-Mahuang* (orang yang stratifikasi sosialnya menurun akibat orang tuanya kawin dengan stratifikasi sosial yang rendah), besar sompanya 14 real (biasanya sekitar 2 are).

Sompa sudah merupakan syarat atau sudah menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menyerahkan kepada pihak perempuan pada saat melakukan perkawinan (pernikahan). Tentunya tidak ada tawar menawar pada saat madduta mallino karena sudah merupakan kewajiban, hal inilah yang membedakan dengan belanja, dimana belanja dapat dilakukan tawar menawar pada saat madduta mallino.

Pada saat ini sompa atau mahar tidak mengalami perubahan yang berarti, karena sudah menjadi kewajiban. Namun yang biasanya berubah adalah luas sawah yang diserahkan kepada perempuan. Bangsawan yang tidak mempunyai kemampuan 1 (satu) hektar sawah mungkin yang diserahkan tidak cukup lagi satu hektar tapi masih tetap disebut *patapulo eppa rella* (44 real). Istilah rella sama dengan real yang dipergunakan dengan ukuran mata uang Arab Saudi, karena sompa berlaku setelah masuknya agama Islam di Paria pada saat pemerintahan La Singkarupatona Sultan Abdul Rachman (1610) sebagai Arung Matoa (Raja yang berkuasa di Wajo, sebelum masuknya Belanda pada tahun 1503). Dan simbol yang wajib harus diserahkan adalah seperangkat alat sholat.

Alukalu

Alukalu merupakan pemberian khusus kepada pihak perempuan yang perlu disepakai pada waktu madduta mallino atau pada saat mappasiarekeng. Pemberian tersebut berupa simbol atau budaya material, antara lain :

1. Kain kasa 2 pis yang berwarna merah keseluruhan atau berwarna putih keseluruhan, bisa juga 1 berwarna merah, 1 berwarna putih. Pemberian ini tidak berlaku untuk semua tingkatan stratifikasi (pelapisan) sosial yang ada dalam masyarakat. Yang menggunakan simbol material ini hanya untuk para kerabat bangsawan. Makna simbol atau budaya material ini merupakan lambang kesediaan dan keikhlasan serta ketulusan yang suci dari pihak laki-laki untuk bersedia masuk ke dalam lingkungan kerabat perempuan.
2. *Cabelo-cabello*, yaitu pemberian berupa pakaian lengkap kepada pihak perempuan yang terdiri dari 12 macam, yakni :
 - Kelambu 2 buah
 - Pakaian kebaya 2 buah
 - Sarung batik 2 buah
 - BH 2 buah
 - Sandal atau sepatu 2 pasang
 - Cermin 2 buah
 - Alat kosmetik ditambah secukupnya sehingga menjadi 12 macam.

Makna dari alukalu ini merupakan suatu simbol bahwa laki-laki sudah mampu untuk membelanjai istrinya. Pemberian dengan jumlah 2 pasang hanya

diberikan kepada kalangan bangsawan. Untuk orang biasa hanya diberikan 1 pasang yang terdiri dari 12 macam.

3. *Pappa Duppa*

Pappa duppa merupakan pemberian pihak perempuan yang berupa pakaian lengkap kepada laki-laki, yakni :

- 1 stel jas
- 1 buah sarung sutra
- 1 buah kemeja berwarna putih
- 1 buah celana dalam
- 1 buah kopiah (songkok hitam)
- 1 buah sandal atau sepatu

Makna pappa duppa merupakan simbol penghormatan kepada suaminya. Pappa duppa dipergunakan atau diserahkan pada waktu selesainya acara duduk bersanding di rumah perempuan dan pakaian inilah yang dipakai oleh suami.

4. *Pattampa*

Pattampa merupakan pemberian pihak laki-laki yang berupa sawah, kerbau dan 1 (satu) stel emas (gelang, cincin, kalung, anting-anting), beras dan pohon kelapa. Luasnya sawah tergantung pada kesepakatan pada saat madduta mallino atau mapasiarekeng. Namun biasanya perempuan yang akan dikawini dari kalangan bangsawan bisa permintaannya agak luas. Untuk kerbau biasanya 2 ekor jantan dan 1 ekor betina. Untuk 1 stel emas ini beratnya tergantung dari kesepakatan. Khusus untuk cincin jumlahnya harus tiga buah, karena harus

diserahkan pada waktu yang berbeda. Satu buah diserahkan pada saat selesai mappasiarekeng dengan makna bahwa perempuan yang dilamar sudah diikat. Satu buah diserahkan pada saat selesai nikah (**nikka**), dengan makna sudah sah sebagai suami istri. Satu buah pada saat kunjungan pertama perempuan kepada keluarga laki-laki dengan makna diterimanya dengan baik perempuan tersebut kepada keluarga laki-laki. Banyaknya beras tergantung dari kesepakatan mereka, sedangkan jumlah pohon kelapa biasanya dua buah dengan makna, bahwa kelapa rasanya enak, sehingga pengantin tersebut mengalami perjalanan hidup yang baik (enak).

Perubahan tentang pola atau struktur pengadaan alukalu masih tetap berlaku bagi masyarakat Bugis Paria. Yang berubah hanya bentuk material yang diserahkan, misalnya pohon kelapa biasanya sudah ditiadakan, begitupun kerbau dan beras. Namun bentuk alukalu yang lainnya masih tetap ada. Biasanya bentuk simbol atau budaya material diganti dengan emas dan terkadang dimasukkan pada uang belanja.

Pada saat ini alukalu sudah mengalami perubahan bentuk. Misalnya laki-laki tidak memiliki tanah atau sawah atau tidak mau menyerahkan sawahnya maka dapat disepakati berupa emas. Dan pada saat ini besarnya alukalu yang diserahkan sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi sang laki-laki. Bahkan pada saat ini ada yang menyerahkan rumah.

Pemberian alukalu ini merupakan hak mutlak perempuan. Bila terjadi perceraian maka alukalu tersebut menjadi milik perempuan.

Kesepakatan Penggunaan Alat-Alat dan Orang-Orang Yang Dipergunakan Pada Hari Perkawinan

Ada beberapa simbol material yang dipergunakan pada hari upacara pelaksanaan perkawinan. Simbol ini perlu disepakati pada waktu madduta mallino atau mappasiarekeng, karena merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan perkawinan adat yang ada di Paria.

Alat-alat yang dipergunakan antara lain :

1. **Paseppi**, yakni orang yang mengapit pengantin, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Paseppi ini terdiri dari :
 - Anak botting, anak-anak yang mengapit pengantin laki-laki dan perempuan. Pengantin perempuan diapit oleh anak botting perempuan, sedangkan pengantin laki-laki diapit oleh anak botting laki-laki. Anak botting bisa juga disebut **balibotting**. Pakaian yang digunakan adalah pakaian adat, sama dengan pakaian pengantin.
 - Jumlah anak botting berbeda bagi setiap stratifikasi sosial, untuk keluarga bangsawan mempergunakan anak botting 8 (delapan orang), pengantin laki-laki diapit oleh 4 (empat) orang. Untuk kalangan To-biasa hanya mempergunakan 2 (dua) orang. 1 (satu) orang yang mengapit pengantin laki-laki dan 1 (satu) orang yang mengapit pengantin perempuan. Namun pada saat ini jumlah anak botting tidak menjadi suatu norma lagi, baik kalangan arung (bangsawan) maupun orang biasa.

2. **Indo Botting**, orang tua yang mengapit pengantin laki-laki dan perempuan. Jumlah Indo Botting berjumlah 4 (empat) orang. Dua orang yang mengapit pengantin laki-laki dan dua orang yang mengapit pengantin perempuan. Yang mempergunakan Indo Botting hanya kalangan bangsawan. Namun pada saat ini sudah jarang mempergunakan Indo Botting, karena Indo Botting ini adalah keturunan ata (hamba). Pada saat ini kalangan keturunan ata kebanyakan sudah tidak mau lagi dijadikan Indo Botting. Dan istilah ata di Paria sudah hilang, karena keturunan ini sudah banyak yang mempunyai kekuatan ekonomi, bahkan ada yang lebih mampu dibanding dengan keturunan raja-raja, sehingga sudah sangat sulit untuk mendapatkan Indo Botting. Seperti penuturan seorang informan penelitian :

Informan penelitian bernama Drs. Andi Arifai berumur 43 tahun berpendidikan sarjana bekerja sebagai Lurah Paria (pemangku adat). Beliau mengatakan bahwa pada saat ini sudah susah untuk mendapatkan Indo Botting, karena sudah jarang sekali yang bersedia lagi jadi Indo Botting, ini disebabkan karena sudah tidak ada lagi yang mengaku sebagai keturunan ata. Apalagi saat sudah banyak yang mempunyai kekuatan ekonomi yang tinggi dibanding dengan kita-kita ini. Bahkan bisa kita mengaku pada orang-orang yang pernah kita jadikan ata sebagai keluarga sendiri.

3. **Patapong-tapong**

Patapong-tapong merupakan orang-orang yang mengapit pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, yang terdiri dari :

- Pembawa cerek 1 (satu) orang, dengan berpakaian putih-putih.
- Pembawa ota-otang (=tempat sirih) 1 (satu) orang dengan berpakaian putih-putih.

- Pembawa ammiccung (tempat ludah) 2 (dua) orang dengan berpakaian putih-putih.
- Pembawa tombak 1 (satu) orang dengan berpakaian putih-putih.
- Pembawa payung 1 (satu) orang dengan berpakaian adat seperti pakaian pengantin.
- Pembawa lelu (payung yang terdiri dari 4 (empat) tiang) yang dipergunakan pengantin pada waktu masuk di ruang tempat bersanding, 4 (empat) orang dengan berpakaian putih-putih.

Simbol tersebut di atas hanya dipergunakan bagi kalangan bangsawan pada masa lalu, namun pada saat ini sudah jarang yang mempergunakan, karena orang-orang yang bertindak sebagai pembawa pappapong-tapong adalah yang berstratifikasi ata. Sedangkan stratifikasi ata (hamba) pada masyarakat Paria sudah hilang. Pemangku adat yang masih sering ingin mempergunakan simbol-simbol tersebut dalam upaya untuk mempertahankan status quo mereka, maka solusinya adalah menyewa orang-orang miskin dari luar daerah. Dan bila masih ada yang mempergunakan simbol ini, biasanya tidak lengkap lagi seperti yang diuraikan di atas.

4. Hal-hal lain yang biasanya disepakati

Hal-hal lain yang masih perlu disepakati dalam acara mappasiarekeng agar tidak menjadi pertengkaran dari kedua belah pihak dan aib dalam masyarakat berdasarkan adat yang berlaku di Paria antara lain :

- Pakaian adat yang dipergunakan oleh pengantin, bagi golongan arung (bangsawan) warna yang akan dipergunakan adalah hijau, biru, hijau putih, putih biru dan oranye, sedangkan orang biasa mempergunakan warna merah. Pada masa lalu hal ini perlu disepakai karena dapat menjadi celaan dalam masyarakat bila tidak tepat dalam penggunaan warna. Namun pada saat ini sudah sering mempergunakan warna lain dan bahkan sudah sering tidak mempergunakan pakaian adat. Seperti penuturan seorang informan yang mempunyai profesi sebagai perias pengantin :

Informan penelitian bernama H. Muhammad Amin berumur 50 tahun berpendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) bekerja sebagai perias pengantin (Indok Botting=Pajjaka Botting). Beliau mengatakan bahwa pada masa lalu penggunaan pakaian adat pengantin ditentukan warnanya berdasarkan stratifikasi sosial dalam masyarakat, hal ini sudah diatur oleh adat dan harus ditaati oleh masyarakat. Namun pada saat ini sudah mengalami perubahan, biasanya orang memilih warna berdasarkan selera dan tidak ditegur lagi oleh anggota adat seperti masa lalu. Dan bahkan sudah ada yang tidak mempergunakan pakaian adat, yakni laki-lakinya menggunakan stel jas, sedangkan perempuannya mempergunakan pakaian kebaya. Perubahan ini karena semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat Paria, sudah banyak yang berpendidikan tinggi dan banyak yang tinggal di kota-kota.

Hal lain yang perlu disepakai dalam penggunaan pakaian pengantin adalah kesepakatan tentang biaya yang dikeluarkan oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Menurut informan di atas bahwa masalah biaya biasanya mereka bagi 2 (dua), atau ditanggung bersama.

Dengan selesainya prosesi pada tahap acara mappasiarekeng maka pihak duta laki-laki menyerahkan sebuah cincin yang disebut dalam bahasa Bugis "*ciccing passio*" (=cincin pengikat), sebagai simbol kesepakatan.

Sebagai kesimpulan bahwa dalam struktur acara mappasiarekeng dalam adat perkawinan Bugis Paria tetap ada, namun hal-hal yang perlu disepakati tentang simbol-simbol pada masa lalu sudah mengalami perubahan yang besar, namun sebagian juga masyarakat tidak merasakan perubahan-perubahan tersebut. Seperti penuturan seorang informan yang bukan orang asli Paria mengemukakan bahwa :

Informan penelitian bernama Hajjah Siti Nurani berumur 55 tahun berpendidikan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN), bekerja sebagai Guru Madrasah Aliyah Paria. Walaupun beliau bukan keturunan orang asli Paria (keturunan Arab), tetapi beliau banyak mengenal adat istiadat pada masyarakat Bugis Paria, karena sejak kecil mereka sudah berada di Paria dan beliau juga pernah bersuamikan pemangku adat pada salah satu Kampong (lingkungan) di Paria. Dikatakan bahwa adat istiadat di Paria ini masih sangat ketat, tidak sama dengan daerah-daerah lain seperti yang di luar Paria dan Kabupaten lainnya. Contohnya saja tentang sompa yang ada di Paria, tidak boleh orang menggunakan Sopa Kati (88 rella) walaupun mereka berasal dari keturunan bangsawan.

Pandangan informan di atas hanya melihat satu aspek dalam melihat perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan budaya tentunya merupakan hal yang benar, karena dalam teori budaya mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat yang berbudaya terkadang masyarakat di dalamnya tidak merasakan perubahan-perubahan budaya yang terjadi dan bahkan ada masyarakat yang tidak mengenal budayanya sendiri dan terkadang pula berpandangan etnosentris.

Maddupa (Mengundang)

Acara selanjutnya setelah selesai acara mappasiareng, adalah mengedarkan undangan kepada seluruh kerabat dan handai tolan. Perlu dikemukakan bahwa dalam mengedarkan undangan mempunyai suatu ciri tertentu dalam masyarakat Bugis Paria dengan Bugis lainnya, baik jumlah orang maupun waktu mengedarkan undangan.

Pada masa lalu yang diundang adalah haya para kerabat, tidak diundang orang-orang di luar kerabat, namun pada saat ini baik kalangan kerabat maupun orang-orang di luar kerabat, semuanya diundang. Dan undangan pada masa lalu hanya bersifat "lisan", namun sekarang bersifat tulisan karena arus informasi yang ditopang dengan teknologi semakin berkembang yang semakin terimbas ke berbagai belahan dunia dan tidak luput pula merambah ke bagian pelosok pedesaan yang mengakibatkan terkikisnya berbagai kebudayaan atau adat yang ada di pedesaan, termasuk pula berubahnya adat perkawinan yang ada di Paria, yang dulunya sangat memegang adat-istiadatnya "salah satu prinsip yang bersifat etnosentris pada masa lalu adalah *"Naiya To-Pariae To-Maradeka, napusue-suena atau Maradeai adena napusue-suena"* artinya orang Paria adalah negeri merdeka, mereka bebas melaksanakan adatnya dan tidak boleh mengikuti adat dari luar". Walaupun Paria pernah dikalahkan perang oleh Kerajaan Wajo, tetapi Wajo tetap memberikan otonomi, sehingga adat perkawinan yang ada sekarang berbeda dengan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Wajo.

Beberapa aturan-aturan yang berlaku dalam mengedarkan undangan :

1. Waktu mengedarkan, pada masa lalu waktu mengedarkan undangan sudah ditentukan oleh adat, bahwa undangan diedarkan pada saat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pernikahan (pesta perkawinan), namun lambat laun terjadi perubahan diganti menjadi lima hari, hal ini dilakukan dalam upaya efisiensi waktu. Undangan tersebut harus selesai diedarkan dalam satu hari. Namun pada saat ini sebagian sudah berubah dimana untuk undangan yang akan beredar di lingkungan masyarakat Paria diedarkan pada hari ke 5 (lima), tetapi untuk undangan yang diluar lingkungan Paria tidak diatur lagi. Hal ini sudah ada gejala bahwa pada satu saat pengedaran undangan tidak dilakukan lagi satu hari, akibat dari kesibukan orang dalam berbagai tugasnya. Seperti pandangan seorang informan bahwa :

Informan penelitian bernama Umar berumur 56 tahun berpendidikan Sekolah Menengah Pertama bekerja sebagai Pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majauleng di Kelurahan Paria, dan beliau selalu terlibat dalam acara perkawinan untuk mengatur tempat duduk para undangan. Beliau menuturkan bahwa hal yang sangat perlu dirubah dalam prosesi perkawinan di Paria ini adalah waktu mengedarkan undangan terlalu sempit, karena hanya dilakukan satu hari, sehingga terkadang kita kewalahan mengatur orang-orang yang akan berangkat mengedarkan undangan, apalagi kalau tenaga kurang. Jumlah undangan sekarang banyak, tidak sama dulu yang tidak terlalu banyak, karena yang diundang hanya kerabat, tetapi sekarang teman kantor juga diundang. Dan satu hal lagi yang menyulitkan bila secara kebetulan hari itu hujan. Jadi menurut saya hal ini sudah sangat perlu kita rubah agar tidak terlalu sulit dalam mengatur pengedaran undangan. Apalagi orang-orang sekarang serba sibuk.

2. Jumlah orang, pada masa lalu yang mengedarkan undangan berjumlah tujuh orang, karena diedarkan pada hari ketujuh sebelum dilakukan pesta perkawinan (hari H). Kemudian berubah menjadi lima orang, karena diedarkan pada hari kelima sebelum hari H. Dengan jumlah lima orang mereka merasa kesulitan karena sarana yang umum dipergunakan adalah kendaraan roda 2 (dua), sehingga dirubah menjadi 4 (empat) orang. Pada saat undangan diedarkan dengan 7 (tujuh) orang maka jumlah laki-laknya harus 4 (empat) orang dan perempuannya 3 (tiga) orang. Sedangkan pada saat diedarkan undangan dengan 5 (lima) orang, maka laki-laknya harus 3 (tiga) orang dan perempuannya 2 (dua) orang. Dan pada saat ini terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 2, (dua) perempuan.
3. Susunan orang yang diundang, yang pertama diundang adalah pemangku adat, yakni Arung Paria (sederajat dengan Camat) kemudian *Petta Desa* (Kepala Desa), kemudian *Kepala Kampung* (Kepala Kampung) setelah selesai para pemangku adat baru diedarkan kepada semua kerabat dan handai tolan. Namun pada saat ini aturan-aturan tersebut sudah hilang, karena kharisma pemangku adat pada masa lalu sudah berubah. Pada saat ini terkadang bukan lagi keturunan bangsawan yang memegang jabatan Camat dan pemangku adat lainnya.
4. Pakaian, untuk pakaian yang dipergunakan orang-orang yang mengantar undangan untuk perempuan dipergunakan pakaian adat yang disebut "*waju tokko*" (baju bodo) dengan sarung sutera sedangkan laki-laknya menggunakan jas dan sarung sutera dilengkapi dengan songkok hitam. Sampai pada saat ini

belum ada perubahan tentang pakaian yang dipergunakan dalam mengedarkan undangan *appabotingengge ri Paria* (= pengganti di Paria).

Masumpung Bola atau Massarapo

Masumpung atau Massarapo, membuat bangunan tambahan dari rumah. Namun massumpung dan massarapo mempunyai perbedaan. Massumpung hanya menambah bagian tertentu dari rumah, sedangkan massarapo membikin bangunan khusus tapi biasanya masih tetap bersatu dengan rumah.

Pada saat massarapo atau massumpung disini masih tetap terlihat rasa kegotongroyongan masyarakat Paria. Karena orang-orang yang mengerjakan Sumpung atau sarapo ini adalah para tetangga dan para kerabat. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan masumpung atau massarapo yaitu

1. Waktu, massumpung atau massarapo dilakukan pada saat empat hari sebelum acara pelaksanaan pesata perkawinan (pernikahan) atau satu hari setelah selesainya undangan diedarkan. Karena didalamnya undangan tersebut sudah disampaikan juga orang-orang tertentu yang diundang massarapo atau massumpung besoknya. Pada masa lalu summpung atau sarapo dibikin setelah selesai mengundang atau 6 (enam) hari sebelum acara pesta pernikahan dilaksanakan.
2. Bentuk sarapo atau sumpung, pada masa lalu hanya bangsawan yang mempergunakan sarapo. Bagi masyarakat biasa hanya mempergunakan summpung atau bangunan tambahan dari rumah. Namun pada saat ini rata-rata

mempergunakan sarapo karena jumlah undangan sekarang sudah banyak tidak seperti pada masa lalu. Tapi yang membedakan bentuk sarapo orang biasa dengan bangsawan pada saat ini adalah bangunan rumah-rumah (gapura) tempat penjemputan bagian depan, terdapat suatu simbol strata sosial, yaitu dipasang *lawasoji* (anyaman bambu). Pada lapisan bangsawan lawasoji tersebut dipasang 5 (lima) tingkat, sedangkan orang biasa, lawasoji tersebut tersusun 4 (empat) atau 3 (tiga).

3. Pantangan yang merupakan mitos, pada saat mendirikan sarapo harus memotong kambing atau kerbau, hal ini mengandung makna bahwa bila sarapo tidak "*cerak*" (memotong kambing atau kerbau) akan dapat mendatangkan bala atau mara bahaya bagi pengantin dan keluarga pengantin. Keyakinan ini masih tetap berlaku sampai pada saat ini, namun sebagian masyarakat hanya ikut-ikutan melakukan hal tersebut tanpa meyakini mitos tersebut.
4. Alat hias, pada bagian pinggir bangunan ditutup dengan lawasoji sebagai batas bangunan dan pada bagian depan gapura diberikan daun janur. Pada bagian sisinya juga diberikan penutup kain hias yang sudah dirancang oleh *waria* (*calabai*). Untuk bagian tenda diberikan kain penutup (*lamning*) yang juga telah dirancang oleh calabai yang disewa sebagai Indo Botting. Tiang sarapo yang termasuk tiang rumah dibungkus dengan kain hias (*cinde*) yang juga telah dirancang oleh calabai. Simbol-simbol warna ini hanya merupakan aksesoris keindahan untuk ruang pengantin dan para undangan. Alat-alat ini kebanyakan

dimiliki oleh waria (calabai) yang bekerja sebagai perias pengantin atau Indo Botting.

Mappasau

Pasau artinya usaha menjauhkan, jadi mappasau berarti suatu usaha untuk menjauhkan bahaya atau bala. Dalam hal ini memberikan suatu makna agar pada waktu penyelenggaraan perkawinan maupun setelah selesainya pelaksanaan penyelenggaraan perkawinan kedua mempelai dapat mengarungi kehidupan barunya dengan terhindar dari mara bahaya.

Pada dasarnya mappasau (=mandi uap) yang disucikan adalah lahir dan batin. Ada juga yang memaknakan acara mappasau ini sangat penting dan dianggap suatu kegiatan yang sangat sakral yang harus dilakukan untuk melaksanakan perkawinan, hal ini untuk mengusir roh-roh jahat, karena saat pelaksanaan acara pengantin roh-roh jahat akan datang mengganggu para kerabat calon pengantin dan teruma pengantin itu sendiri. Namun di lain sisi bahwa kegiatan mappasau merupakan suatu sarana bagi orang-orang dulu untuk memberikan fisik mereka, karena bahan-bahan yang digunakan untuk memandikan merupakan ramuan yang dapat menghilangkan bau badan. Bahan-bahan tersebut antara lain :

- Daun siri, yang bermakna tidak mendapatkan malu (*siri*).
- Daun sarikaya, yang mengandung makna dapat jadi kaya (*sogi*)
- Daun tebu, agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan manis (*macenning*).
- Daun waru, agar kehidupan mereka dapat rimbun (*sipaka enrekeng dalle*).

- Bunga tersenyum, agar kehidupannya kelak hati mereka selalu merasa senang.
- Bunga cinagori, agar orang selalu merasa senang melihatnya atau terpikat melihatnya.
- Majang pinang, agar di tengah-tengah masyarakat nantinya dapat berdaya guna.

Khusus untuk bahan atau ramuan untuk mengusir roh jahat antara lain :

- Satu gantang (= 4 liter) beras yang sudah digoreng dengan halus
- *Pesse pelleng* (lilin) 2 buah
- Kelapa yang masih utuh 1 biji
- Gula merah 1 biji
- Pala sau pasang 2 buah
- Kayu manis 2 tangkai
- Sirih segar 1 ikat
- Pinang beberapa buah

Selama prosesi mappasau berlangsung kedua lilin atau *pesse pelleng* harus dinyalakan. Khusus untuk daun-daun di atas diikat menjadi satu dan diletakkan didalam kuali dari tanah liat yang berisi air bersih. Daun dan kembang yang telah diikat, kemudian digunakan Indo Botting memercikkan air kepada calon mempelai, dimulai dari kepala, bahu kanan kemudian bahu kiri dan terakhir di bagian punggung. Setelah itu Indo Botting memercikkan air ke arah luar pintu rumah. Maknanya adalah agar semua hal-hal yang tidak baik keluar melalui pintu yang telah dipercikkan air.

Secara fisik, calon pengantin melalui masa pensucian dengan cara mandi uap (mappasau) 2 atau 3 hari, dan bahkan dapat mencapai 7 hari. Adapun perlengkapan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan mappasau, terlebih dahulu dibuatkan suatu tempat yang terbuat dari bambu 4 batang, kemudian dibuat sebuah tempat duduk yang tingginya kurang lebih 1,5 meter yang dilengkapi dengan pintu dan tangga. Sedangkan alas yang ditempati duduk oleh calon pengantin dibuat tidak terlalu rapat sehingga uap air panas akan dapat mengenai calon pengantin yang telah duduk di atasnya dengan berselimut sarung. Ada pula yang menggunakan batang bambu sebagai pipa atau selang untuk mengalirkan uap air kedalam sarung calon pengantin, sehingga bercucuran keluar keringatnya.

Secara fisik mappasau ini dimaksudkan agar calon pengantin akan merasa segar dan bau keringatnya harum seperti harumnya ramuan-ramuan yang direbus dalam kuali (belanga) yang terbuat dari tanah.

Prosesi mappasau ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Bugis Paria. Yang berkaitan dengan acara ritual untuk mengusir roh-roh jahat yang datang pada waktu akan dilakukan acara perkawinan tidak diyakini lagi oleh masyarakat. Mitos ini ditinggalkan oleh masyarakat karena pemahaman tentang agama semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat, seperti pendapat seorang informan bahwa:

Informan penelitian bernama Muhammad Junaid, BA, berumur 41 tahun berpendidikan Sarjana Muda Agama Islam, bekerja sebagai Kepala Sekolah Tsanawiyah Paria dan beliau juga digolongkan sebagai pemangku sara' pada saat ini karena beliau juga bertindak sebagai Imam. Beliau berpendapat bahwa pada saat ini perkembangan pendidikan di Paria semakin berkembang termasuk pengetahuan

agama karena penyiaran gama semakin berkembang baik melalui media elektronik maupun dilakukan melalui program Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo melalui penyebaran santri ke berbagai pelosok desa termasuk Kelurahan Wajo. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin meninggalkan mitos-mitos seperti dalam pelaksanaan upacara mappasau.

Tujuan upacara mappasau ditinggalkan, bila dilihat secara fisik karena masyarakat sekarang mengalami suatu perubahan karena terjadinya modernisasi dalam berbagai bidang termasuk dalam kaitannya dengan perawatan tubuh. Pada masa lalu alat-alat kosmetik belum dikenal oleh masyarakat Paria tetapi setelah terimbas masuk, maka masyarakat menggunakannya termasuk pada saat pelaksanaan acara perkawinan walaupun masih sering mempergunakan Indo Botting (waria) seperti pada masa lalu, tetapi sarana yang dipergunakan merupakan alat kosmetik yang modern.

Pada masa lalu upacara mappasau merupakan suatu struktur yang berlaku dalam masyarakat dan merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang akan melakukan perkawinan, karena dianggapnya suatu hal yang sangat sakral, bila tidak dilaksanakan akan dapat mendatangkan bencana kepada pengantin, namun struktur ini hilang tanpa dibarengi dengan munculnya struktur lain yang menggantikannya.

Macceko

Macceko artinya mencukup rambut-rambut halus yang terdapat di dahi dan dibelakang telinga, agar supaya "*dadasa*" yaitu hiasan hitam pada dahi yang akan dipakai oleh calon pengantin wanita pada waktu dirias dapat melekat dengan baik.

Pada masa lalu apabila kita melihat seorang wanita muda yang ada cukuran pada dahinya, pertanda bahwa mereka adalah pengantin baru. Bagi putri bangsawan upacara *macceko* merupakan acara tersendiri pula. Dalam upacara ini mempergunakan kostum sederhana yang terdiri dari :

- Baju bodo (waju tokko) ukuran panjang warna *bakko* (merah muda).
- *Lipa sabbe* (sarung sutera) warna hijau.
- Perhiasan sederhana seperti : *bangkara* (anting-anting), kalung kote, gelang lola, bunga siboleng dan pinang goyang.

Pelaksanaan prosesi ini dimana calon mempelai didudukkan di atas tikar pandan yang bulat dilengkapi dengan alat kebesaran bagi stratifikasi mereka, seperti :

- *Lellu* (payung yang mempunyai empat tiang) yang dipegang oleh 4 (empat), 6 (enam) atau 8 (delapan) orang tergantung dari lapisan sosial calon pengantin.
- Didampingi *Indo Susunna* yang biasa juga disebut Indo Botting, yaitu orang yang menyusui calon pengantin pada masa kecilnya, mendampingi calon pengantin sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- Dimeriahkan dengan kesenian tradisional, seperti *genrang* (gendang), *gong*, *baliu* (yang mirip dengan seruling) dan alat kesenian lainnya.

Kegiatan *macceko* pada saat ini tidak diupacarakan lagi dan masyarakat juga sudah jarang yang melakukannya, walaupun mereka dari kalangan bangsawan. Yang merias pengantin pada saat ini sudah jarang yang dilakukan oleh waria

sebagai *Indo Botting*. Tetapi sekarang lebih banyak dilakukan oleh tukang-tukang salon yang ada di kota.

Pada masa lalu yang harus mengerjakan *macceko* adalah waria sebagai *Indo Botting* karena dalam pelaksanaan upacara *macceko* bukan hanya sekedar agar rambut-rambut halus tersebut dicukur agar *dadasa* terpasang dengan baik, tetapi pada saat dilakukan *macceko* *Indo Botting* mengucapkan mantra-mantra agar calon pengantin pada saat bersanding kelihatan mempesona. Acara *macceko* hanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan.

Mappacci

Mappacci merupakan suatu struktur pelaksanaan prosesi perkawinan dalam masyarakat Bugis Paria dengan makna agar calon pengantin dalam keadaan suci dalam mengarungi kehidupan barunya. *Pacci* berarti bersih, sehingga masyarakat meyakini bahwa dalam memasuki kehidupan baru perlu dilakukan pembersihan jiwa agar kehidupan nantinya dapat bahagia.

Pacci merupakan sejenis tumbuhan yang dapat dipergunakan dalam upacara mappacci (daun pacar). Pacar ini dipergunakan daun, batang atau bunganya. Pacar pada zaman dahulu selalu ditanam di pekarangan rumah, tetapi pada saat ini sudah mengalami perubahan sehingga susah didapatkan.

Mitos tentang mappacci sangat diyakini masyarakat pada masa lalu, jadi kegiatan mappacci bukan hanya dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan, tetapi orang-orang melakukan mappacci pada bulan Suci Ramadhan menunggu turunnya

Lailatur Qadar. Walaupun hal ini tidak termasuk ajaran Islam, tetapi mereka meyakini bahwa dengan melakukan mappacci dengan memberikan warna merah pada kukunya dianggap sebagai suluh nanti di hari kemudian, sebagai penuntun jalan masuk surga. Ada pula yang beranggapan dengan mappacci merupakan suatu pertanda orang-orang beriman (orang berpuasa). Dengan mappacci dianggap telah mensucikan diri. Namun mitos ini sudah tidak diyakini lagi oleh masyarakat karena pengetahuan mereka tentang agama semakin berkembang, tetapi dalam acara perkawinan sampai saat ini masih sangat banyak masyarakat yang melaksanakan.

Proses upacara mappacci dilakukan dengan menggunakan berbagai simbol atau budaya material, yaitu :

- **Benno**, yakni beras yang digoreng sampai mekar. Hal ini bermakna kiranya calon pengantin dapat berkembang dengan baik, bersih dan jujur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNya. Dalam bahasa Bugis disebut "*mpenno ri alei*".
- **Tai bani**, meruakan endapan madu, bermakna berkaitan dengan tata kehidupan bermasyarakat yang baik, rukun sebagaimana yang sering kita saksikan dalam kehidupan lebah yang tidak saling mengganggu dan selalu bersatu padu. Di samping itu juga tai bani atau *patti* ini dijadikan sebagai suluh penerang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semoga calon pengantin kelak akan dapat jadi suluh atau suri teladan dimanapun mereka berada.
- **Bantal**, seperti yang kita kenal bahwa bantal terbuat dari kapok. Kapas merupakan simbol kemakmuran. Sedang khusus dari pengertian bantal adalah

pengalas kepala yang tentunya berfungsi sebagai penghormatan atau martabet, yang disebut *mappakalebbi*.

- *Sarung*, sarung sebagai penutup aurat yang bermakna sebagai harga diri. Simbol sarung ini juga bermakna ketekunan dan keterampilan. Oleh karena sarung dibuat dari benang helai demi helai disusun, yang pada akhirnya akan menjadi kain atau sarung. Pada masa lalu konon katanya, bahwa mencari jodoh bagi seorang lelaki, wanitanya tak perlu dilihat terlebih dahulu, cukup dilihat hasil tenunannya. Kalau hasilnya rapi, halus dan menarik dari hasil pandangan warna, maka pilihan sudah dapat ditentukan dan dijejaki kemungkinannya.

Adapun jumlah sarung yang harus disusun di atas bantal, yaitu tujuh lembar yang terlipat rapi. Makna dari jumlah ini adalah mirip dengan kata "*tuju*" (yang berarti *matuju laona* inilah yang biasa disebut berhasil guna dan berdaya guna dan terkadang jumlah sarung sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan makna sama di atas. Biasanya orang Bugis meyakini angka ganjil itu merupakan angka keberuntungan. Namun keyakinan itu sudah mulai bergeser, orang menggunakan jumlah itu pada masa sekarang hanya karena aturannya pada masa lalu demikian.

- Pucuk daun pisang, pucuk daun pisang di tanah Bugis disebut "*colli daung otti manurung*" mirip dengan turun temurun. Makna yang tersimpul didalamnya agar calon pengantin dapat hidup berkesinambungan (memiliki keturunan). Karena pisang daun tuanya belum kering betul, maka daun yang muda siap meneruskan hidup. Inilah yang disebut *maccolli maddaung*.

- Daun nangka, dalam bahasa Bugis disebut "*daung panasa*" yang mirip dengan bunyi kata "*minasa*" yang berarti cita-cita luhur. Jadi makna ini mengharapkan kepada kehidupan yang baik dalam kehidupannya nanti.
- Daun pacar, merupakan bahan untuk pemerah kuku. Dalam bahasa latinnya disebut "*lawsonia alba*", dalam bahasa Indonesia disebut "daun pacar", makna ini agar pengantin dengan hati yang ikhlas mengarungi rumah tangganya.

Upacara mappacci dilaksanakan pada saat dilaksanakan malam *tudang penni*, kegiatan dilaksanakan pada malam hari pada saat prosesi perkawinan dilaksanakan besoknya. Yang hadir pada upacara ini adalah seluruh rumpun keluarga dan para kerabat. Namun yang dimohon kesediannya untuk meletakkan atau mencoretkan pacci di telapak tangan calon pengantin jumlahnya terbatas. Menurut aturan berdasarkan adat yang ada dalam masyarakat jumlahnya sembilan orang dari kaum Ibu dan sembilan dari kaum Bapak. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 18 orang *satu delapan*, yang dikenal angka tertinggi dalam masyarakat adalah 9 dan angka ini dianggap angka yang dapat mendatangkan keberuntungan.

Makna lain prosesi mappacci adalah saling memberi dan menerima dan mengambil makna dari undangan yang sempat diberi kesempatan berpartisipasi dalam mappacci. Oleh karena yang diundang mappacci adalah orang-orang yang bersih dan dapat diteladani dan mereka mempunyai keturunan (tidak mandul), hal ini bermakna agar calon pengantin dapat mengikuti orang-orang yang membubuhkan pacci di telapak tangannya.

Prosesi mappacci diselenggarakan dengan prosedur menggunakan berbagai simbol atau budaya material dan budaya ideal. Selain simbol-simbol di atas masih ada satu simbol yang menarik dalam upacara ini, dimana orang yang menjemput mappacci terdiri dari 2 (dua) orang, 1 orang laki-laki dan 1 perempuan dengan berpakaian adat. Penjemput perempuan membawa lilin kemudian mendekati orang-orang yang dianggap dapat melakukan mappacci tanpa mengungkapkan dengan kata-kata. Bila penjemput tersebut singgah di depan undangan dan mengangkat lilin tersebut di depan tamu maka undangan yang bersangkutan sudah mengerti bahwa mereka yang diberi kesempatan untuk membubuhkan pacci pada calon pengantin. Simbol lilin tersebut menandakan orang yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mappacci.

Pada saat ini prosesi mappacci masih banyak yang melaksanakan, namun ada juga yang tidak melaksanakan lagi, hal ini karena mengingat efisiensi biaya, tenaga dan waktu. Seperti pengalaman seorang informan :

Informan bernama A. Wahid Marahong berumur 58 tahun berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan beliau juga pernah kuliah di Universitas Hasanuddin selama 2 semester, bekerja sebagai wiraswasta, sebelum terjun dalam dunia wiraswasta beliau pernah bekerja di Departemen Penerangan Kabupaten Wajo. Beliau sekarang bertempat tinggal di Ujung Pandang. Beliau menuturkan pengalamannya bahwa pada saat ini sudah ada sebagian masyarakat yang tidak melakukan upacara mappacci karena mengingat biaya, tenaga dan waktu mereka terbatas karena sekarang berbagai kesibukan yang harus dilakukan masyarakat. Seperti baru-baru ini saya menghadiri undangan keluarga Drs. Abdul Razak Abdullah, mereka tidak melaksanakan kegiatan mappacci.

Pada dasarnya upacara mappacci sudah mengalami perubahan, baik dari segi makna maupun penggunaan simbol yang mereka gunakan. Dari segi makna, masyarakat yang melakukan hal ini hanya ingin agar terlihat pesta perkawinan anaknya kelihatan meriah yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Dan simbol material yang berubah adalah lilin, pada masa lalu mereka menggunakan tai bani (endapan madu) yang dapat dijadikan lilin. Hal ini karena madu mempunyai makna tersendiri dalam upacara mappacci pada masa lalu.

Tudang Penni

Tudang penni merupakan salah satu rangkaian dalam prosesi perkawinan yang ada di daerah Bugis Paria. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari, yakni pada saat pelaksanaan upacara perkawinan besok harinya. Namun pada masa lalu acara ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

Yang diundang hadir pada upacara tudang penni adalah para kerabat dalam rangka untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan prosesi perkawinan besok harinya. Dan pada saat itulah para kerabat menunjukkan rasa kekeluargaan yang sangat mendalam. Karena pada saat ini para kerabat harus menanggung apa-apa yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan upacara perkawinan besoknya.

Fungsi lain dari upacara tudang penni adalah adanya pertemuan dengan rumpun keluarga, didalam pertemuan inilah biasanya terjadi dialog antara keluarga

tentang keadaan anaknya masing-masing dan para saat inilah antara orang tua saling menjodohkan anak mereka.

Tudang penni bisa pula disebut "*tudang pangadereng*" artinya para pemangku adat dan pemangku sara' hadir pada saat ini. Yang dimaksud pemangku adat pada masa lalu adalah "*Arung Paria*" yang sederajat dengan Camat dan para Kepala Kapung (Kepala Kampong), sedangkan pemangku sara' adalah para petugas yang menangani kegiatan keagamaan, yakni Imam, Hatib dan Bilal.

Undangan yang hadir diatur berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Posisi tempat duduk yang paling depan diisi oleh pemangku adat dan pemangku sara', kemudian disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada.

Dalam acara tudang penni ini, pihak keluarga mempelai mengisi berbagai acara kesenian antara lain :

- *Pakkacapi* (=pemain kecapi)
- *Massure* (=cerita bersambung berisikan nasehat).

Acara-acara tersebut ada kalanya berlangsung hingga menjelang terbitnya fajar di ufuk timur.

Berdasarkan pengamatan observasi partisipasi peneliti dalam suatu acara tudang pangadereng, ternyata sudah mengalami perubahan, utamanya tentang fungsi upacara tudang penni. Malam tudang penni ini tidak lagi berfungsi untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan pada kegiatan pelaksanaan upacara perkawinan besoknya, karena kelengkapan ini sudah dibicarakan pada kegiatan pembentukan panitia.

Undangan yang hadir bukan hanya dari kalangan kerabat tetapi termasuk para kenalan. Dan kehadiran mereka pada malam tudang penni sudah dianggap berpartisipasi atau menghadiri undangan, walaupun tidak mengikuti lagi kegiatan pada upacara perkawinan besoknya.

Fungsi kedua dari malam tudang penni sudah tidak nampak lagi. Para kerabat yang hadir tidak menceritakan lagi tentang anak-anak mereka dalam rangka untuk dijodohkan. Jadi tudang penni sebagai sarana untuk menjodohkan sudah tidak berfungsi lagi. Hilangnya fungsi ini merupakan suatu indikasi bahwa sistem perkawinan dalam masyarakat Bugis di Paria mengalami perubahan, yakni dari sistem tertutup berubah menjadi sistem terbuka. Informan di atas membenarkan hal ini, bahwa anak-anak sekarang lebih terbuka untuk memilih jodoh (eksogami).

Perubahan ini yang terjadi dalam upacara tudang penni adalah waktu pelaksanaannya. Pada masa lalu diadakan sampai 7 (tujuh) hari, namun pada saat ini tinggal satu malam, inipun waktu sudah terbatas. Berdasarkan observasi partisipasi dan wawancara di salah satu kegiatan malam tudang penni, yakni rumah Bapak Syamsuddin ternyata kegiatan ini hanya berlangsung sekitar pukul 19.00 sampai pukul 21.00 waktu setempat (WITA). Hal yang lain yang berubah pada upacara ini adalah alat kesenian yang memeriahkan acara tersebut, dimana sudah menggunakan kesenian yang modern. Alat-alat kesenian yang biasa dipergunakan adalah jenis Benk atau Elektop. Bila menggunakan sarana kesenian semacam ini tentunya harus menyewa dari luar. Sewa dari jenis kesenian ini biayanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun pada masa dahulu

jenis kesenian yang ditampilkan tidak perlu disewa, pada pemain musik tradisional tersebut hanya berpartisipasi meramaikan acara malam tudang penni.

Yang masih tetap bertahan sampai saat ini adalah posisi tempat duduk masih tetap diatur berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Dimana pada posisi terdepan adalah para pemangku adat yang berstatus formal, karena masih ada sebagian keturunan bangsawan yang tetap memegang jabatan formal. Posisi terdepan adalah Camat, Kepala Desa, dan para Kepala Lingkungan, dan posisi terdepan juga masih tetap diisi oleh pemangku sara', yakni Imam, hatib dan bilal dan urutan selanjutnya berdasarkan pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Namun seorang informan melihat adanya gejala, bahwa posisi tempat duduk suatu ketika akan mengalami perubahan, seperti dituturkan sebagai berikut :

Informan penelitian bernama Marhadang, berumur 59 tahun, pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), beliau sebagai Penilik Kebudayaan Kecamatan Majauleng yang berada di Kelurahan Paria dan juga sebagai tenaga pengajar kesenian pada Sekolah Menengah Umum Negeri Paria. Beliau berpendapat bahwa posisi tempat duduk pada suatu ketika akan mengalami perubahan, kalau dulunya yang berkuasa adalah para kerabat bangsawan, namun pada saat ini sudah ada yang memegang jabatan Camat atau Kepala Desa dan Kepala Kampung yang bukan keturunan bangsawan asal Kerajaan Paria. Dan tokoh-tokoh adat juga sudah semakin berkurang karena keturunan bangsawan tersebut sudah banyak yang tidak mendapat legitimasi dari masyarakat, tingkat pendidikan beliau rendah. Ditambahkan pula pengamatan seorang informan yang sudah dikutip informasinya, yaitu A. Wahid Marahong, bahwa malam tudang penni sekarang ini sudah mengalami pergeseran, kalau dulu acara dapat dimulai bila Arung pitue sudah hadir, tetapi pada saat ini walaupun masih ada pemangku adat yang belum hadir tetapi acara tetap dilaksanakan.

Hal lain yang berubah dalam upacara tudang penni adalah wali atau orang tua pengantin yang duduk di bagian terdepan, menghadapi tamu-tamunya, dimana

pada masa lalu yang menerima tamu-tamu hanya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan pengantin atau wali mereka bila orang tua pengantin sudah meninggal, atau merantau. Namun pada saat ini sudah berjumlah 6 (enam) orang, tiga laki-laki dan tiga perempuan, termasuk orang tua pengantin. Orang-orang yang bisa diambil sebagai pendamping adalah keluarga terdekat yang mempunyai pengaruh atau dikenal oleh masyarakat. Dan terkadang pula saudara kandung pengantin yang sudah kawin yang mempunyai kedudukan atau jabatan.

Upacara Perkawinan

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan *Ri Tana Ugi Paria* (di tanah Bugis Paria) ditentukan oleh norma yang berlaku sesuai dengan budaya ideal mereka. Berdasarkan norma yang ada akan dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Nikka* (nikah)

Pelaksanaan hari pernikahan merupakan salah satu kegiatan yang telah disepakai kedua belah pihak ketika masih dalam proses peminangan yang disebut "*ri wettu maddutana*" (pada waktu madduta) dan *pasaat mappasiarekeng (ri wettu mapasiarekenna)*. Pada saat ini penentuan waktu nikah biasanya didasarkan pada penanggalan Islam atau Tahun Hijriah. Selain itu, juga memperhatikan waktu yang meliputi hari, jam dan bulan yang dianggap memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, hal ini sudah diutarakan pada bahasan yang lalu.

Pada saat akan menikah calon mempelai laki-laki tentunya diantar oleh pihak keluarga dan orang-orang yang mengapit pengantin laki-laki di rumah perempuan pada saat duduk bersanding. Pengantar ini antara lain :

- ***Panreulu Botting***, beberapa orang dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki mengantar ke rumah perempuan untuk melakukan akad nikah.
- ***Paseppi***
- ***Patapong-tapong***
- ***Pattiwi Bosara***, yang membawa bosara berpakaian adat (baju bodo).
- ***Pattiwi lawasoji***, pembawa buah-buahan dalam lawasoji.

Pada masa lalu pengantin laki-laki bersama rombongannya tidak semudah itu untuk memasuki gapura pihak perempuan. Karena sebelum memasuki gapura tersebut akan dihadap sekelompok pasukan berkuda dari pihak perempuan untuk menghalangi masuknya rombongan laki-laki. Biasanya pasukan atau penjemput dari pihak perempuan sudah memberikan batas penjemputan. Pada batas itulah mereka dihadap sampai mendekati gapura rumah perempuan. Dan hal ini merupakan suatu perjuangan bagi pihak laki-laki untuk melawan pasukan perempuan untuk memasuki gapura. Pelaksanaan semacam ini merupakan suatu permainan yang pada masa lalu sangat digemari oleh masyarakat. Namun pada masa kini kegiatan ini sudah hilang sama sekali. Kegiatan ini dideskripsikan oleh seorang informan bahwa :

Informan bernama Dr. H. M. Badwi berumur 56 tahun pada saat ini beliau bekerja pada rumah sakit Islam Paisal Ujung Pandang sebagai Kepala Bagian Pelayanan Medis. Pada saat ini beliau tinggal di Ujung Pandang namun masih sering menghadiri upacara

perkawinan di Paria. Beliau bercerita bahwa waktu masa kecil saya di Paria acara mappalu (menahan pasukan calon pengantin laki-laki) sangat menarik, terkadang rombongan laki-laki lama baru bisa masuk pada halaman rumah perempuan. Jadi, rombongan pihak laki-laki agak pagi menuju rumah perempuan, karena mereka khawatir lama baru bisa mengalahkan pihak pasukan perempuan, sedangkan pada saat menikah yang dianggap baik adalah antara jam 11.00 sampai jam 12.00 waktu setempat. Namun acara ini sudah ditinggal oleh masyarakat, pada saat ini transportasi yang dipergunakan oleh masyarakat sudah berbeda dengan jaman dulu, sekarang sudah menggunakan mobil.

Ketika rombongan sudah memasuki halaman rumah calon pengantin perempuan akan dijemput oleh keluarga perempuan (= *Pattajeng Botting*), artinya penunggu kedatangan calon pengantin dan pengantarnya. Sebelum memasuki gapura ada berbagai simbol-simbol yang perlu dilakukan sebelum memasuki gapura. Untuk memasuki gapura maka pengantin laki-laki dipayungi *Lellu* oleh pengantar mereka yang sudah disiapkan. Pada saat memasuki pintu gapura calon pengantin laki-laki dipersilahkan untuk menginjak kepala kerbau, hal ini dilakukan hanya pada keturunan bangsawan. Setelah selesai menginjakkan kakinya pada kepala kerbau yang terdapat dalam lawasoji, kemudian mereka dicuci kakinya dengan cerek emas (*cere ulaweng*) barulah mereka memasuki gapura. Adapun simbol-simbil lain yang melengkapi upacara perkawinan untuk melakukan akad nikah adalah :

- Kain putih bersih (*kain Kaci*), yang dibentangkan mulai dari gerbang atau gapura sampai pada tangga rumah, kain ini dilewati pengantin laki-laki bersama pengantar untuk melaksanakan akad nikah.

- ***Mattudu upasikati***, yaitu memecahkan periuk terbuat dari tanah liat berisikan seekor anak ayam, sebutir telur ayam. Adapun makna yang terkandung didalamnya adalah, melepaskan segala bentuk kesalahan-kesalahan telah pupus dan segera menginjakkan kaki dengan hati bersih dengan kain putih yang telah dibentangkan.
- ***Mallejja tana menroja***, yaitu menginjakkan kaki di atas tanah sebagai tumpuan di tanah pusaka. Maknanya adalah tamu telah diterima dengan segala keikhlasan dengan harapan jalinan kekeluargaan persahabatan ini kekal dan abadi. Simbol ini dapat pula bermakna bahwa calon pengantin laki-laki sudah diterima dengan baik di daerah Paria ini.
- ***Ilawolo***, yaitu pihak pengantin laki-laki memohon untuk ulurkan lawolo yang dipegang meniti tangga rumah "***Mamuare Naengka Lawolo Namakkulle Ri Akkegunang***" (semoga ada uluran Lawolo dari Langit). Kalimat tersebut diulang tiga kali. Lawolo terbuat dari gelang emas yang dikaitkan pada kedua ujung kain yang berwarna warni.

Dari berbagai simbol atau budaya material dan budaya ideal yang berlaku dalam prosesi acara akad nikah dapat memberikan juga suatu indikasi bahwa yang mempergunakan simbol tersebut, hanya keturunan bangsawan. Namun pada saat ini simbol-simbol tersebut sudah jarang yang mempergunakan secara keseluruhan. Perubahan ini disebabkan karena masyarakat senantiasa sudah berpikir efisien baik waktu, tenaga dan biaya. Faktor lain karena masuknya arus informasi melalui berbagai media yang menyebabkan adat ini

semakin terkikis, dan masyarakat Paria mudah melakukan akulturasi karena mereka senang merantau dan menimba ilmu pengetahuan di berbagai kota di Indonesia, bahkan ada yang sampai ke luar negeri, faktor-faktor inilah yang merupakan suatu hubungan atau berkorelasi positif dalam terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat Paria (Soekanto, 1990 : 345-346).

Dengan selesainya berbagai kegiatan di atas maka raja sehari ini dipersilahkan untuk melakukan akad nikah. Sebelum diadakan Ijab-Qabul dihadapan penghulu (Kepala Urusan Agama Kecamatan atau Imam), maka saksi calon mempelai wanita dipersilahkan mendampingi calon pengantin laki-laki melakukan akad nikah.

Sampai pada saat ini yang menikahkan calon pengantin masih tetap penghulu agama kalau sekarang biasanya Kepala Urusan Agama Kecamatan tapi pada masa lalu adalah Imam (kadi), jadi sampai pada saat ini belum pernah dilakukan oleh orang tua calon pengantin. Seperti yang dikatakan informan penelitian :

Informan bernama Drs. Ismail P. berumur 42 tahun berpendidikan Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ujung Pandang. Pada saat ini Beliau sebagai Kepala Urusan Agama di Kecamatan Majauleng di Paria. Beliau menuturkan pengalamannya bahwa sampai pada saat ini yang menikahkan calon pengantin adalah pemuka agama ada di wilayah ini, dan biasanya banyak orang yang mengundang saya untuk menikahkan, disamping itu mereka juga pasti berurusan dengan Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan surat Akte Nikahnya. Dan terkadang pula dinikahkan oleh Imam (sara'). Dan hal ini dibenarkan oleh Informan Drs. M. Zaid Ahmad yang berumur 41 tahun berpendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Aliyah Sengkang Jurusan Akidah Filsafat, pada saat ini beliau sebagai anggota sara' (imam). Beliau mengemukakan bahwa apa yang diinformasikan Pak Ismail itu memang benar. Saya juga sering

diundang oleh masyarakat untuk menikahkan calon pengantin. Dan pada saat ini belum ada calon pengantin yang dinikahkan oleh orang tuanya. Walaupun pada dasarnya itu lebih afdal (baik), tetapi ini kan adat kita yang masih tetap berlaku sampai sekarang. Dan bahkan menganggap lebih afdal (baik) bila dinikahkan oleh anggota sara'.

Dengan selesainya acara nikah maka dilanjutkan acara berikutnya yang disebut *mappasikarawa* atau *mappasirusa*.

2. *Mappasikarawa* atau *mappasirusa*

Mappasikarawa atau massirusa adalah pengantin laki-laki menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin perempuan. Hal ini bermakna bagi kedua mempelai dalam mengarungi kehidupannya di masa datang.

Proses pelaksanaan ini dimana pengantin laki-laki diantar oleh seorang yang sudah biasa melakukan kegiatan ini. Karena orang yang melakukan mappasikarawa memberikan mantra-mantra kepada pengantin pada saat pengantin laki-laki menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan. Namun pada saat pengantin laki-laki akan masuk di kamar perempuan bersama *pappasikarawa* akan dihadap oleh penjaga pintu kamar pengantin perempuan. Pada saat inilah mereka tawar menawar antara pengantar dengan penjaga pintu. Pengantar pengantin laki-laki memberikan uang kepada penjaga pintu tersebut (*pabukka tange*). Setelah transaksi selesai baru mereka diberikan kesempatan *sikarawa*. Orang yang bertugas mappasikarawa tadi memegang tangan pengantin laki-laki dan menyentuh ke tubuh bagian tertentu pengantin perempuan, pada saat inilah pappasikarawa memberikan mantra-mantra.

Bagian-bagian yang biasa disentuh adalah hidung, dahi atau bagian atas dada perempuan. Makna yang terkandung didalamnya adalah agar kedua mempelai dapat hidup rukun atau sehidup semati dan juga dapat bermakna agar dapat hidupnya layak. Tapi pada masa lalu terutama diharapkan agar pengantin cepat rujuk, karena pada masa lalu pengantin tidak saling mengenal. Orang yang sering melakukan kegiatan mappasikarawa di Paria adalah salah seorang informan penelitian bernama Syamsuddin yang sudah dikutip pendapatnya pada bagian terdahulu. Setelah selesainya acara mappasikarawa akan dilanjutkan acara "*Tudang Botting*".

3. *Tudong Botting*

Dengan selesainya prosesi mappasikarawa maka dilanjutkan acara tudang botting, yaitu kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan dan didampingi oleh orang-orang yang telah diatur untuk mendampingi pengantin. Namun pada saat peneliti mengadakan observasi partisipasi pada salah satu acara tudang botting pendamping tudang botting tidak lengkap. Tetapi peneliti pernah menyaksikan langsung pendamping pengantin yang lengkap. Perangkat pendamping pengantin sudah diuraikan di atas.

Proses pelaksanaan tudang botting dimana pengantin laki-laki dan perempuan diantar ke pelaminan untuk duduk bersanding. Undangan pada saat ini sebagian sudah hadir. Yang lebih awal datang adalah para kerabat dekat yang tempat tinggalnya jauh, kemudian para undangan lainnya yang termausk kenalan

kerabat keluarga. Biasanya kerabat keluarga yang tinggal di kota sudah hadir pada malam tudang penni.

Model upacara tudang botting dimana para tamu dijemput oleh pagar ayu (*pejampu tamu*) di bagian depan. Penjemput ini adalah dara-dara ayu dan perjaka berpakaian adat lengkap. Pada susunan pertama laki-laki dan perempuan berpakaian pengantin, kemudian disusul muda mudi yang berpakaian baju bodo, sedangkan laki-lakinya berpakaian jas dengan sarung sutera. Setelah tamu memasuki ruangan upacara tudang botting dijemput lagi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan (*to mappatudang*). Orang yang bisa diutus sebagai *to mappatudang* adalah keturunan bangsawan karena orang inilah yang mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat Paria. Khusus untuk *to mappatudang*, laki-laki bertugas mempersilahkan duduk undangan laki-laki, sedangkan *to mappatudang* perempuan mempersilahkan duduk undangan perempuan. Seorang informan yang sering bertugas sebagai *to mappatudang* adalah Baso Ruslam.

Posisi tempat duduk dalam prosesi tudang botting, dimana pengantin pada bagian depan disusul orang tua pengantin. Posisi ini menghadapi para undangan. Sedangkan tempat undangan dibagi dua, untuk laki-laki posisinya pada bagian kanan, sedangkan tamu perempuan berada pada sayap kiri. Melihat susunan ini merupakan suatu indikasi bahwa masyarakat menganut sistem patriarkis.

Acara pada tudang botting antara lain pembacaan ayat suci, permintaan terima kasih keluarga pengantin atas kehadiran para undangan dan terakhir

nasehat perkawinan, kemudian istirahat (makan). Setelah acara istirahat berlangsung, dilanjutkan acara kesenian, biasanya benk atau elektop dan biasanya pula acara kasida (nyanyian kerohanian). Kesenian ini sudah berubah, alat musiknya sudah terimbas modernisasi yang semakin mengglobal.

Berdasarkan observasi lapangan peneliti pada salah satu upacara tudang botting, dimana pakaian para undangan juga sudah terimbas modernisasi, ada juga akibat akulturasi masyarakat. Pakaian undangan perempuan pada masa lalu adalah waju tokko (baju bodo), tetapi pengamatan peneliti sudah banyak yang menggunakan pakaian kebaya yang merupakan pakaian nasional, ada pula yang mengenakan pakaian haji yang lengkap dengan penutup kepala, bahkan ada yang mempergunakan baju biasa yang sering dipergunakan pada acara-acara lainnya. Begitu pula pakaian undangan laki-laki, mereka sudah berubah, pada masa lalu mereka menggunakan jas dengan sarung sutera, namun pada saat ini sudah ada yang mengenakan jas lengkap (jas dengan celana dan dasi), dan ada juga yang mengenakan pakaian biasa.

Upacara Setelah Selesai Perkawinan

Masih berbagai upacara yang dilaksanakan setelah upacara-upacara akad nikah dilakukan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain :

1. **Marola**, yaitu kunjungan ke mertua laki-laki, setelah selesai acara tudang botting, maka suami istri mengadakan kunjungan untuk pertama kalinya ke rumah mertua laki-laki. Kunjungan tersebut disertai dengan sejumlah pengantar

yang disebut "*papparola*", artinya orang-orang yang mengantar dalam kegiatan mapparola atau mengantar mempelai perempuan ke rumah mertuanya.

Dahulu acara ini biasanya dilakukan beberapa hari setelah akad nikah, namun terkadang juga dilaksanakan pada hari itu juga setelah selesai akad nikah. Namun pada saat ini rata-rata pada hari itu juga dilakukan *marola*. Bila *marola* dilakukan setelah selesai tudang botting disebut "*marola pella*", sedangkan bila *marola* dilakukan beberapa hari setelah acara tudang botting disebut "*marola salompe*". *Marola pella* biasa juga disebut "*marola si esso*", sedangkan *marola salompe* biasa juga disebut "*marola mabenni*".

Pada saat diadakan *marola*, maka sejumlah perlengkapan dibawa serta oleh pengantin perempuan. Perlengkapan itu sama dengan yang dibawa oleh calon pengantin laki-laki pada saat akan melaksanakan akad nikah. Acara-acara yang dilakukan pada saat *marola* juga hampir sama dengan pada saat tudang botting di rumah perempuan, yang berbeda hanya pada saat akan melaksanakan tudang botting, pengantin memberikan sembah sujud kepada mertuanya, dan pada saat itu mertua memberikan sarung dan cincin yang merupakan tanda diterima baik oleh keluarga laki-laki.

2. *Mappasilellung*

Mappasilellung, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah selesai acara *marola*, atau tudang botting di rumah pengantin perempuan. Acara ini dilakukan pada malam hari. Yang hadir pada acara ini hanya kerabat dekat.

Proses pelaksanaannya dimana pengantin perempuan disembunyikan pada tempat yang kira-kira sulit didapat pengantin laki-laki. Pengantin perempuan menutup seluruh tubuhnya dengan sarung. Setelah pengantin perempuan disembunyikan, pengantin laki-laki disuruh untuk mencarinya. Situasi pada saat itu dalam keadaan remang-remang, sehingga pengantin laki-laki terkadang kesulitan untuk menemukan istrinya. Pengantin laki-laki terkadang salah tebak, peserta dalam permainan ini yang dianggap istrinya. Ketika suaminya menemukan istrinya, si istri lari mencari tempat persembunyian yang lain dan begitu seterusnya. Setelah pengantin kelihatan sudah lelah barulah disuruh berhenti dan beristirahat.

Kegiatan *silellung* pada saat ini sudah hilang. Beberapa informan penelitian memberikan informasi bahwa kegiatan ini sudah tidak didapatkan lagi. Acara ini hanya merupakan salah satu acara untuk meramaikan suasana pada malam hari sesudah dilakukan *tudang botting* di rumah laki-laki.

3. *Matinro Baiseng*

Matinro baiseng, merupakan salah satu kegiatan setelah selesai acara perkawinan, yaitu orang tua perempuan berkunjung ke rumah besannya untuk saling kenal lebih dekat. Orang tua perempuan harus bermalam beberapa malam. Pada waktu mereka berangkat mereka membawa kue-kue Bugis. Biasanya kue-kue manis yang terbuat dari gula merah. Jenis kue yang tidak pernah ketinggalan adalah ke "*baje*" (=ketan dengan gula merah), maknanya agar mereka dapat diterima dengan baik (manis) seperti rasanya gula merah tersebut.

Setelah orang tua perempuan pulang, beberapa hari kemudian orang tua laki-laki mengadakan kunjungan balasan dengan pola yang sama pada saat kunjungan orang tua perempuan.

Kegiatan di atas pada saat ini masih sering dilakukan, namun terkadang pula tidak dilakukan lagi, nanti pada saat mereka punya kesempatan, barulah mereka saling mengunjungi, kunjungan ini tidak mengikat lagi untuk bermalam, padahal bila kita terjemahkan kata *matinro baiseng* adalah "*matingo*" artinya tidur, sedangkan "*baiseng*" adalah besan, dari kata tidur menunjukkan bermalam di rumah besan. Perubahan ini, biasanya karena adanya kesibukan-kesibukan dari kedua belah pihak.

4. *Mabbolo Kubburu*

Mabbolo kubburu adalah pengantin perempuan diantar untuk melakukan ziarah kubur pada leluhur suaminya. Maknanya agar para leluhur mereka tidak mengganggu mereka. Kegiatan ini juga dilakukan oleh suaminya pada saat mereka di rumah perempuan.

Sampai pada saat ini masih banyak yang melakukan kegiatan seperti di atas. Namun terkadang pula tidak dilakukan lagi karena mereka tidak meyakini lagi mitos tersebut.

5. *Tempat Tinggal Sementara*

Tempat tinggal sementara setelah selesai menikah normanya harus tinggal di rumah perempuan. Nanti pada saat sudah dapat membangun rumah baru mereka pindah. Pada saat ini bukan lagi merupakan suatu norma, apabila

orang tua laki-laki sangat mengharap menantunya tinggal di rumahnya, maka menantunya tidak menolak. Permintaan seperti itu biasanya karena orang tua laki-laki tidak punya anak perempuan, atau karena ekonomi orang tua laki-laki lebih layak. Namun ada juga langsung berpisah dengan orang tua, karena suami mereka bekerja di kota, atau suaminya sudah punya rumah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga akan dijelaskan implikasi yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut terhadap keterkaitan antara sistem perkawinan dengan sistem kekerabatan, makna simbol-simbol dan aturan-aturan yang berlaku pada perkawinan adat Bugis di Paria serta perubahannya dan teori yang digunakan.

Kesimpulan

Dari uraian keterkaitan antara sistem perkawinan dan sistem kekerabatan, serta simbol atau budaya material dan budaya ideal yang berlaku dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Paria serta perubahannya akan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Sistem perkawinan yang dianggap ideal pada masa lalu bersifat endogami (bersifat tertutup). Indikasi ini akan memperkuat kekerabatan dalam upaya untuk mempertahankan kekuatan sosial atau status quo kerabat kaum bangsawan. Kekuatan-kekuatan sosial yang diharapkan langgeng dalam masyarakat adalah : (a) Stratifikasi sosial, Perkawinan dengan kerabat sendiri secara otomatis pewarisan darah tetap bertahan. Sedangkan masyarakat Bugis Paria, menganut norma bahwa keturunan atau pewarisan darah mempunyai korelasi positif untuk

memegang jabatan dalam birokrasi, baik sebagai Arung Paria, maupun sebagai kepala kampung dan (b) Kekuatan ekonomi, Perkawinan dengan lingkungan kerabat akan dapat melanggengkan kekuatan ekonomi lingkungan keluarga dengan kerabat, karena perkawinan berkaitan dengan pewarisan harga terhadap keturunan dan kerabat. Kedua kekuatan di atas menjadi variabel penting dalam lingkungan kerabat para bangsawan untuk melanggengkan status quo mereka, sehingga yang dianggap perkawinan ideal adalah perkawinan dengan lingkungan kerabat sendiri. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecenderungan terjadinya perkawinan dengan lingkungan kerabat adalah untuk menghindari terjadinya penolakan terhadap kerabat yang berstratifikasi lebih tinggi yang dianggap sebagai "*siri*". Sebagai kesiimpulan dengan sistem perkawinan endogami yang dianggap perkawinan ideal akan dapat melanggengkan kekuatan sosial atau mempertahankan status quo kerabat kaum bangsawan. Namun pada saat ini telah mengalami perubahan dengan sistem perkawinan yang bersifat terbuka atau eksogami (di luar kerabat keluarga dekat). Dengan demikian kekuatan sosial atau status quo kerabat bangsawan tidak dapat dipertahankan, hal ini tentunya diakibatkan oleh stimulus-stimulus yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya.

2. Makna simbol-simbol atau budaya material dan aturan-aturan atau budaya ideal yang berlaku dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria pada dasarnya mengandung dua makna, yakni (a) Simbol stratifikasi sosial; Berdasarkan hasil penelitian memberikan indikasi bahwa simbol material dan budaya ideal yang

berlaku dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria menunjukkan stratifikasi sosial seseorang. Hasil analisis ini akan dikemukakan suatu proposisi, bahwa : “Semakin banyak simbol-simbol atau budaya material yang dipergunakan seseorang dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria, maka semakin tinggi stratifikasi sosial seseorang dan semakin banyak aturan-aturan atau budaya ideal yang berlaku dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria, semakin tinggi stratifikasi sosial seseorang”. Banyak simbol-simbol atau budaya material yang harus digunakan oleh para kerabat arung tetapi tidak diberlakukan oleh para kerabat orang biasa, terlebih kepada kaum ata. Hal ini telah dideskripsikan dengan gamblang pada bab pembahasan, (b) Simbol mitos keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batin; Simbol-simbol dan aturan-aturan yang berlaku dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria merupakan indikator, agar calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat selamat dan mempunyai kehidupan yang layak dalam rumah tangganya, demikian pula dalam lingkungan sosialnya dapat menjadi panutan, atau dengan kata lain dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam lingkungan sosialnya. Disisi lain mengandung pula makna keselamatan terhadap lingkungan kerabat calon pengantin perempuan dan lingkungan calon pengantin laki-laki.

Simpulan-simpulan di atas telah mengalami perubahan, dengan sistem perkawinan yang bersifat endogami yang dianggap sebagai perkawinan ideal (lingkungan keluarga kerabat dekat) berubah menjadi sistem perkawinan eksogami (di luar lingkungan kerabat) yang pada saat ini dianggap perkawinan

ideal. Dengan perubahan ini akan menimbulkan dampak terhadap meleburnya kekuatan-kekuatan sosial yang pada masa lalu dipertahankan para kaum bangsawan untuk mempertahankan status quo mereka. Dampak dari perubahan ini adalah kelas sosial dalam masyarakat akan hilang dan stratifikasi sosial dalam masyarakat semakin menyempit, karena kekuatan-kekuatan sosial yang dikuasai oleh para kerabat kaum bangsawan berangsur-angsur hilang.

Simbol-simbol dan aturan yang berlaku juga telah mengalami perubahan. Simbol-simbol yang dipergunakan oleh para kerabat bangsawan pada masa lalu sangat berbeda dengan simbol-simbol yang dipergunakan oleh para kerabat orang-orang biasa. Namun saat ini simbol yang dipergunakan kerabat bangsawan sudah sering juga dipergunakan kerabat orang biasa, demikian halnya aturan-aturan yang berlaku. Sebagai kesimpulan, bahwa simbol dan aturan yang berlaku sudah mengalami perubahan nilai dalam masyarakat. Pada masa lalu simbol dan aturan-aturan yang berlaku merupakan simbol status seseorang, sedangkan pada saat ini simbol itu bermakna sebagai kekuatan ekonomi seseorang.

3. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perubahan budaya material lebih cepat dibanding dengan budaya ideal. Hal ini terlihat pada pakaian adat yang dipergunakan oleh para undangan, alat-alat yang dipergunakan dalam upacara perkawinan. Alat musik yang meramaikan upacara perkawinan, alat perhiasan yang dipergunakan oleh pengantin dan alat hias tempat upacara pengantin serta berbagai simbol material lainnya yang telah berubah. Sedangkan budaya ideal

masih banyak yang berlaku, misalnya dalam struktur pelaksanaan upacara perkawinan, dimana pola-pola tersebut sebagian besar tetap bertahan.

Implikasi Teoritik

Implikasi dari hasil penelitian ini, bahwa keterkaitan sistem perkawinan dengan sistem kekerabatan dan makna simbol-simbol serta aturan-aturan yang berlaku dalam perkawinan adat Bugis di Paria telah mengalami perubahan. Implikasi teoritik didasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Keterkaitan sistem perkawinan dengan sistem kekerabatan terlihat pada terbentuknya kekerabatan akibat dari perkawinan. Kekerabatan yang dikenal masyarakat dengan istilah "*seajing*". Sistem kekerabatan yang didasarkan atas dasar terjadinya perkawinan akan terbentuk dua hubungan, yakni (a) Kerabat dekat (*seajing sampung lolo*), dan (b) Kerabat jauh (*seajing siteppang*). Hubungan ini telah didukung oleh teori Brown dan Levi-Strauss dalam menganalisis struktur kekerabatan, beliau melihat hubungan kekerabatan adalah: (a) Hubungan positif adalah hubungan berdasarkan sikap bersahabat, mesra dan cinta mencintai dan (b) Hubungan negatif yaitu hubungan yang bersikap sungkan, resmi dan hormat.

Hasil penelitian semakin memperkuat teori tersebut di atas, bahwa *seajing sampung lolo* adalah hubungan yang berdasarkan sikap bersahabat, mesra dan cinta mencintai dan hubungan *seajing siteppang* adalah hubungan yang berdasarkan sikap sungkan, resmi dan hormat.

Berdasarkan hubungan di atas, maka masyarakat Bugis Paria mengenal perkawinan yang dianggap sumbang atau disebut oleh Levi-Strauss "*incest*". Implikasi teori berdasarkan hasil penelitian terhadap keterkaitan dengan sistem perkawinan dengan sistem kekerabatan. Dalam masyarakat Bugis di Paria melihat perkawinan yang ideal adalah perkawinan dengan kerabat dekat (seajing sampung lolo) yang terjadi pada masa lalu, sedangkan perkawinan yang dianggap ideal pada saat ini adalah perkawinan dengan kelompok kerabat lain. Levi-Strauss mengemukakan teori ini, yaitu "**struktur elementer**" dan "**struktur complexes**" atau tukar menukar wanita secara terbatas dan tukar menukar wanita secara meluas. Perubahan ini terlihat dalam masyarakat Bugis di Paria pada masa lalu yang menganut sistem perkawinan yang bersifat endogami dan pada saat ini menganut sistem yang bersifat eksogami. Perubahan tersebut mengakibatkan kekuatan-kekuatan sosial atau status quo tidak mampu lagi dipertahankan oleh kaum kerabat bangsawan.

2. Prosesi perkawinan adat Bugis di Paria telah mengalami perubahan struktur, makna simbol maupun aturan yang berlaku. Hal ini telah diungkapkan oleh informan penelitian, namun perubahan tersebut berjalan secara evolusi, bahkan ada sebagian informan tidak melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung teori Brown yaitu "*Social Structure*", bahwa bentuk dari struktur sosial adalah tetap, dan kalau berubah proses itu biasanya berjalan lambat. Hasil penelitian ini juga telah mendukung pendapat Koentjaraningrat dalam melihat gerak sosial budaya dalam masyarakat, bahwa

suatu struktur sosial mempunyai kontinuitas, tetapi kontinuitas itu selalu berubah walaupun kadang-kadang hanya sedikit, sehingga dari luar mungkin tampak seperti diam, tetap mantap, sebaliknya kontinuitas struktur sosial dapat juga berubah cepat sehingga dari luar tampak dinamis dan progresif.

3. Makna simbol-simbol dan aturan yang berlaku dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria telah mengalami perubahan. Terjadinya perubahan atas tindakan individu untuk memodifikasi makna simbol-simbol dan aturan-aturan yang berlaku tentunya didasarkan atas penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatan dengan simbol-simbol yang dihadapi. Hal ini mendukung premis Blumer tentang teori intraksionisme simbolis.
4. Olaf Larson dan Everest Rogers telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teori perubahan. Salah satu pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam implikasi teoritik ini adalah "Stimulus-stimulus apa yang mendorong terjadinya perubahan? Berdasarkan pertanyaan ini, bila dikaitkan dengan hasil penelitian ditemukan empat variabel stimulus yang mengakibatkan terjadinya perubahan, yakni :
 - (a) Faktor pendidikan, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor pendorong proses perubahan sosial budaya adalah "sistem pendidikan formal yang maju". Hasil penelitian terlihat adanya korelasi positif terjadinya perubahan dalam perkawinan adat Bugis di Paria akibat tingkat pendidikan yang semakin maju.

- (b) Variabel ekonomi; Pergeseran nilai sosial budaya tentang masyarakat dalam perkawinan adat Bugis di Paria, baik pelapisan sosial masyarakat akibat perkawinan maupun perubahan makna simbol-simbol dan aturan-aturan yang berlaku serta perubahan struktur dalam prosesi perkawinan adatnya, karena adanya perubahan kekuatan ekonomi yang mengaibatkan ide individu atau kelompok masyarakat berubah; hal ini mendukung pendirian Marx, bahwa ide muncul dari kondisi sosial ekonomi tertentu dan penting untuk mendorong orang mempertahankan atau mengubah kondisi sosial ekonomi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekuatan ekonomi sangat mempengaruhi perubahan dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria.
- (c) Modernisasi; Modernisasi merupakan variabel penting dalam mendukung stimulus terjadinya perubahan dalam prosesi perkawinan adat Bugis di Paria sebagai upaya untuk memperoleh citra baru (image). Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Pool, bahwa modernisasi merupakan suatu proses transformasi, suatu perubahan yang mencakup proses memperoleh citra baru (image). Informan penelitian Abu Hamid mengemukakan bahwa salah satu perubahan citra dalam prosesi perkawinan adat adalah citra tentang memilih jodoh. Dan berbagai perubahan lainnya pada prosesi perkawinan adat Bugis di Paria sebagai upaya untuk mencari citra baru dalam masyarakat.

- (d) Kontak dengan kebudayaan lain; Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masyarakat Bugis di Paria telah banyak melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Dimana masyarakat Bugis Paria banyak yang menuntut ilmu di berbagai kota di Indonesia bahkan di luar negeri. Hal ini mendukung pandangan Sarjono Soekanto tentang faktor pendukung terjadinya proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat.

Empat variabel di atas merupakan stimulus yang sangat berpengaruh dalam proses perubahan pada prosesi perkawinan adat Bugis di Paria, dan tentunya masih ada variabel-variabel lain yang mendukung terjadinya proses transformasi perubahan adat tersebut di atas yang dapat dijadikan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azami dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1997.
- Bertrand, Alvian L., *Sosiologi Kerangka Acuan Metode Penelitian Teori-Teori Tentang Sosiologi Kepribadian dan Kebudayaan*, Penerbit PT. Bina Ilmu, 1980.
- Black, James A. dan Champion, Dean J., *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. ERASCO, Bandung, 1992.
- Craib, Ian, *Teori-Teori Sosial Modern Dari Parsons Sampai Habermas*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Djuweng, Stepanus dkk. *Kisah Dari Kampung Halaman, Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*, Penerbit Dian Interfiadei, 1996
- Farid, Abidin, Zainal, Andi; *Wajo Pada Abad XV – XVI*, Desertasi, 1986.
- Garna Judistira. K, *Teori-teori Perubahan Sosial*, Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran, Bandung, 1992.
- Geertz Clifford, Mojokunto, *Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, Penerbit PT. Pustaka Grafiti Pers, Jakarta, 1986.
- Gidden, Anthoni, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Tulis Marx Durkheim dan Max Weber*, Penerbit Universitas Indoensia (UI-Press).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Hanandini, Dwiyantri, *Perubahan Fungsi dan Makna Mamak dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kotamadya Surabaya*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1996.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hajeri, *Sejarah Singkat Sekolah Dasar Negeri No. 158 Paria Wilayah Majauleng I Kabupaten Wajo*, Laporan Kepala SDN No. 158 Paria, 7 Pebruari 1990.

- Hamid, Panangrangi, *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan*, Depdikbud Direktorat Jendral Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ujung Pandang, 1995.
- , *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*, 1981.
- Ihromi, T.O., *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Diterbitkan Untuk Yayasan Obor Indonesia dan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1994.
- Koetjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997.
- , *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- , *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbit PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1992.
- , *Sejarah Teori Antropologi II*, Penerbit Universitas Indonesia, UI-PRESS, 1990.
- , *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- , *Sejarah Teori Antropologi I*, Penerbit Universitas Indonesia, UI-PRESS, 1987.
- , *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- , dan Donal K. Emerson, *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, 1982.
- Lauer, Robert H, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rostakarya, Bandung, 1968.
- Mazhurus M and Mamum, *Marriage, Patterns and Some Issues Related to Adolescent Marriage in Bangladesh*, Jurnal Asia Pasific Population, Vol. 11, No. 3 (Sept-Okt-Nov), 1997.

- Meekers, Dominique, *Combining Ethnographie and Survey Methods : A. Study of Zone of Zimbabwe*, University Park, PA. 19802 USA, Vol. XXV, No. 3 (Autuma, 1994).
- Paz Octavia, Levi Strauss, Empa, *Atropologi Struktural*, Penerbit LKIS, 1997.
- Pabittei, Aminah, St, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Depdikbud Prop. Sulawesi Selatan, 1996.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Prawirahamidjojo, Soetoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University PRESS, 1994.
- Rahim, Rahman, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddin University PRESS, 1992.
- Salim, Muhammad, *Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Attoriolong I*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, 1996.
- Sani, Yamin, M. *Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1989.
- Sapada, Nurhari, Andi, *Tata Rias Pengantin dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis Makasar*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 1985.
- Sayogya Pudjiwati, *Sosiologi Pembangunan*, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta, Bekerja Sama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 1985.
- Schoorl, J.W., *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Spradley, James P, *Metode Etnografi*, Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik Dari Graunded*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997.

- Suyanto, Bagong dkk, (ed.), *Metode Penelitian Masyarakat*, Airlangga University PRESS, Surabaya, 1995.
- Tobing O.L., *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Ammanah Gappa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1977.
- Vredembregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta MCMYCII, 1992.
- Weiner Myron, *Modernisasi : Dinamika Pertumbuhan*, Diterbitkan Gajah mada University PRESS Dari Voice of America Forum Lectures. 1981. gb. X-XI.
- Yoesoef, Wiwik P., *Busana Adat Pada Masyarakat di Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1995/1986.

DAFTAR KOSA KATA

Andi, gelaran bangsawan yang tertinggi dalam masyarakat.

Alukalu, pemberian khusus dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dikawininya.

Arung, bangsawan.

Arung matoa, orang yang menjadi raja pada kerajaan Wajo pada masa lalu.

Assialanna memeng, kawin dengan sepupu sederajat kedua.

Assialang marola, kawin dengan sepupu sederajat kesatu.

Ata, sahaya atau orang yang mengabdikan kepada bangsawan.

Balanca, uang belanja yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dipergunakan meramaikan pesta perkawinan.

Baso, gelaran dalam masyarakat pada stratifikasi bangsawan tingkat kedua.

Batara, langit yang merupakan tempat tertinggi dan tempat bernaung

Bilala, bilal

Calabai, waria

Ceko, membersihkan rambut pada bagian dahi dan di belakang kepala.

Cerak, mengorbankan binatang bermakna sebagai keselamatan.

Ciccing passio, cincin pengikat.

Daeng, gelaran dalam masyarakat pada stratifikasi bangsawan tingkat ketiga.

Dee nasitongko bakue, tidak sederajat.

Doja, orang yang mengurus kebersihan masjid dan waktu masuknya shalat.

Idimuaha, terserah.

Ilawolo, dewa dari langit.

Imang, Imam.

Indo botting, orang yang merias pengantin.

Ipasilorongengi, dikawinkan dengan keluarganya sendiri.

Jalik, tikar.

Kepala kampong, kepala kampung.

Katte, hatib.

Lamming, alat hias pada tempat pelaminan pengantin.

Mabbahu dara, perempuan bangsawan kawin dengan laki-laki orang biasa.

Maddara takku, kelas bangsawan tingkat tinggi atau berdarah biru.

Madduppa, mengedarkan undangan.

Madduta, pihak laki-laki mengirim duta untuk melamar.

Majjalik, tinggal di tikar

Melli dara, laki-laki orang biasa mengawini perempuan bangsawan.

Mana warang-parang, harta warisan.

Mappucci, membersihkan rohaniah sebelum memasuki perkawinan.

Mappasau, mandi uap atau membersihkan lahir dan batin sebelum memasuki perkawinan.

Mappasiarekung, memperkuat tali perjanjian antara pihak yang dilamar dengan yang melamar.

Mappesek-pesek=*mabbalawo celle*=*mattiro*, pihak laki-laki mengutus orang kepada pihak perempuan yang akan dipinang untuk mengetahui keberadaan perempuan tersebut.

Matunrei bungae na adee, lebih tinggi jabatan daripada kebangsawanan.

Mattola angkangulung, kawin dengan ipar laki-lakinya karena suaminya meninggal (*levirat*) atau kawin dengan ipar perempuannya karena istrinya meninggal (*sororat*).

Monro rijalik sipolo, uang belanja sebagian berupa uang tunai.

Monro rigalunggi sipolo, uang belanja sebagian berupa sawah.

Onrona, kedudukan dalam stratifikasi sosial.

Pabbenet anakna, mengawinkan anaknya.

Pacci, bersih atau membersihkan diri.

Pete-pete, mobil angkutan umum

Pappaduppa, pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa pakaian lengkap.

Pattampa, pemberian pihak laki-laki kepada perempuan berupa sawah atau emas dan lain-lain.

Passeppi, orang yang mengapit pengantin pada saat mereka bersanding

Ripaddeppe mabelae, kawin dengan sepupu sederajat ketiga.

Ri tana ugi, di tanah Bugis.

Sara', orang yang mengurus masalah keagamaan.

Seajing mabela, kerabat keluarga jauh.

Seajing macawe, kerabat keluarga dekat.

Seajing pole ri ambo, kerabat keluarga dari bapak.

Seajing pole ri indo, kerabat keluarga dari ibu.

Seajing siteppang, masuk dalam kerabat keluarga akibat perkawinan.

Seajing sampung lolo, kerabat keluarga akibat kelahiran.

Silariang, kawin lari.

Sikapukeng, sederajat.

Siri, malu.

Sikarawa, pengantin laki-laki menyentuh bagian tertentu dari tubuh pengantin perempuan sebagai tanda sudah resmi sebagai suami istri.

Sompa, mahar.

Sompa kati, mahar untuk perempuan bangsawan kelas tinggi di luar Bugis di Paria.

To biasa, orang kebanyakan.

To sama, orang kebanyakan.

To deceng, orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan bangsawan kelas tinggi.

To mudduta, orang yang diutus melamar.

To manurung, orang yang turun dari langit.

To maradeka, orang yang tidak dipekerjakan lagi oleh bangsawan

To riaddutai, orang yang dilamar.

Tudang botting, duduk bersanding.

Tudang penni, rangkaian upacara perkawinan pada malam hari sebelum pelaksanaan acara akad nikah esok harinya.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PUSTAKA UNIVERSITAS AIRLANGGA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN SURABAYA 60286 (031) 5030076, 5023715, 5350170, FAX. (031) 5030076

Nomor : 936 /J03.11/PP/1999
Lamp :
Hal : Izin melaksanakan penelitian

26 Maret 1999

Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo
Propinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Magister peserta
Program Pascasarjana Universitas Airlangga Program Studi
Ilmu-Ilmu Sosial angkatan tahun 1997/1998 atas nama :

n a m a : Abdul Khalik Rauf
n i m : 099712730 / M
j u d u l : PERKAWINAN ADAT BUGIS DI PARIA (Studi
Etnografi Tentang Makna Perkawinan Adat
Suku Bugis Paria Serta Prosesi Dan
Berbagai Keunikannya di Kabupaten Wajo
Propinsi Sulawesi Selatan).

pembimbing : Dr.L.Dyson P.M.A.

ma'la dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk
memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk
melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

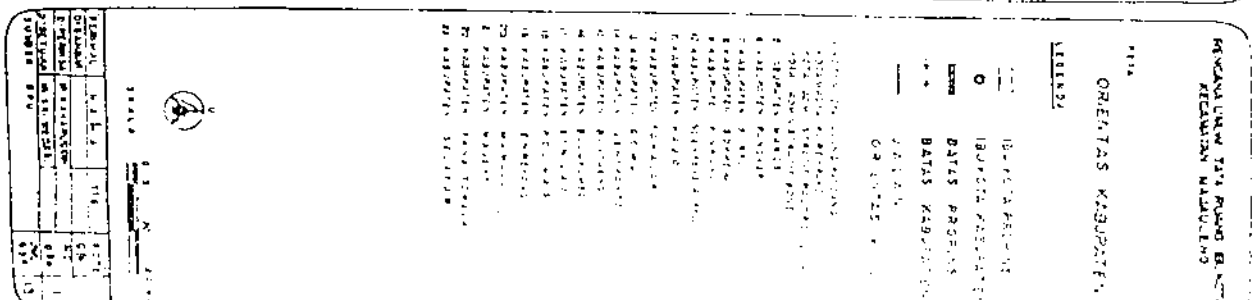
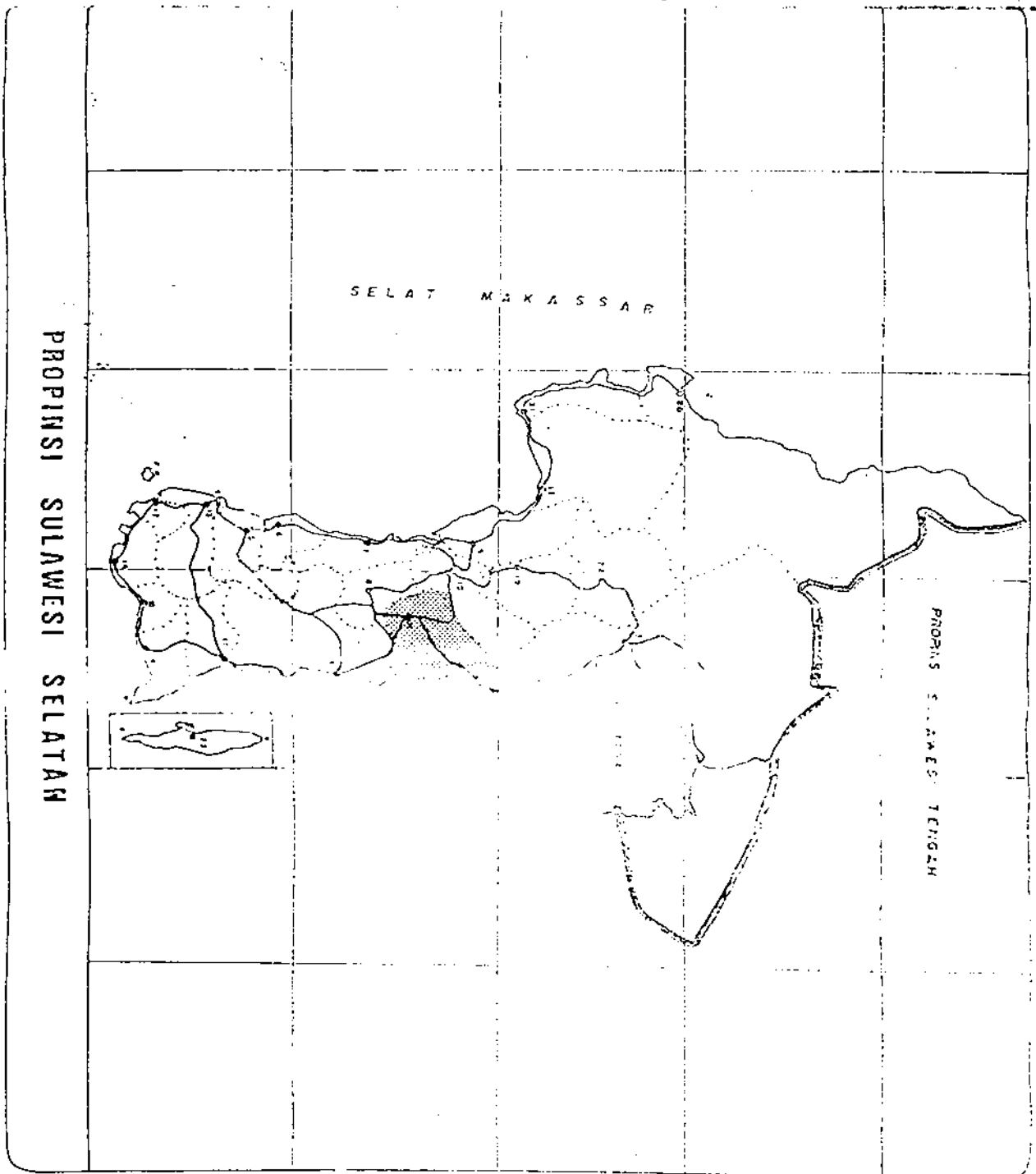
Demikian dan atas bantuan Saudara, kami sampaikan terima
kasih.

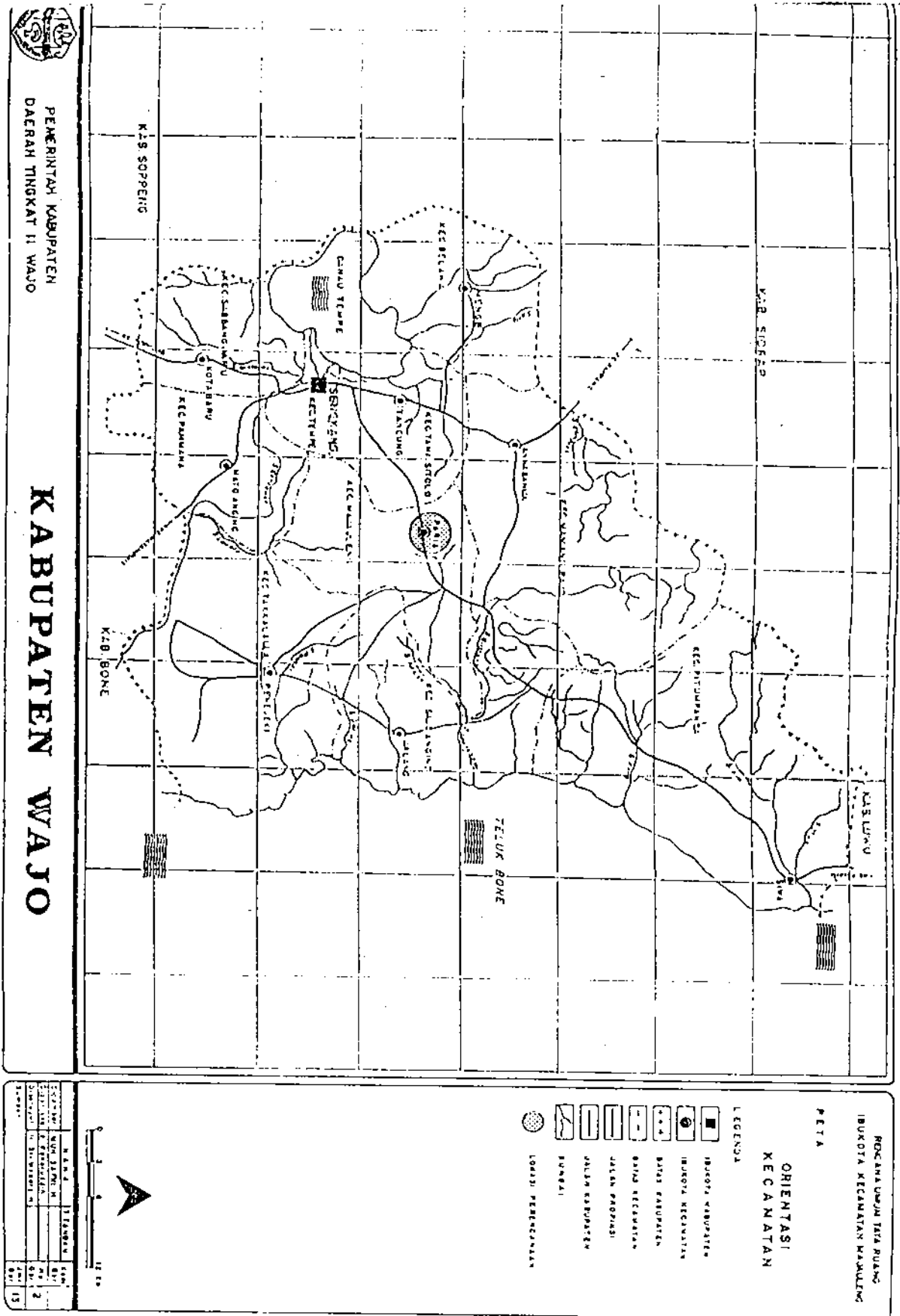


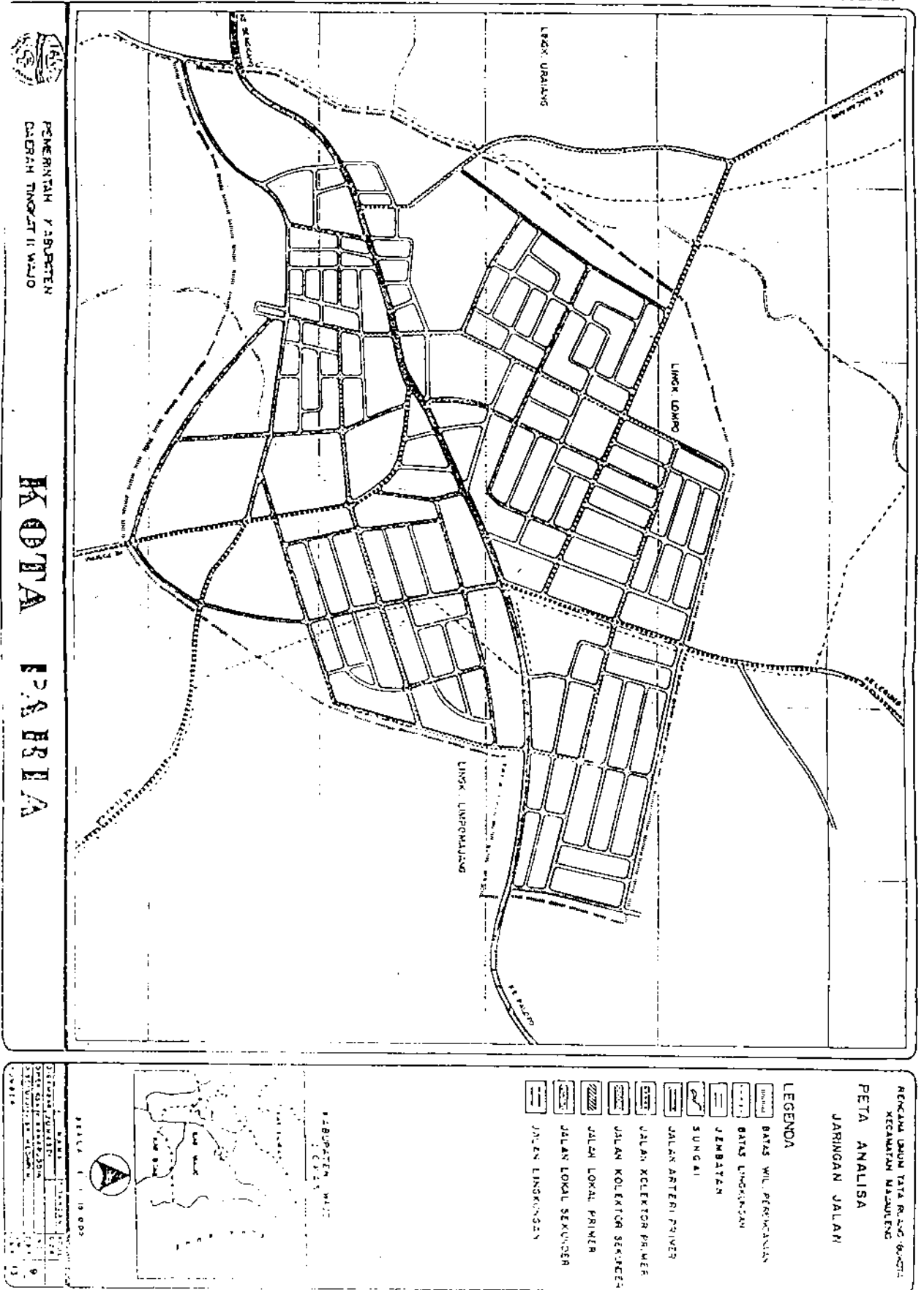
Direktur
Bidang Akademik,

Prof. Dr. R. Pitono Soeparto, dr.

NIP. 130206153







DOKUMEN FOTO-FOTO PERKAWINAN ADAT BUGIS DI PARIA YANG TELAH BERUBAH

Acara Akad Nikah
(Dokumen 1999)



Tempat Duduk Bersanding Pengantin Bersama dengan Para Pendamping
(Dokumen 1999)



Para Pengantar Pengantin Laki-Laki (Papenre Botting) dan Pendampingnya
(Passepi dan Patapong-Tapong) (Dokumen 1999)



Pengantin Bersama Passepi dan Patapong-Tapong
(Dokumen 1999)



Penjamput Tamu (Pagar Ayu) pada Bagian Depan (Gapura)
(Dokumen 1999)



Para Undangan Laki-Laki Yang Hadir pada Saat Upacara Perkawinan
(Dokumen 1999)



Tempat Kue-Kue (Bosara) Yang Merupakan Simbol Strata Sosial Pada Masa Lalu
(Dokumen 1999)



Kunjungan Pertama Pengantin Perempuan Kepada Keluarga Laki-Laki (Pengantin Perempuan Memberi Penghormatan pada Mertua atau Sungkem)
(Dokumen 1995)



Prosesi pada Malam Tudang Penni
(Dokumen 1999)



Orang Tua Pengantin dan Kerabat Dekatnya Menghadapi Para Undangan
(Dokumen 1999)



Orang Tua Pengantin dan Kerabat Dekatnya Menghadapi para Undangan
(Dokumen 1999)



Salah Satu Model Kesenian Pada Saat Ini Yang Meramalkan Prosesi Perkawinan
(Dokumen 1999)



Prosesi Mappaci
(Dokumen 1999)



Prosesi Mappasikarawa
(Dokumen 1999)

